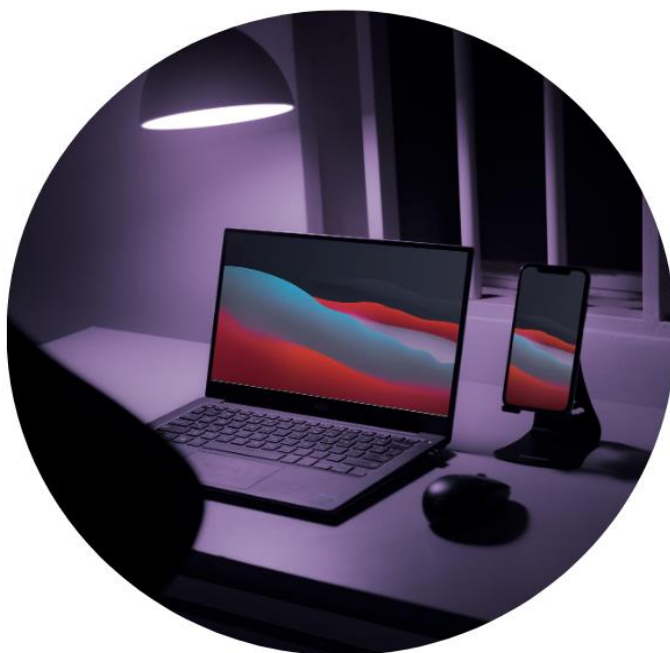




DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



LAKIP TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Lingkungan Hidup yang semula bernama Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, yang secara spesifik tugas pokok dan rincian tugas jabatan struktural diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 39 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengendalian dan Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Pada Tahun 2016 diterbitkan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 39 tahun 2016 yang kemudian disusul dengan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 37 tahun 2018 tentang dengan Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 39 tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, dan pada tahun 2021 diterbitkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas : Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Fungsi :

- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan dan penataan lingkungan

- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan **sampah**, limbah B3 dan kebersihan;
- Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Ditinjau dari segi kuantitas, jumlah sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

No	Status	Jenis Kelamin		Jumlah
	Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	
	ASN	14	10	24
	Upah Jasa	77	61	138

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 162 orang, sumber daya manusia pada Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur terdiri dari tenaga ASN dan tenaga upah jasa. Tenaga ASN berjumlah 27 orang yang terdiri dari laki-laki 14 orang dan perempuan 13 orang, sedangkan tenaga upah jasa berjumlah 135 orang yang terdiri dari laki-laki 72 orang dan perempuan 63 orang.

Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan
Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2024

No	GOL	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												TOTAL	
		S3/S2		1/DIV		1-D3		SMA / SEDERAJAT		SMP / SEDERAJAT		SD / SEDERAJAT			
									P	L	P		P	L	
	IV	5				-		-			-		-	6	1
	III	1				-					-		-	7	12
	II					-		-			-		-	1	-
	I					-					-		-	-	-
	UpahJasa			14		-		30	14	12	9		26	72	63
Jumlah														86	

Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur sebanyak 27 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 6 orang untuk golongan IV; S1 sebanyak 1 orang untuk golongan IV; S2 sebanyak 3 orang untuk golongan III; S1 sebanyak 15 orang untuk golongan III; D3 sebanyak 1 orang untuk golongan III; dan SMA/Sederajatnya sebanyak 1 orang untuk golongan II .

Jumlah tenaga Upah Jasa Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 135 orang yang terdiri dari upah jasa pelayanan umum : 22 orang dan upah jasa tenaga kebersihan 113 orang. Upah jasa tenaga umum dengan kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 14 orang, SMA/Sederajatnya sebanyak 6 orang dan SD sederajat sebanyak 1 orang. Upah jasa tenaga kebersihan sebanyak 113 orang dengan

kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 1 orang;; SMA sebanyak 38 orang; SMP sebanyak 20 orang; SD sebanyak 50 orang dan tidak sekolah sebanyak 4 orang.

Tabel 1.3
Jumlah Pejabat Struktural/Eselon Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

No	PEJABAT STRUKTURAL/ ESELON	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP / SEDERAJAT		SD / SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	II A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	II B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3	III A	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	III B	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
5	IV A	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
6	IV B	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
JUMLAH		5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2

Jumlah Pejabat Struktural Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur sebanyak 9 orang, yang terdiri dari:

- Pejabat Eselon II.B dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 orang (Laki-Laki);
- Eselon III.A dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 orang (laki-laki);
- Eselon III.B dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 2 orang (1 laki-laki dan 1 perempuan), S1 sebanyak 1 orang (laki-laki).
- Eselon IV.A dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 2 orang (perempuan), S1 sebanyak 2 orang (laki-laki)

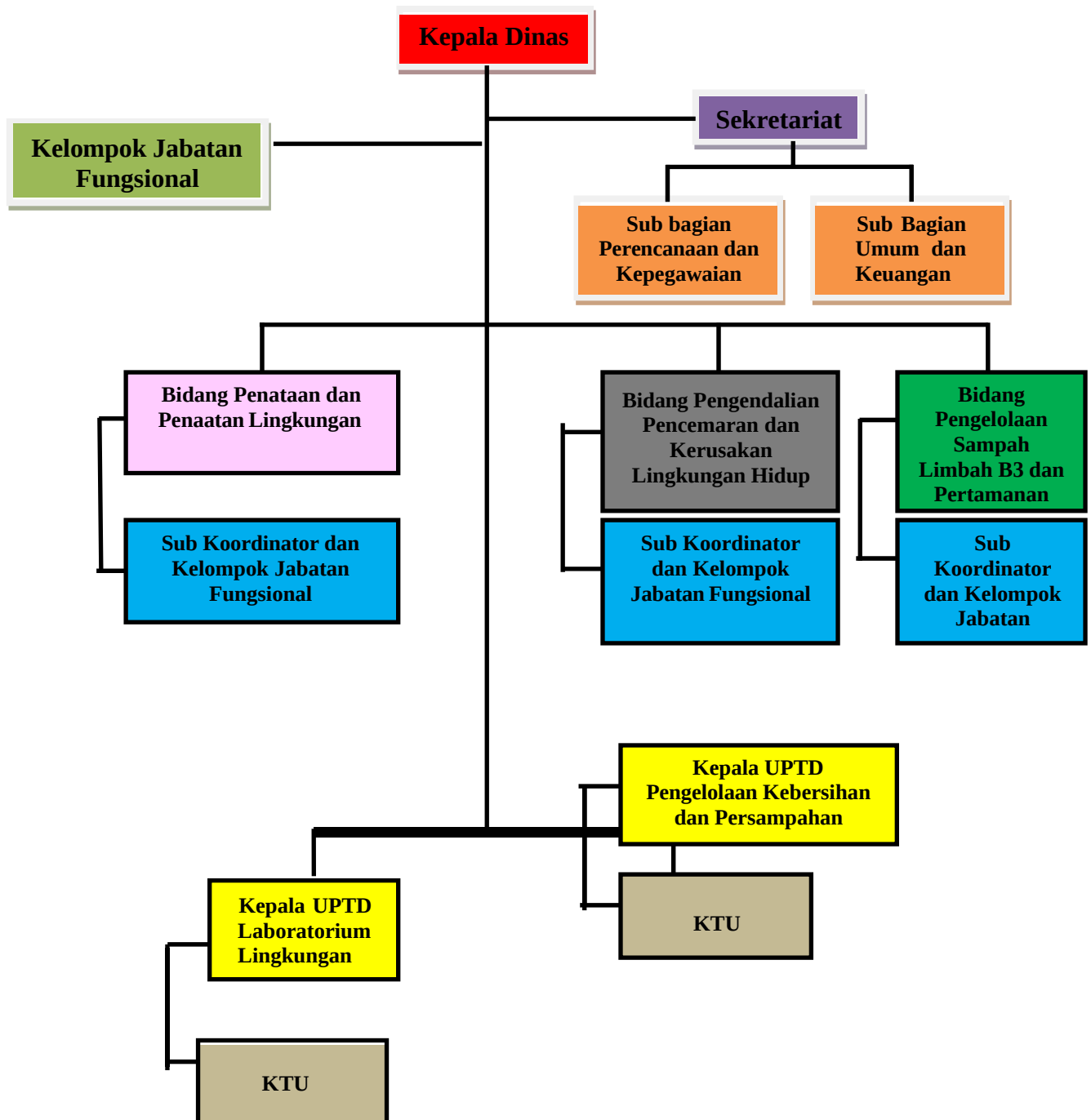
Tabel 1.4
Jumlah Pejabat Fungsional Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Dan Jenis Kelamin
Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

No	PEJABAT FUNGSIONAL	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP / SEDERAJAT		SD / SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Fungsional Pengendali dampak Lingkungan	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
2	Fungsional Pengawas Lingkungan	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
JUMLAH		2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1

Jumlah Pejabat Fungsional Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur sebanyak 6 orang, yang terdiri dari:

- Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 orang (laki-laki) , S1 sebanyak 3 orang (Laki-Laki); dan
- Fungsional Pengawas Lingkungan dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 orang (laki-laki) dan kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 1 orang (perempuan).

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur



1.3 ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaah terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Isu-isu strategis lingkungan yang berkembang saat ini adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya degradasi lingkungan; Semakin menurunnya kondisi lingkungan akibat semakin meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah oleh aktivitas masyarakat dan/atau industri.
2. Peningkatan beban pencemaran; Semakin banyaknya jumlah kegiatan/usaha yang membuang limbah sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin menurun.
3. Perubahan iklim; Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu udara, ketersediaan sumberdaya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana, tetapi juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap kesehatan.

Sementara upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan belum optimal. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur memiliki permasalahan utama (Strategic Issued) antara lain :

1. Pencemaran Air

Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah industri tambang disamping itu juga memiliki 3 Danau besar, beberapa sungai besar dan garis pantai yang panjang sehingga Kabupaten Luwu Timur termasuk daerah yang rawan pencemaran air.

Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat (dari tingkat internasional hingga sumber air pribadi dan sumur), Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan.

Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

- Meningkatnya kandungan nutrisi dapat mengarah pada eutrofikasi.
- Sampah organik seperti air comberan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem.
- Industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrisi dan padatan. Air limbah tersebut memiliki efek termal, terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik, yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air.
- Seperti limbah pabrik yg mengalir ke sungai
- Pencemaran air oleh sampah
- Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan

2. Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah suatu peristiwa masuk atau tercampurnya polutan (unsur-unsur berbahaya) ke dalam lapisan udara (atmosfer) yang bisa mengakibatkan menurunnya kualitas udara. Pada dasarnya, secara alamiah alam itu mampu mendaur ulang berbagai macam jenis limbah yang dihasilkan oleh makhluk hidup, akan tetapi jika konsentrasi limbah yang dihasilkan sudah tidak sebanding dengan laju proses daur ulang maka itulah yang menyebabkan pencemaran. Dalam studi dijelaskan bahwa pencemaran lingkungan yang paling berpengaruh yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara akan menimbulkan dampak negatif, terkhusus lagi bagi kehidupan di muka bumi.

Secara umum pencemaran udara di Kabupaten Luwu Timurbersumber dari cerobong asap industri, kabut asap (dampak dari kebakaran hutan), gas buang kendaraan, debu dan masih banyak sumber pencemaran udara lainnya.

3. Penurunan Kualitas Sumberdaya Alam

Penurunan Kualitas Sumber Daya Alam ditandai dengan terjadinya degradasi lingkungan sehingga mengakibatkan kerusakan sumber daya alam. Degradasi ialah penurunan kualitas atau penurunan daya dukung lingkungan akibat dari aktivitas/kegiatan manusia (antropogenic) ataupun alami.

Kenyataan yang terjadi bahwa manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam telah mengakibatkan berbagai dampak yang cenderung menurunkan kualitas maupun kuantitas sumber daya alam tersebut.

Secara umum penurunan kualitas sumberdaya alam di Kabupaten Luwu Timur diakibatkan pembukaan lahan hutan yang tidak terkontrol, baik itu lahan pertambangan, pertanian, perkebunan, tambak dan perumahan sehingga perlu peran pemerintah daerah untuk mengontrol kerusakan sumberdaya alam.

4. Persampahan

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dengan pola hidup yang semakin konsumtif sudah tentu diikuti dengan meningkatnya produksi sampah. Di semua daerah, sampah selalu menimbulkan masalah yang rumit

untuk dipecahkan. Manusia mempunyai berbagai aktivitas untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya dengan memproduksi bahan makanan, minuman, barang dan lainnya dari sumber daya alam yang tersedia. Di sisi lain aktivitas tersebut menghasilkan barang-barang yang akan dikonsumsi, namun di sisi lain aktivitas tersebut juga menghasilkan bahan buangan yang tidak diinginkan atau tidak berguna. Makin hari makin bertambah banyak, hal ini erat hubungannya dengan ketersediaan ruang hidup manusia yang relatif tetap, dan bahan buangan ini dikenal dengan sampah.

Butuh waktu bertahun-tahun untuk mengurai sampah, khususnya sampah plastik. Sampah plastik ini merupakan sampah yang bersifat anorganik, artinya sangat sulit terurai menjadi satu dengan tanah. Berbeda dengan sampah organik, yang tergolong mudah untuk terdekomposisi menjadi pupuk.

Perilaku masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan seringkali berdampak negatif bagi lingkungan, mulai dari banjir sampai timbulnya masalah-masalah penyakit. Kesadaran masyarakat khususnya di Kabupaten Luwu Timur masih perlu ditingkatkan pentingnya akan kebersihan lingkungan. Kesadaran dan perilaku, merupakan dua hal yang sangat sulit untuk diubah. Untuk mengubah perilaku manusia, diperlukan strategi dan tahapan-tahapan tertentu

1.4 SISTEMATIKA LAPORAN

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan/Sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Rencana strategis juga merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

A. VISI DAN MISI

a. VISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Dinas Lingkungan Hidup mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Periode 2021 – 2026 yaitu :

**“Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan lebih Maju
Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**

b. MISI

Misi merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan agar apa yang telah ditetapkan dapat diwujudkan. Adapun Misi Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Misi ke 3 Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Periode 2021 – 2026 yaitu :

**“Menyediakan Infrastruktur Daerah yang Memadai dan
Lingkungan yang Berkualitas ”**

c. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan hasil akhir yang akan dicapai oleh sebuah Organisasi Perangkat Daerah oleh karena itu Tujuan Strategis harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur telah menentukan tujuan strategis yaitu :

“Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”

B. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria yang spesifik, dapat dinilai dan terukur menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Sasaran strategi yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan**
- 2. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah**

Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran Dinas Lingkungan
Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Indeks Kualitas Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air	Point	27	27.50	28	28.20	28.50	28.50
		Meningkatkan Indeks Kualitas Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Udara	Point	29.50	29.55	29.60	29.65	29.70	29.70
			Indeks Tutupan Lahan	Point	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50
		Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP	Persen	60.55	60.56	60.57	60.58	70.00	70.00

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 merupakan target kinerja tahun ke tiga dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016-2021 terdapat rumusan sasaran, indikator dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024.

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah (dalam hal ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur) kepada atasan langsungnya (dalam hal ini Bupati Kabupaten Luwu Timur), perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh pimpinan unit kerja dalam 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang akan dikelolanya. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

TABEL 2.2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LUWU TIMUR
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air	24.93 Point
		Indeks Kualitas Udara	38.87 Point
		Indeks Tutupan Lahan	16.32 Point
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	79,60

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 5,050.975.350.00	APBD
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 395.036.690.00	APBD
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 682.594.575.00	APBD
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp 177.547.810.00	APBD
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp 44.804.010.00	APBD

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2024

6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 97.425.000.00	APBD
7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	Rp 45,289,900.00	APBD
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan	Rp 26.759.950.00	APBD
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 70,044,950.00	APBD
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 57.488.000.00	APBD
11	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 3,974,094,830.00	APBD
JUMLAH		Rp 10.622.061.065.00	APBD

Pihak Kedua



Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Pertama

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KAB. LUWU TIMUR



Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si

LAMPIRAN 2

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LUWU TIMUR PENJELASAN KINERJA TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1

A. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menjadi salah satu Indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang merupakan gambaran capaian kinerja pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH merupakan gambaran kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan. Nilai IKLH digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur.

Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1.	Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)	merupakan kebutuhan dasar seluruh makhluk hidup karena kualitas air yang baik dapat meningkatkan kualitas kehidupan manusia dari sisi kesehatan bahkan menopang keberlangsungan air sebagai salah satu indikator yang patut diperhatikan dalam penentuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup untuk menggambarkan adanya perbaikan terhadap lingkungan hidup. adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKA menunjukan kondisi kualitas air di suatu wilayah berdasarkan status mutu air hasil dari pengukuran parameter fisika, kimia dan bakteriologis.	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$ Dimana L_{ij}:Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j) C_i:Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i) IP_j:Pencemaran bagi peruntukan (j) IP_j: (C_i/L_{ij}, C₂/L_{2j},...) (C_i/L_{ij})Maksimum : Nilai maksimum dari C_i/L_{ij} (C_i/L_{ij})Rata-rata : Nilai rata-rata dari C_{ij}/L_{ij}	Data uji kualitas air
2.	Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai Indeks kualitas udara digunakan untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah.	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$ Indeks NO₂ + Indeks SO₂	Data uji kualitas udara

$$I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$$

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB.LUWU TIMUR
TAHUN 2024

		eks Kualitas Udara pada umumnya dihitung berdasarkan unsur pencemar utama yaitu : Nitrogen Dioksida (NO₂), Parameter NO₂. Pengukuran Kualitas Udara ambien di Kabupaten/Kota pada umumnya dilakukan di 4 lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi dan perkantoran dengan metode manual passive sampler dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan.	$\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata - rata NO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$ $\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata - rata SO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$ Untuk perhitungan IKU Kab/Kot, maka - Rata-rata NO₂ = Rerata hasil pengukuran NO₂ dari 4 lokasi - Rata-rata SO₂ = Rerata hasil pengukuran SO₂ dari 4 lokasi	
3.	Indeks Tutupan Lahan (ITL)	eks Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat ITL adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Indeks Kualitas Tutupan Lahan merupakan Nilai yang menggambarkan Kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari Kondisi Tutupan Lahan dan Tutupan Vegetasi non hutan, dikarenakan di Kabupaten Luwu Timur tidak memiliki ekosistem gambut, maka nilai IKL sama dengan nilai IKTL.	$\text{IKTL} = 100 - ((84.3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54.3})$ di mana IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TL = Tutupan Lahan TL = dihitung dengan rumus : $TL = \frac{LTL}{LW}$ Dimana, LTL = Luas Tutupan Lahan LW = Luas Wilayah kabupaten/Kota atau Provinsi $TL = \frac{(Lh) + ((Lbh + Lbapl + Lrth) \times 0.6) + (Larh \times 0.6)}{LW}$ Keterangan TL = Tutupan Lahan Lh = Luas Tutupan Lahan Lb = Luas belukar di Kawasan Hutan Lbapl = Luas belukar di APL Lrth = Luas RTH Larh = Luar Areal Rehabilitasi Hutan LW = Luas Wilayah (kab/kota atau Provinsi) TL = (Luas tutupan hutan) + (belukar kawasan hutan + belukar di APL + luas RTH)x 0.6) + Luas aluas Wilayah kab./kota atau Provinsi	Data tutupan lahan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Kualitas air	24,93 Point	Penetapan nilai target tahun 2024 diambil dari nilai realisasi tahun 2023. Nilai indeks kualitas Air (IKA) di tahun 2023 adalah 24,92 atau kurang dari nilai target yang ditetapkan di Renstra Tahun 2024, sehingga dalam penetapan target pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 mengacu/menyesuaikan dengan capaian nilai IKA pada tahun 2023.
Indeks Kualitas udara	38,87 Point	Berdasarkan hasil indeks kualitas Udara (IKU) di tahun 2023, mengalami peningkatan dari nilai target yang ditetapkan pada tahun 2023 dan juga melebihi dari nilai target yang ditetapkan di Renstra Tahun 2024. Nilai IKU juga sudah sangat baik sehingga dalam penetapan target pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 nilainya dipertahankan.
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	16,32 Point	Penetapan nilai target tahun 2024 diambil dari nilai realisasi tahun 2023 Nilai indeks tutupan lahan (ITL) di tahun 2023 adalah 16,31 atau kurang dari nilai target yang ditetapkan di Renstra Tahun 2024, sehingga dalam penetapan target pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 mengacu/menyesuaikan dengan capaian nilai ITL pada tahun 2023.

Penjelasan Kinerja 2

B. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Insptansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	umber data
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	tem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel dan berorientasi pelayanan. Nilai SAKIP juga menggambarkan kualitas pencapaian kinerja penyelenggaraan perangkat daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP OPD oleh inspektorat	Lap hasil evaluasi sakip inspektorat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,60	Nilai Akip di tahun 2023 adalah 79,50, dimana mengalami peningkatan dari nilai target yang ditetapkan pada tahun 2023 dan juga melebihi dari nilai target yang ditetapkan di Renstra Tahun 2024. sehingga dalam penetapan target pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 nilainya mengacu/menyesuaikan dengan capaian nilai Akip tahun 2023.

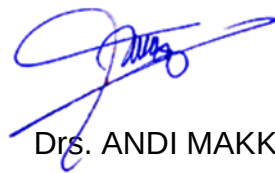
Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua
BUPATI LUWU TIMUR

Pihak Pertama
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KAB. LUWU TIMUR



Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si



Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur melaksanakan kewajiban dengan menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 digunakan untuk mengetahui keberhasilannya dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 merupakan pengukuran evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur.

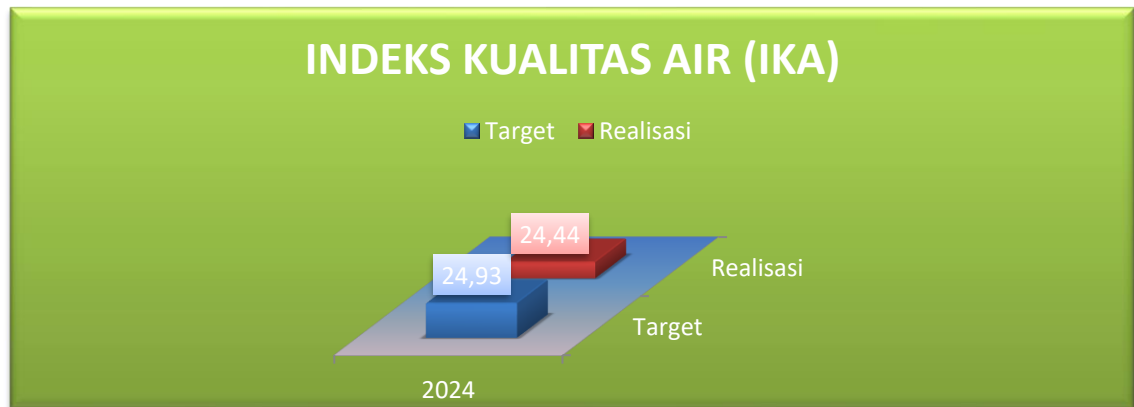
Adapun capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja

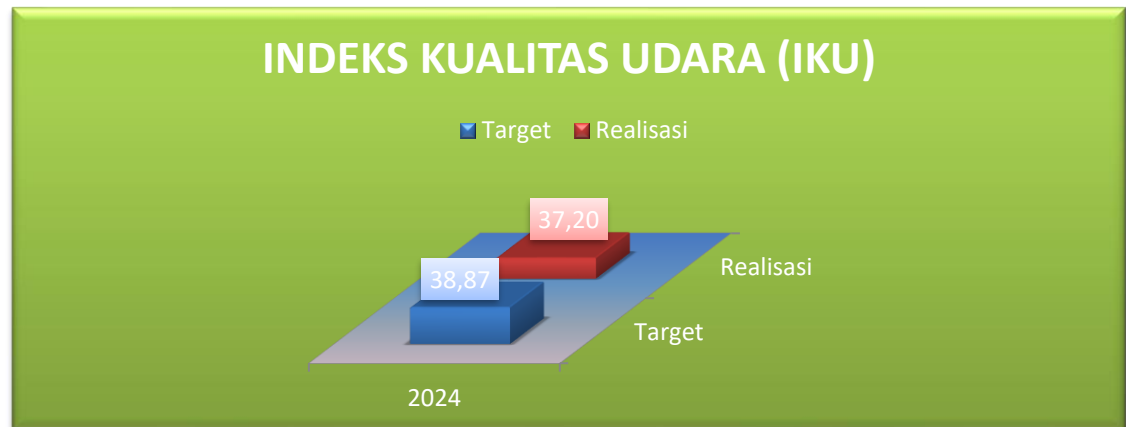
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	24,93	24,44	98,03%
		Indeks Kualitas Udara	38,87	37,20	95,70%
		Indeks Tutupan Lahan	16,32	16,29	99,82%
2	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP	79,60	81,20	102.01%

SASARAN STRATEGIS 1

“Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan”



Grafik. 3. 1
Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air Tahun 2024



Grafik. 3. 2
Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara Tahun 2024



Grafik. 3.3
Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lahan Tahun 2024

Sasaran 2 (Sasaran Pendukung)

Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah



Grafik. 3.4

Capaian Kinerja Sasaran Penunjang Tahun 2024

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

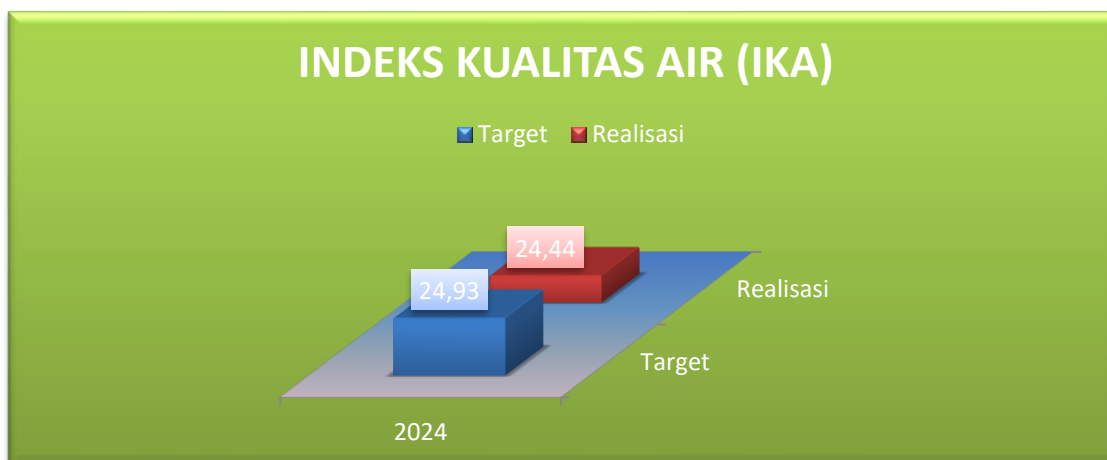
Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

1. INDIKATOR INDEKS KUALITAS AIR

1.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Tabel. 3.2
Target dan Realisasi

INDIKATOR KINERJA SASARAN	Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Air	24.93	24.44	98.03%



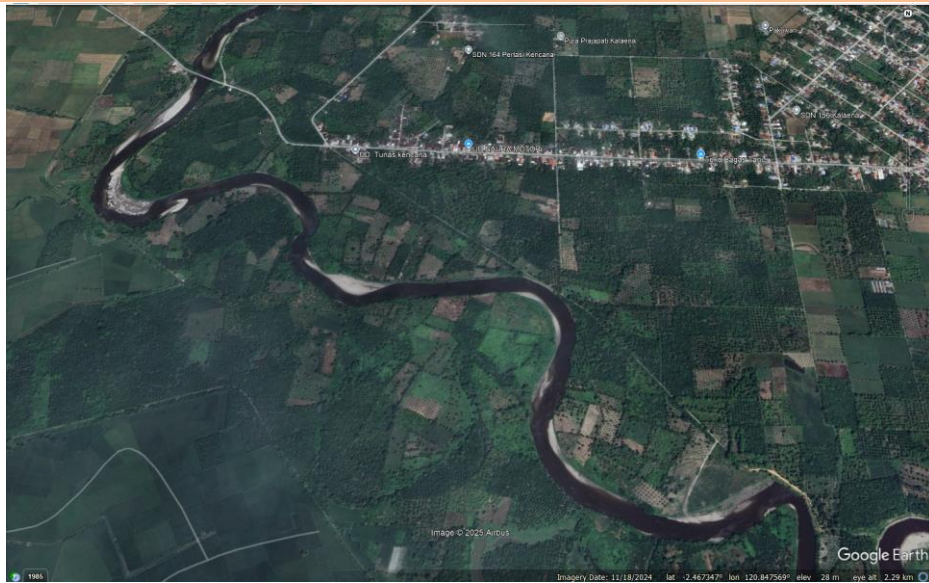
Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan data pemantauan kualitas air pada 7 sungai dan 2 danau. Nilai indeks kualitas air (IKA) didapatkan dari hasil pemeriksaan kualitas air pada semester 1 dan semester 2 kemudian

dilakukan perhitungan IKA sesuai rumus yang telah ditetapkan. Perhitungan IKA pada tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pada aturan baru tersebut ditentukan bahwa nilai maksimum IKA adalah **70** (Lampiran 1 Permen KLHK No 27 Tahun 2021).

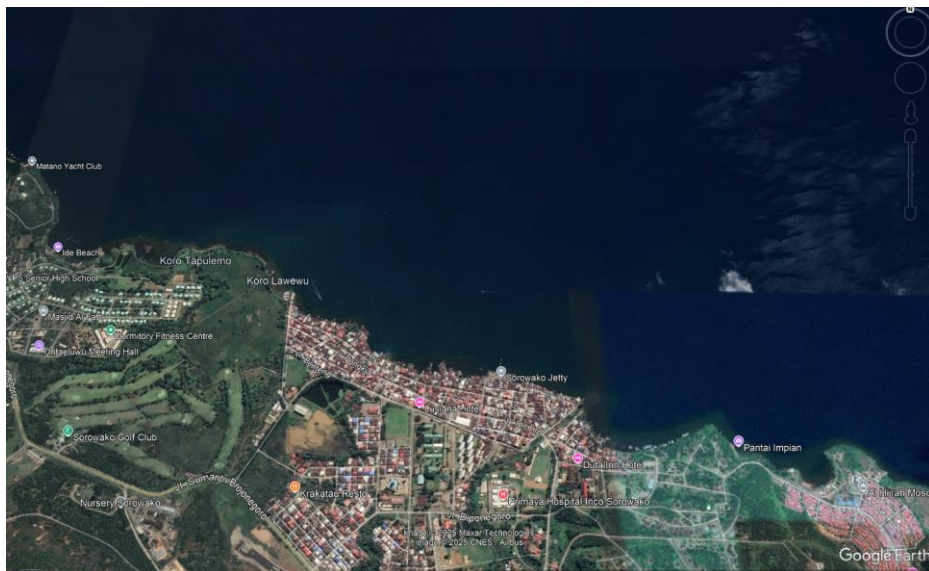
Hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 berdasarkan data pemantauan kualitas air pada 7 sungai dan 2 danau adalah 24,44 sedangkan target IKA pada tahun 2024 sebesar 28.20. Nilai indeks kualitas air (IKA) didapatkan dari hasil pemeriksaan kualitas air pada semester 1 dan semester 2 kemudian dilakukan perhitungan IKA sesuai rumus yang telah ditetapkan. Perhitungan IKA pada tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pada aturan baru tersebut ditentukan bahwa nilai maksimum IKA adalah **70** (Lampiran 1 Permen KLHK No 27 Tahun 2021).

Nilai IKA yang diperoleh belum memenuhi target yang sudah ditentukan hal tersebut dapat disebabkan karena menurunnya kualitas air sungai dan danau. Penurunan kualitas air tersebut karena beberapa faktor seperti limbah dari rumah tangga, limbah industri, sampah, penggundulan hutan dan penggunaan bahan kimia seperti pestisida dan insektisida. Contoh dari penurunan kualitas air dapat dilihat pada gambar dibawah.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2024



(Gambar 1. Sungai Kalaena)



(Gambar 2. Danau Matano)

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa sudah terjadi pembukaan lahan di sekitar sempadan sungai dan sempadan danau yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan

Tabel. 3.3

Tabel bobot Indeks Pencemaran

No	Mutu Air	Bobot Nilai Indeks Pencemar	No	Kategori IKA	Angka Rentang
1	Memenuhi (Baik)	70	1	Baik	70
2	Cemar Ringan	50	2	Sedang	$50 \leq X \leq 70$
3	Cemar Sedang	30	3	Kurang	$25 \leq X \leq 50$
4	Cemar Berat	10	4	Sangat Kurang	$0 \leq X \leq 25$

1.2 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Tabel. 3.4

Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Air	27,5	25,01	90,95%	28	24,92	89,00%	24,93	24,44	98,03

Berdasarkan tabel di atas perhitungan IKA Kabupaten Luwu Timur berdasarkan data pemantauan kualitas air pada 7 sungai dan 2 danau maka dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022, 2023, dan 2024. Nilai IKA tahun 2024 adalah 24,44, Tahun 2023 adalah 24,92 dan tahun 2022 adalah 25,01. Nilai IKA yang diperoleh belum memenuhi target yang sudah ditentukan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan rumus, bobot pengali setiap indeks dan perubahan jumlah parameter yang dipersyaratkan. Perhitungan IKA pada tahun 2024, 2023 dan tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pada aturan baru tersebut ditentukan bahwa nilai maksimum IKA adalah **70** (Lampiran 1

Permen KLHK No 27 Tahun 2021).

1.3 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS OPD

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada tahun 2024 dengan target jangka menengah pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.5

Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2024 terhadap Target Jangka Menengah(2021-2026)

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023	Tahun 2024	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2024	Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2024 terhadap target akhir Renstra
Indeks Kualitas Air	24,92	24,44	24,68	28,5	86,59

Berdasarkan tabel di atas, dapat terbaca perbandingan capaian kinerja tahun 2024 terhadap target akhir jangka menengah, Persentase capaian 2024 terhadap target akhir renstra adalah 86,59%.

1.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

Tabel. 3.6

Perbandingan Target dan Capaian Nasional dengan Target dan Capaian Kabupaten/Kota

Indikator Sasaran	Nasional		Kabupaten/Kota	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,74	73,07	80,12	77,93

1.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian indikator Indeks Kualitas Air (IKA) terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu:

- Nilai IKA Kabupaten Luwu Timur yang berubah secara signifikan. Perhitungan IKA pada tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Pada aturan baru tersebut ditentukan bahwa nilai maksimum IKA adalah 70 (Lampiran 1 Permen KLHK No 27 Tahun 2021) sedangkan Target nilai IKA yang ada masih mengacu pada target Renstra yang masih menggunakan perhitungan lama.
- Penurunan Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) disebabkan oleh menurunnya kualitas air sungai dan danau karena beberapa faktor seperti Limbah dari rumah tangga, limbah industri, sampah, penggundulan hutan dan penggunaan bahan kimia seperti pestisida dan insektisida.
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan.
- Volume sampah yang terus meningkat dan keterbatasan sarana dan prasarana pengangkut sampah dan keterbatasan petugas kebersihan sehingga tidak mampu untuk mengangkut semua sampah yg dihasilkan per hari, sehingga banyak yang membuang sampah ke badan air ataupun membakar sampah sehingga terjadi pencemaran lingkungan.

❖ Solusi

- Memperkuat sinergi dan kolaborasi Lintas sektor serta bersama-sama dengan bidang Penataan dan Penataan Lingkungan serta bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Pertamanan terkait penanganan dan perbaikan kualitas Lingkungan Hidup.

- Meningkatkan pemahaman dan partisipasi mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar dalam masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai komponen IKLH yakni IKA.
- Pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan baik kepada Lembaga Masyarakat, Dunia Pendidikan dan Dunia Usaha dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Meningkatkan kegiatan-kegiatan terkait penanaman pohon dan penghijauan agar kab/kota dapat menyeimbangkan kondisi ekologis kota diantaranya yaitu meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro.

1.6 ANALISIS ATAS EFISIENASI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

❖ Efisiensi Anggaran

- Terkait perubahan anggaran tahun 2024 telah dilakukan efisiensi anggaran pada beberapa belanja seperti makan minum rapat, belanja jasa tenaga laboratorium.

❖ Efisiensi Sumber Daya

- Dengan keterbatasan sumber daya sarana dan prasarana dan sumber daya manusia dalam penyampaian informasi maupun pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar, maka dapat terfasilitasi dengan adanya papan himbauan yang ditempatkan pada beberapa kecamatan sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi tersebut. Dan penyebaran informasi juga dilakukan melalui media sosial seperti Instagram Dinas Lingkungan Hidup.
- Dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, DLH Kab. Luwu Timur tetap bekerja dengan maksimal dalam pemenuhan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 3.7

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kualitas Air	24,93	24,44	98,03	161.684.100	145.326.532	89,88

**1.7 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Indikator Indeks Kualitas Air terdapat 6 Program, 6 kegiatan dan 11 sub kegiatan. Adapun penjelasan untuk program-program tersebut yaitu:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

Tabel. 3.8

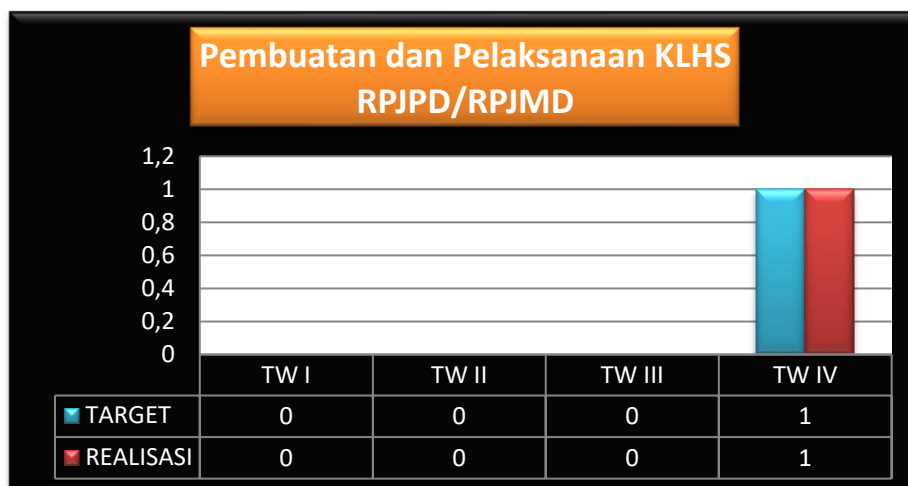
Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota)	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
a	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
b	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

- **Indikator kegiatan** adalah jumlah dokumen yang dihasilkan. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan

a. Sub Kegiatan Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah dokumen KLHS RPJMD yang disusun tepat waktu. Target sub kegiatan adalah 1 dokumen dan realisasi target 1 dokumen atau capaian 100% dimana telah dilaksanakan penyusunan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2045. Capaian kinerja tercapai 100%



Grafik 3.6

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Pada sub kegiatan ini total anggaran Rp. 202.965.000 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 2024 dimana telah terealisasi sebesar 93.73%. Telah dilaksanakan Validasi Dokumen KLHS RPJMD 2025-2029 di DLHK Provinsi Sulawesi Selatan, realisasi kinerja belanja honorarium narasumber, makan minum rapat, sewa hotel, sewa kendaraan narasumber, serta sewa gedung telah selesai. Belanja ATK dan Bahan Komputer telah direalisasikan secara sekaligus menggunakan e-catalogue namun realisasi tidak mencapai 100% karena ada beberapa barang rekanan yang dinego oleh Pejabat Pengada. Belanja bahan cetak juga sudah dilakukan kontrak selama 1 tahun dan telah selesai. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor baru ditambahkan di DPA Perubahan dan semua sudah terealisasi pada Triwulan ini. Adapun perjalanan dinas telah terealisasi sebesar Rp. 35.612.553.

**Dokumentasi Kegiatan Pembuatan dan pelaksanaan KLHS
RPJPD Kab. Luwu Timur Tahun 2025-2045.**



b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah dokumen KLHS RDTR yang disusun tepat waktu. Target sub kegiatan adalah 1 dokumen dan realisasi target 1 dokumen atau capaian 100% dimana telah dilaksanakan penyusunan dokumen KLHS RDTR Kec. Angkona Kab. Luwu Timur. Tujuan penyusunan dokumen KLHS Tata Ruang Kabupaten Luwu Timur adalah dari aspek konservasi sumber daya alam adalah untuk melindungi sumber daya alam yang penting di lingkup kabupaten atau kota, seperti hutan, sungai, dan area pantai, untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekosistem; dan dari aspek perlindungan lingkungan adalah Memastikan bahwa aktivitas pembangunan dan ekonomi di wilayah kabupaten dan kota tidak merusak lingkungan alam, udara, air, serta menjaga kualitas lingkungan hidup.



Grafik 3.7
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Pada sub kegiatan ini total anggaran Rp. 192.071.690 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 2024 dimana telah terealisasi sebesar 90.92 %. Belanja ATK dan Bahan Komputer telah direalisasikan untuk satu tahun secara sekaligus menggunakan e-catalogue namun realisasi tidak mencapai 100% karena ada beberapa barang rekanan yang dinego oleh Pejabat Pengada. Belanja bahan cetak juga sudah dilakukan kontrak selama 1 tahun dan telah terealisasi 100%. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor baru ditambahkan di DPA Perubahan seharusnya Belanja Sewa ini terealisasi 100% namun tidak terbayarkan pada periode akhir pencairan SPJ sehingga hanya terealisasi 50%. Begitupun dengan Belanja Sewa Hotel yang tidak terbayarkan pada pencairan di periode akhir, sehingga juga hanya terealisasi 50%. Adapun perjalanan dinas telah terealisasi sebesar Rp. 36.560.136 untuk perjalanan luar daerah berupa koordinasi dengan instansi terkait

**Dokumentasi Kegiatan Pembuatan dan pelaksanaan KLHS
RPJPD Kab. Luwu Timur Tahun 2025-2045.**



2. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- **Indikator Program adalah Persentase perbaikan kualitas air udara dan tutupan lahan.**
- **Formulasi : “Nilai pencemaran tahun sekarang dibagi nilai pencemaran ditahun sebelumnya dikali seratus”.**

Target kinerja tahun 2024 adalah 1% dan terealisasi 0,97% dengan persentase capaian kinerja sebesar 97%. Capaian tersebut berasal dari penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Nilai IKLH Tahun 2024 adalah 77,93 sedangkan nilai IKLH Tahun 2023 adalah 80,09 sehingga di dapatkan persentase capaian senilai 0,97%. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup didukung oleh 2 kegiatan yaitu:

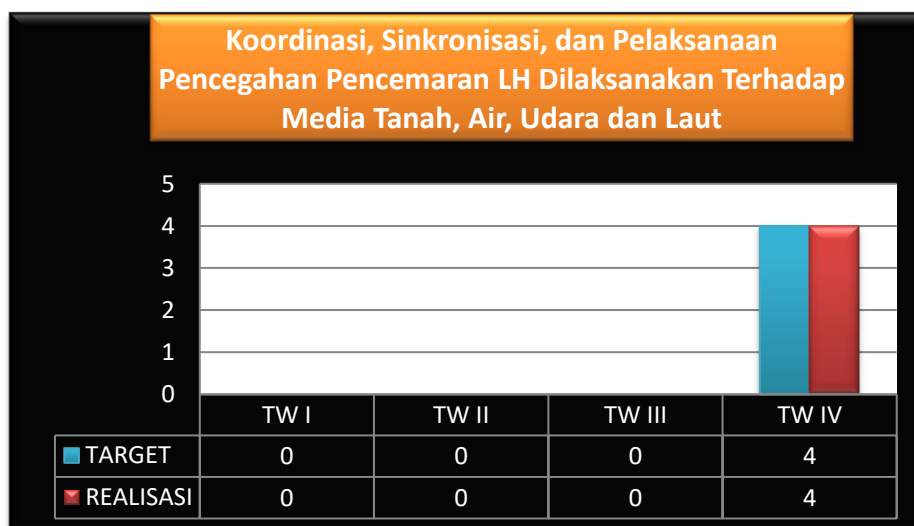
- Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Kegiatan ini diukur dengan indikator Tersedianya dokumen yang dihasilkan. Adapun realisasi kegiatan ini adalah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari 4 dokumen yang telah terealisasi di Triwulan IV.

Tabel. 3.9

Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen lingkungan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
a	Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah dokumen Uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara dan laut	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
b	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut.



Grafik 3.8
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator **jumlah dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air dan Udara**, dimana target pada Triwulan IV sebanyak 4 dokumen dan telah terealisasi sebanyak 4 dokumen uji kualitas lingkungan hidup dengan rincian :

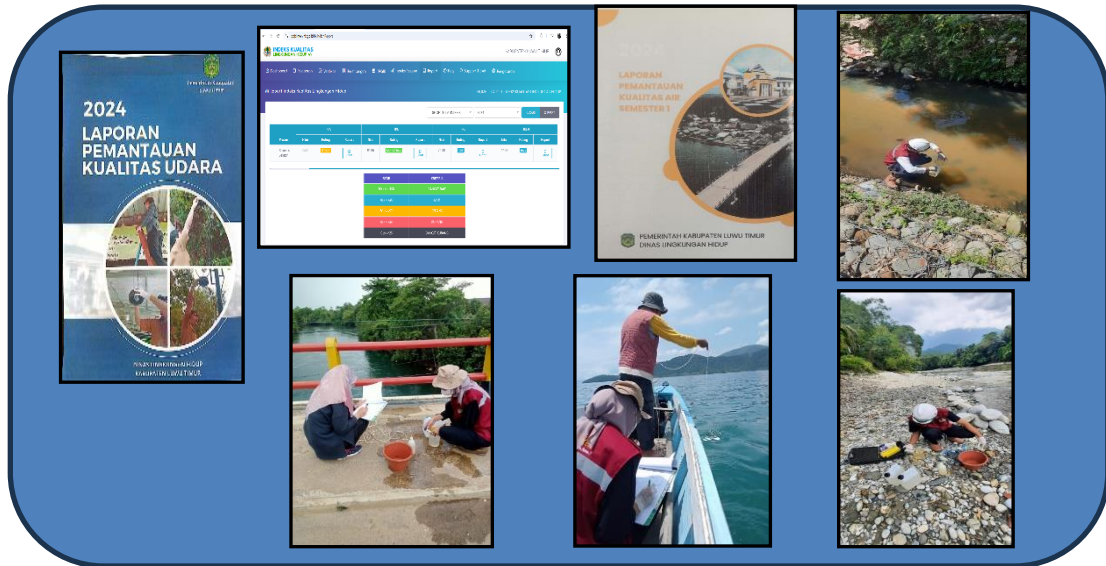
1. Laporan Pemantauan Kualitas Air Semester I Tahun 2024
2. Laporan Pemantauan Kualitas Air Semester II Tahun 2024
3. Laporan Pemantauan Kualitas Udara Tahun 2024
4. Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024

Adapun pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan di Triwulan IV antara lain Pemantauan Kualitas Air Semester II yang dilaksanakan di 23 titik lokasi pengambilan sampel air Sungai dan Danau dan selanjutnya dilakukan pengujian sampel di Laboratorium Lingkungan DLH dan Laboratorium Rekanan dengan hasil berupa Laporan Hasil Uji (LHU).

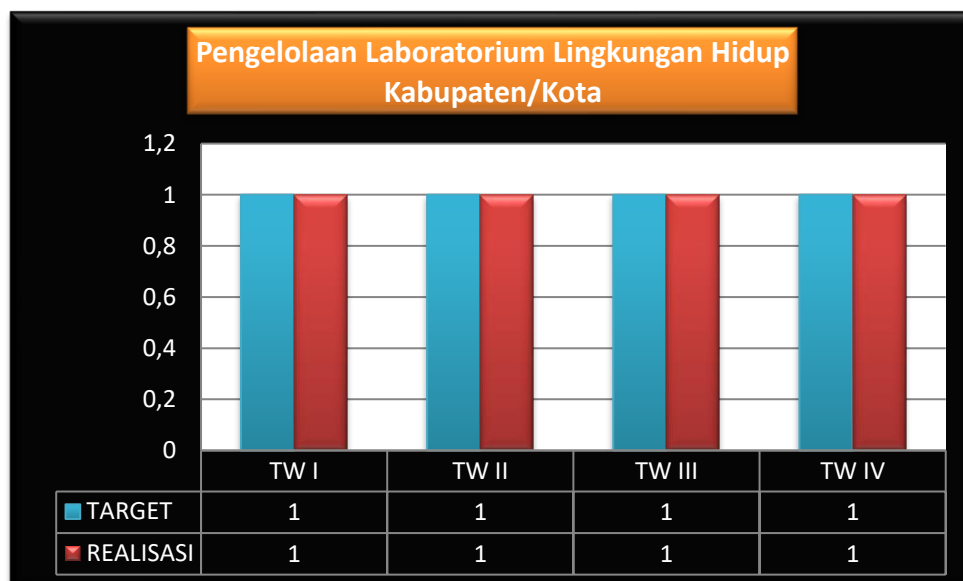
Pada sub kegiatan ini total anggaran perubahan sebesar Rp. 161.684.100 dan telah terealisasi sebesar 80,67% dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja Alat Tulis Kantor terealisasi 88,80% dan sisanya di efisiensi sebesar 11,20%
- ✓ Belanja kertas dan cover terealisasi 92,90% dan sisanya di efisiensi sebesar 7,10%
- ✓ Belanja bahan cetak terealisasi 47,19 % dan sisanya di efisiensi sebesar 52,81%
- ✓ Belanja bahan komputer terealisasi 88,80% dan sisanya di efisiensi sebesar 11,20%
- ✓ Belanja bahan untuk kegiatan kantor lainnya 81,62% dan sisanya di efisiensi sebesar 18,38%
- ✓ Belanja makanan dan minuman rapat 61,09% dan sisanya di efisiensi sebesar 38,91%
- ✓ Belanja jasa tenaga laboratorium telah terealisasi 81,59% dan sisanya di efisiensi sebesar 18,41%
- ✓ Belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang telah terealisasi 50% dan sisanya di efisiensi sebesar 50%
- ✓ Belanja perjalanan dinas biasa terealisasi 96,86%

Dokumentasi Kegiatan Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut.



b. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota



Grafik 3.9
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan, dimana target tahun 2024 adalah 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau capaian 100%. Kegiatan ini memuat antara lain: Pengambilan sampel, pengujian sampel dan Penyampaian Laporan Hasil Uji. UPTD Laboratorium memiliki target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Tahun 2024 sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 62.715.000,- atau persentase capaian sebesar 62.72%.

Adapun pelaksanaan kegiatan sampai Triwulan IV sudah dilaksanakan seluruhnya. Pada sub kegiatan ini total anggaran perubahan sebesar Rp 424.515.525 dan terealisasi sebesar 77,16% dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja Bahan – Bahan Kimia terealisasi hanya 45,76 % dan masih terdapat banyak sisa anggran disebabkan tidak terlaksananya perluasan lingkungan.
- ✓ Belanja ATK terealisasi 93,84 %
- ✓ Belanja kertas dan cover terealisasi 92,63 %
- ✓ Belanja bahan komputer terealisasi 88,80 %.

Untuk belanja diatas sudah dilakukan kontrak untuk satu tahun kedepan secara sekaligus menggunakan e-catalogue namun realisasi tidak mencapai 100 % karena ada beberapa barang rekanan yang dinegosiasi oleh Pejabat Pengada.

- ✓ Belanja makan minum rapat telah terealisasi 85,12%
- ✓ Belanja jasa tenaga laboratorium telah terealisasi 100,00%
- ✓ Belanja Jasa Tenaga Administrasi telah terealisasi 100,00%
- ✓ Belanja Jasa Tenaga Administrasi telah terealisasi 100,00%
- ✓ Belanja Jasa Kalibrasi telah terealisasi 73,38%.
- ✓ Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Udara Lainnya telah terealisasi 77,52%.
- ✓ Belanja Sewa Hotel telah terealisasi 75, 15%
- ✓ Belanja perjalanan dinas terealisasi 90,08% % dan masih dalam proses verifikasi keuangan, namun kegiatannya telah dilaksanakan.

- ✓ Belanja Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain telah terealisasi 83,34%

Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ kota



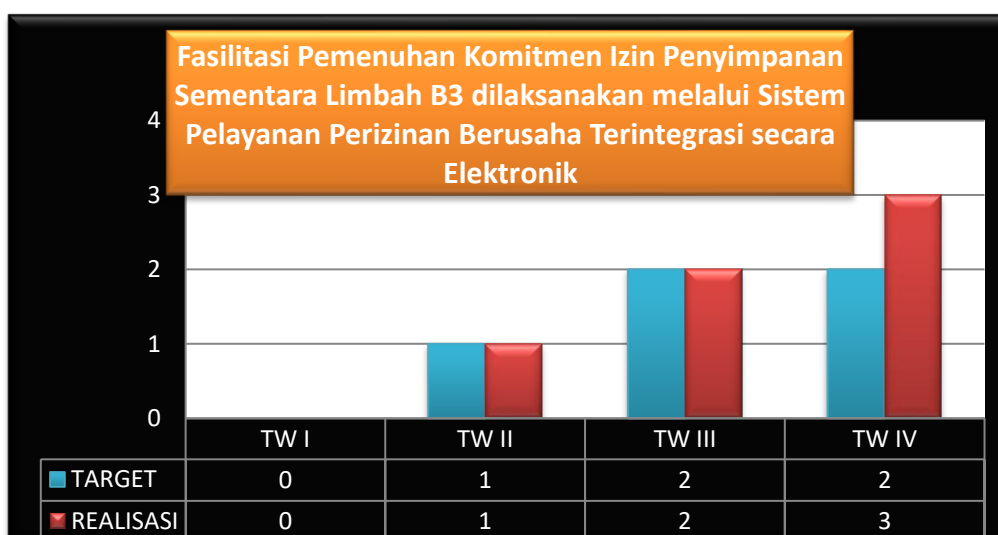
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- Indikator Program adalah Persentase penghasil limbah B3 yang diawasi.
 - Formulasi : *“jumlah pemilik izin LB3 yang diawasi dibagi dengan jumlah pemilik izin LB3 dikali seratus”*.

Target kinerja tahun 2024 adalah 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) oleh 1 kegiatan.

Tabel. 3.10
Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyimpanan sementara Limbah B3	Usaha yang taat pengelolaan limbah B3	45 Usaha	45 Usaha	100 %
a	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 dokumen	6 dokumen	120%

- Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3
Kegiatan ini diukur dengan indikator **Jumlah usaha yang taat pengelolaan Limbah B3**. Adapun realisasi kegiatan ini adalah 45 Usaha dari target 45 usaha/kegiatan
- a. Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.



Grafik 3.10
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator **Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**, dimana realisasi triwulan I adalah 0 dokumen, Realisasi triwulan II adalah 1 dokumen yaitu dokumen Rintek penyimpanan LB3 RSUD Towuti. Untuk triwulan III realisasinya sebanyak 2 dokumen yaitu Dokumen Standar Teknis PT. Honda Sanggar Laut Malili dan PT. Indra Pratama Wasuponda. Sementara realisasi di triwulan IV adalah 3 dokumen yaitu Dokumen Rintek PT.Aneka Jasa Sorowako, Standar Teknis Klinik charisma medika dan dokumen Rintek RSUD I Lagaligo Wotu. Sehingga total realisasi di triwulan IV adalah 6 dokumen dari target 5 dokumen di tahun 2024.

Pada sub kegiatan ini total anggaran sebesar Rp 44.804.010,- dan telah terealisasi sebesar 96,55% dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja Alat Tulis Kantor terealisasi 79,53%
- ✓ Belanja Kertas dan Cover terealisasi 89,45 %.

Untuk belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover di atas sudah dilakukan kontrak untuk satu tahun kedepan secara sekaligus menggunakan e-catalog namun realisasi tidak mencapai 100 % karena ada beberapa barang rekanan yang dinegosiasi oleh Pejabat Pengadaan sehingga terdapat selisih anggaran.

- ✓ Belanja bahan cetak belum terealisasi 94,29%
- ✓ Belanja makan minum rapat terealisasi 99,63%
- ✓ Belanja Jasa Tenaga Administrasi telah terealisasi 100%.
- ✓ Belanja Perjalanan Dinas Biasa telah terealisasi 95,04%

Dokumentasi Kegiatan Fasilitas pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.





4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

- Indikator Program adalah Persentase usaha dan kegiatan yang taat padaregulasi standar lingkungan.
- Formulasi : *“jumlah usaha/kegiatan yang taat dibagi jumlah pemilik izinlingkungan yang dibina dan diawasi dikali seratus”*.

Target kinerja tahun 2024 adalah 50% dan terealisasi 70 % dengan persentase capaian kinerja sebesar 140%. Dimana terdapat 21 usaha/kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan terhadap 30 usaha/kegiatan yang dibina/diawasi. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) oleh 1 kegiatan yaitu:

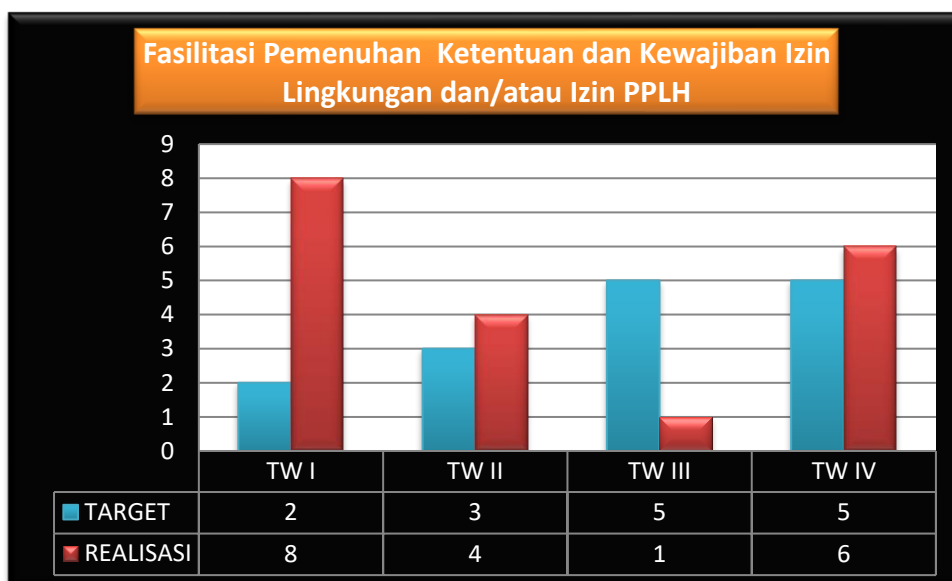
- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/ kota

Tabel. 3.11
Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/ kota	Jumlah usaha atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan	30 Usaha/ Kegiatan	32 Usaha/ Kegiatan	106,67%
	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang difasilitasi	15 Usaha/ Kegiatan	19 Usaha/ Kegiatan	126,67%
	Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi	30 Usaha/ Kegiatan	32 Usaha/ Kegiatan	106,67%

Indikator kegiatan: Jumlah usaha atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan.

- Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH



Grafik 3.11
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

- **Indikator sub kegiatan** adalah Jumlah usaha dan atau kegiatan yang difasilitasi. Pelaksanaan sub kegiatan ini telah terlaksana dan memenuhi target kinerja yaitu 30 usaha/kegiatan dan terealisasi sebanyak 32 usaha/kegiatan 106,67%. Kegiatan ini memuat antara lain, fasilitasi pemenuhan dokumen lingkungan untuk setiap pelaku usaha serta kunjungan lapangan yang dilakukan untuk mengecek kondisi real di lapangan. Pada sub kegiatan ini total anggaran Rp. 55.065.000 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 2024 dimana telah terealisasi sebesar 72.03 %. Belanja ATK, Kertas dan Cover, dan bahan komputer sudah dilakukan kontrak untuk satu tahun secara sekaligus menggunakan e-catalogue namun realisasi tidak mencapai 100% karena ada beberapa barang rekanan yang dinego oleh Pejabat Pengada. Adapun perjalanan dinas telah terealisasi sebesar Rp. 38.657.852

Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH.



- b. Sub Kegiatan Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



Grafik 3.12

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi. Pelaksanaan sub kegiatan ini telah terlaksana dan memenuhi target kinerja untuk pengawasan terhadap 32 usaha/kegiatan yang telah memiliki ijin lingkungan terhadap target 30 usaha/kegiatan.

Pada sub kegiatan ini total anggaran 42,360,000 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 2024 dimana telah terealisasi sebesar 90.06%. Belanja Bahan Kertas dan Bahan Komputer sudah dilakukan kontrak untuk satu tahun secara sekaligus menggunakan e-catalogue namun realisasi tidak mencapai 100% karena ada beberapa barang rekanan yang dinego oleh Pejabat Pengada. Belanja makan minum rapat telah terealisasi telah terealisasi sebesar Rp. 1.756.800. Adapun perjalanan dinas telah terealisasi sebesar Rp. 36,071,000.

Dokumentasi Kegiatan Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



5. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Indikator Program adalah Persentase masalah lingkungan yang diselesaikan.

Formulasi : “jumlah aduan lingkungan dibagi jumlah aduan permasalahan pencemaran dan kerusakan LH tingkat kabupaten/kota yang ditindaklanjuti dikali seratus”.

Target kinerja tahun 2024 adalah 50% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian kinerja sebesar 200%. Dimana terdapat 6 jumlah aduan dan diselesaikan sebanyak 6 aduan. Program Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota didukung oleh 1 kegiatan.

- Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota

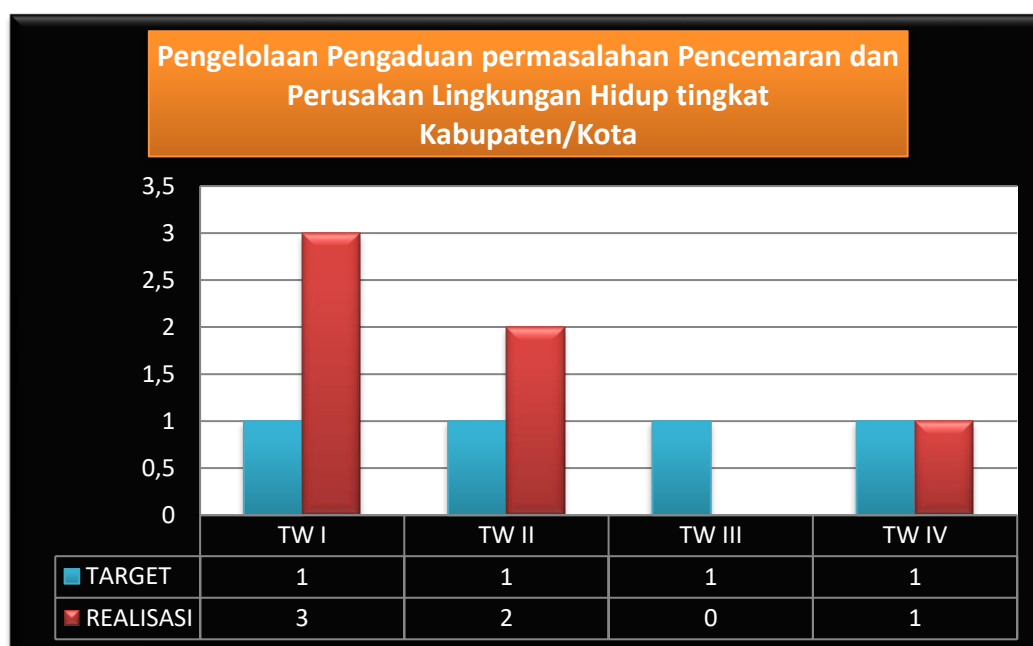
Tabel. 3.12

Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	
					Capaian (%)
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakatdi Bidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase Masalah Lingkungan Yang Terintegrasi	50%	100%	200%
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	4 Pengaduan	6 Pengaduan	150%
	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	2 Perkara	2 Perkara	100%

Indikator kegiatan: Jumlah masalah lingkungan yang terintegrasi. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan.

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, Penyelesaian sengketa dan/ atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan.



Grafik 3.13

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani. Pelaksanaan sub kegiatan ini telah dilaksanakan dan telah melebihi target kinerja Tahun 2024. Terdapat 6 Pengaduan lingkungan yang diselesaikan atas target 4 pengaduan atau capaian senilai 150%. Pada sub kegiatan ini total anggaran Rp. 40.818.000 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 2024 dimana telah terealisasi sebesar 81.20%. Belanja ATK sudah dilakukan kontrak untuk satu tahun secara sekaligus menggunakan e-catalogue namun realisasi tidak mencapai 100% karena ada beberapa barang rekanan yang dinego oleh Pejabat Pengada. Belanja makan minum rapat telah terealisasi. Belanja Jasa administrasi telah terealisasi semua sebesar Rp 24.000.000. Adapun perjalanan dinas telah terealisasi sebesar Rp. 8.687.000.

Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota



- b. Sub Kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota



Grafik 3.14
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator **jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani**. Pelaksanaan sub kegiatan ini telah dilaksanakan dan telah mencapai target kinerja Tahun 2024. Dimana terdapat 2 perkara yang ditangani atas 2 target yang ditetapkan atau capaian senilai 100%.

Pada sub kegiatan ini total anggaran 16.670.000 dan telah terealisasi sebesar 58.75 %. Belanja ATK sudah dilakukan kontrak untuk satu tahun secara sekaligus menggunakan e-catalogue namun realisasi tidak mencapai 100% karena ada beberapa barang rekanan yang dinego oleh Pejabat Pengada. Belanja makan minum rapat telah teralisasi 99,25%. Belanja pengujian sampel telah terealisasi Rp 3,211,780 dimana perusahaan bekerja sama dengan Laboratorium DLH Kab. Luwu Timur. Adapun perjalanan dinas telah terealisasi sebesar Rp. 5.485.000 .

Dokumentasi Kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota



6. Program Pengelolaan Persampahan

Indikator Program adalah Persentase jumlah sampah yang tertangani.

Formulasi : “jumlah sampah yang tertangani dibagi jumlah timbulan sampah dikali seratus”.

Target kinerja tahun 2024 adalah 74% dan terealisasi 71.28% dengan persentase capaian kinerja sebesar 96,32%. Dimana jumlah sampah yang tertangani sebanyak 32.108,67 ton terhadap jumlah timbulan sampah sebanyak 45.045,38 ton $\times 100 = 71,28 \%$. Program Pengelolaan Persampahan

didukung oleh 1 kegiatan yaitu:

- Kegiatan Pengelolaan Sampah

Tabel. 3.13

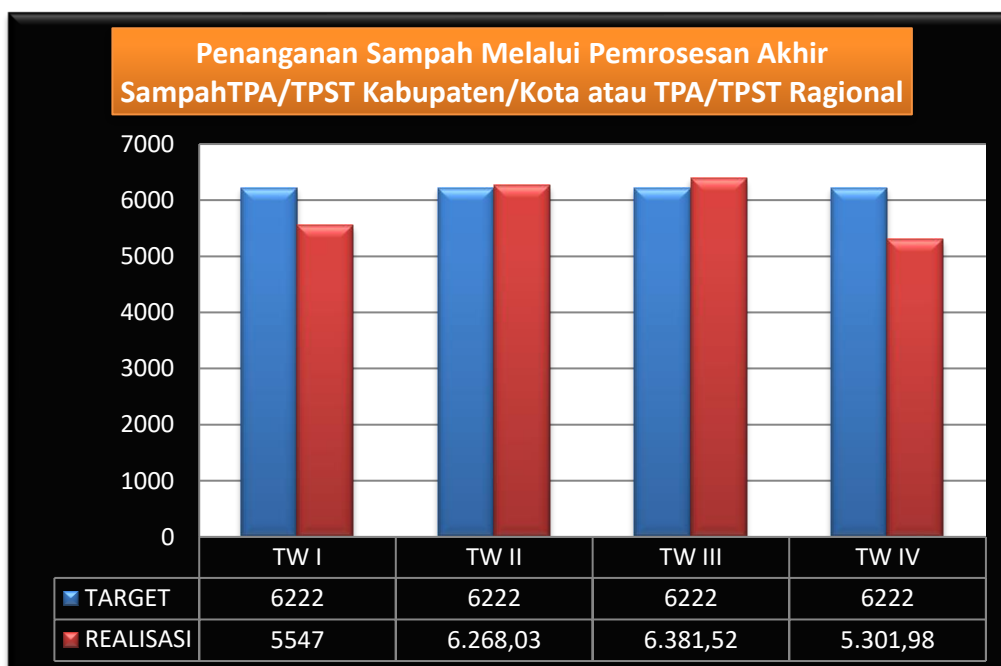
Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	
					Capaian (%)
	Pengelolaan sampah	Persentase sampah yang dikelola	70%	70.56%	100.8%
	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang ditangani	22.575 Ton	22.575 Ton	100%
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang disediakan	12 jenis	12 jenis	100%
	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah bank sampah yang dibina	127 Bank sampah	76 Bank sampah	60%

Kegiatan Pengelolaan Sampah

Indikator kegiatan: Persentase sampah yang dikelola. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 3 sub kegiatan.

- Sub Kegiatan Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota.



Grafik 3.15
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator **Jumlah sampah yang ditangani**, dimana target tahun 2024 sebanyak 24.888 ton dan telah terealisasi 23.495,55 ton. Sub kegiatan ini memuat antara lain Pengangkutan sampah di 7 Kecamatan yakni: Kecamatan Malili, Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Nuha dan Kecamatan Towuti. Untuk wilayah kecamatan Malili dilakukan pengangkutan sampah dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah yang diangkut oleh petugas kebersihan dengan menggunakan mobil pengangkut sampah dan motor roda 3, untuk kemudian di buang di TPA Ussu.

Pada sub kegiatan ini total anggaran 16.670.000 dan telah terealisasi sebesar 58.75 %. terdapat sisa anggaran pada belanja tenaga kebersihan karen terdapat beberapa tenaga kebersihan yang berhenti bekerja dan belum menemukan personil untuk mengisi kekosongan tenaga. terdapat sisa anggaran juga untuk penyediaan anggaran pemeliharaan alat besar loader, alat angkutan berdarat bermotor penumpang dan alat angkutan darat bermotor tiga roda yang hanya rusak ringan sehingga tidak memerlukan banyak anggaran pemeliharaan.

Dokumentasi Kegiatan Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota.



- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.

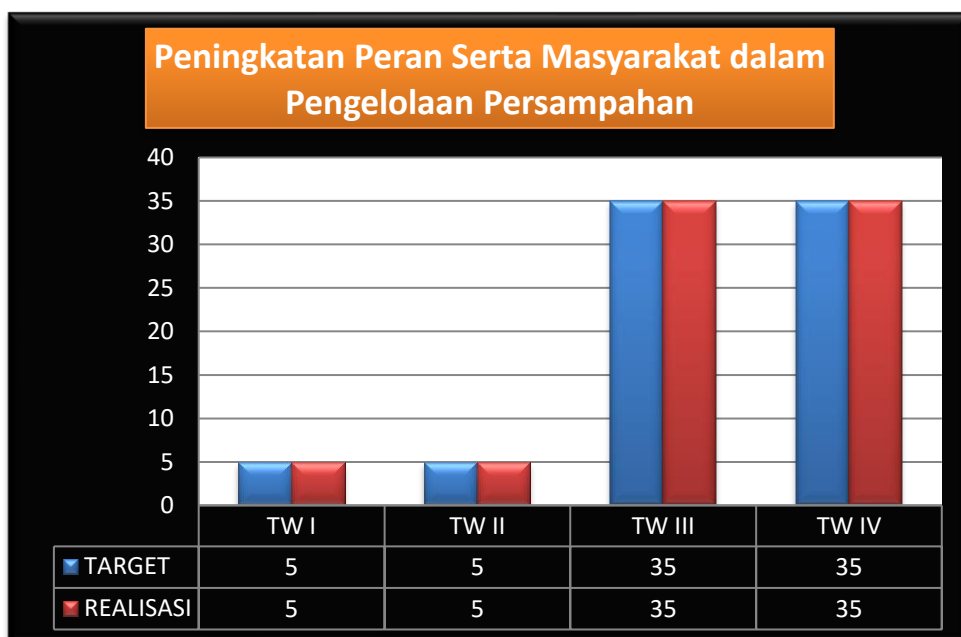


Grafik 3.16

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang disediakan. Pelaksanaan sub kegiatan ini telah terlaksana dan memenuhi target kinerja dimana telah melakukan pengadaan untuk 11 jenis sarana dan prasarana persampahan. Realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini yakni 83,37%. Terdapat belanja modal perkakas bengkel kayu dan belanja modal alat pembersih yang tidak dibelanjakan dikarenakan adanya keterlambatan proses pengadaan karena terjadi perubahan rincian belanja yang akan dibelanjakan.

- c. Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.



Grafik 3.17

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, dimana target pada tahunan adalah 80 kelompok, dimana untuk realisasi ada 80 kelompok Bank Sampah di Desa maupun sekolah yang mendapat pembinaan dalam pengelolaan sampah yang telah dibina %

Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.



1.8 KESIMPULAN

- ❖ Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Indeks Kualitas Air” diperoleh dari rumus perhitungan :

$$= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100$$

$$= \frac{24,44}{24,93} \times 100$$

$$= 98,03$$

- ❖ Alokasi anggaran yang disediakan pada dokumen DPPA – SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun anggaran 2024 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu : Rp. 161.684.100,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 145.326.532,- atau sebesar 89,88%.

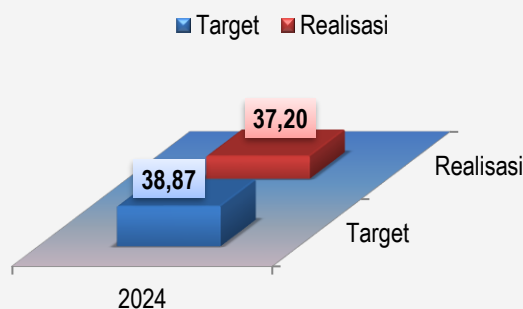
2. INDIKATOR INDEKS KUALITAS UDARA

2.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Tabel. 3.14
Target dan Realisasi

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Udara	38,87	37,20	95,70%

INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)



Grafik. 3.18

Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara Tahun 2024

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2024 dihitung berdasarkan hasil kualitas udara metode passive sampler di 4 (empat) titik pengamatan yang mewakili wilayah Perkantoran, Industri, Pemukiman dan Transportasi. Nilai IKU pada tahun 2024 adalah 37,20 sedangkan target IKU pada tahun 2024 sebesar 38.87. Indeks IKU Tahun 2024 berkurang dari IKU tahun 2023, hal ini dapat disebabkan karena beberapa faktor seperti emisi dari kendaraan bermotor, limbah asap industri, kebakaran

hutan dan pembakaran sampah.

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$$

$$I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$$

$$\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata-rata NO}_2}{\text{Baku Mutu E}_u}$$

$$\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata-rata SO}_2}{\text{Baku Mutu E}_u}$$

Indeks Kualitas Udara (IKU)					
Sangat baik			X	>	90
Baik	70	<	X	≤	90
Cukup	50	≤	X	≤	70
Kurang	30	≤	X	<	50
Sangat Kurang			X	<	30

2.2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Tabel. 3.15

Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Udara	29,55	38,18	129,20	29,60	38,87	131,32	38,87	37,20	95,70

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022, 2023 dengan tahun 2024. Terdapat pengurangan pada nilai IKU tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dan tahun 2022. Nilai IKU pada tahun 2024 adalah 37,20 yang mengindikasikan berkurangnya nilai indeks sekitar 1,67 dari tahun 2023 dan sekitar 0,98 dari tahun 2022.

2.3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS OPD

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada tahun 2024 dengan target jangka menengah pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.16

Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2024 terhadap Target Jangka Menengah (2021-2026)

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023	Tahun 2024	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2024	Target Akhir Renstra	Capaian s/d2024 terhadaptarget akhir Renstra
Indeks KualitasUdara	38,87	37,20	38,03	29,70	128,05%

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja s/d tahun 2024 terhadap target akhir Renstra adalah 128,05. Adapun target akhir renstra tahun 2026 adalah 29,7, penetapan nilai target di renstra masih mengacu pada PermenLHK nomor P.78/MenLHK/SETJEN/ SET. 1/9/2016, tentang penetapan indikator kinerja utama KLHK, sementara Perhitungan IKU pada tahun 2022 dan tahun 2023 dan 2024 masih mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

2.4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

Interaksi antara pertumbuhan populasi, kepadatan dan migrasi penduduk dengan lingkungan menyebabkan terjadinya perubahan kondisi lingkungan. Tingginya interaksi tersebut menyebabkan tekanan terhadap ekosistem sehingga mengubah kondisi lingkungan yang dapat berdampak langsung maupun tidak

langsung terhadap kondisi ekosistem, biota dan masyarakat. Perubahan kondisi lingkungan dicerminkan dengan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Nilai tersebut menggambarkan kualitas lingkungan dan merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Peningkatan nilai pada masing-masing indeks tersebut mencerminkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup pada setiap Provinsi di Indonesia.

Peningkatan nilai IKLH dilakukan dengan berbagai intervensi, upaya pengurangan dan pemulihan serta simulasi baik berupa penerapan peraturan dan kebijakan serta pemanfaatan teknologi. Berdasarkan Permendagri nomor 18 tahun 2020, pencapaian IKLH menjadi salah satu komponen dalam evaluasi kinerja urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. IKLH provinsi berkontribusi pada 50% bobot urusan lingkungan hidup, dan IKLH Kabupaten/Kota berkontribusi pada 33% bobot urusan lingkungan hidup.

Tabel. 3.17

Perbandingan Target dan Capaian Nasional dengan Target dan Capaian Kabupaten/Kota Tahun 2024

Indikator Sasaran	Nasional		Kabupaten/Kota	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,74	73,07	80,12	77,93

2.5. ANALISIS	PENYEBAB	KEBERHASILAN/KEGAGALAN
ATAUPENINGKATAN/PENURUNAN	KINERJA	SERTA ALTERNATIVE
SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN		

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu:

- Keterlambatan pengiriman data hasil pengukuran kualitas udara ambien metode *Passive Sampler* dari Direktorat Pengendalian Pencemaran yang digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Udara (IKU).
- Penurunan Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) disebabkan karena beberapa faktor seperti emisi dari kendaraan bermotor, limbah asap industri, kebakaran hutan dan pembakaran sampah.
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan.

• **Solusi**

- Memperkuat sinergi dan kolaborasi Lintas sektor serta bersama-sama dengan bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan serta bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Pertamanan terkait penanganan dan perbaikan kualitas Lingkungan Hidup.
- Meningkatkan kegiatan-kegiatan terkait penanaman pohon dan penghijauan agar kab/kota dapat menyeimbangkan kondisi ekologis kota diantaranya yaitu meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro.
- Melakukan penambahan ruang lingkup akreditasi untuk parameter kualitas udara di UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, sehingga ada data pembanding atas hasil kualitas udara ambient metode passive sampler dari Direktorat Pengendallian Pencemaran.
- Meningkatkan pengawasan kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan seperti pertambangan, perkebunan, industri dll.
- Meningkatkan pemahaman dan partisipasi mengenai pengelolaan lingkungan yang baik dan benar kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat meningkatkan kapasitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai IKU

2.6. ANALISIS ATAS EFISIENASI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

❖ Efisiensi Anggaran

- Terkait perubahan anggaran tahun 2024 telah dilakukan efisiensi anggaran pada beberapa belanja seperti makan minum rapat, belanja jasa tenaga laboratorium.

❖ Efisiensi Sumber Daya

- Dengan keterbatasan sumber daya sarana dan prasarana dan sumber daya manusia dalam penyampaian informasi maupun pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar, maka dapat terfasilitasi dengan adanya papan himbauan yang ditempatkan pada beberapa kecamatan sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi tersebut. Dan penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui media sosial seperti Instagram Dinas Lingkungan Hidup.
- Dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, DLH Kab. Luwu Timur tetap bekerja dengan maksimal dalam pemenuhan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 3.18
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kualitas Udara	38,87	37,20	95,70	161.684.100	145.326.532	89,88

2.7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Indikator Indeks Kualitas Udara terdapat 5 Program 5 kegiatan dan 7 sub kegiatan. Adapun penjelasan untuk program-program tersebut yaitu:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - **Indikator Program adalah Persentase perbaikan kualitas air udara dan tutupan lahan.**
 - **Formulasi : “Nilai pencemaran tahun sekarang dibagi nilai pencemaran ditahun sebelumnya dikali seratus”.**

Target kinerja tahun 2024 adalah 1% dan terealisasi 0,97% dengan persentase capaian kinerja sebesar 97%. Capaian tersebut berasal dari penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Nilai IKLH Tahun 2024 adalah 77,93 sedangkan nilai IKLH Tahun 2023 adalah 80,09 sehingga di dapatkan persentase capaian senilai 0,97%. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup didukung oleh 2 kegiatan yaitu:

- Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

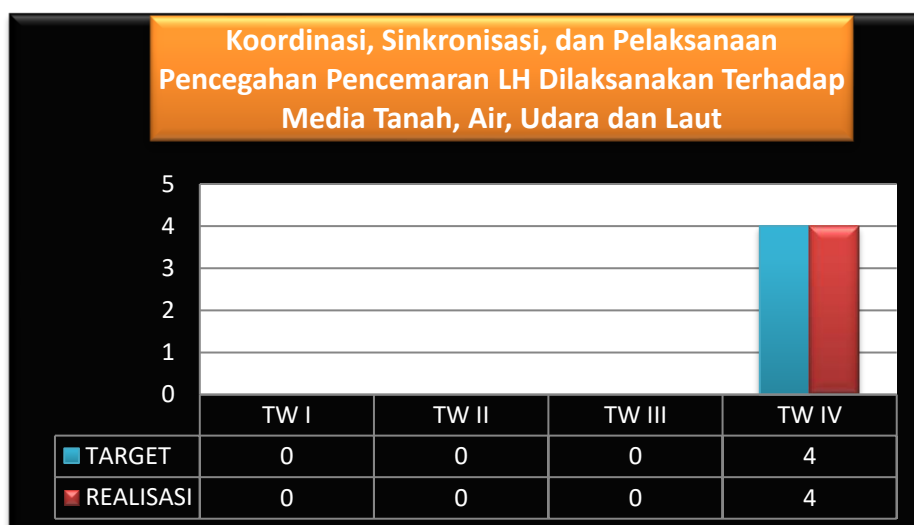
Kegiatan ini diukur dengan indikator Tersedianya dokumen yang dihasilkan. Adapun realisasi kegiatan ini adalah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari 4 dokumen yang telah terealisasi di Triwulan IV.

Tabel. 3.19

**Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Program Pengendalian
Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen lingkungan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
a	Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah dokumen Uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara dan laut	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
b	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut.



Grafik 3.19
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator **jumlah dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air dan Udara**, dimana target pada Triwulan IV sebanyak 4 dokumen dan telah terealisasi sebanyak 4 dokumen uji kualitas lingkungan hidup dengan rincian :

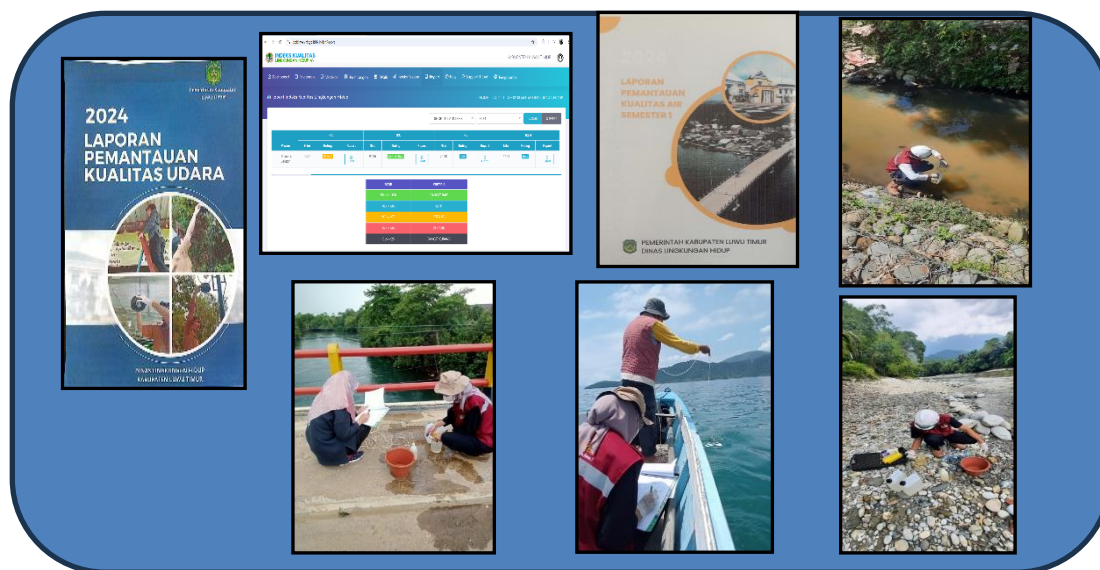
1. Laporan Pemantauan Kualitas Air Semester I Tahun 2024
2. Laporan Pemantauan Kualitas Air Semester II Tahun 2024
3. Laporan Pemantauan Kualitas Udara Tahun 2024
4. Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024

Adapun pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan di Triwulan IV antara lain Pemantauan Kualitas Air Semester II yang dilaksanakan di 23 titik lokasi pengambilan sampel air Sungai dan Danau dan selanjutnya dilakukan pengujian sampel di Laboratorium Lingkungan DLH dan Laboratorium Rekanan dengan hasil berupa Laporan Hasil Uji (LHU).

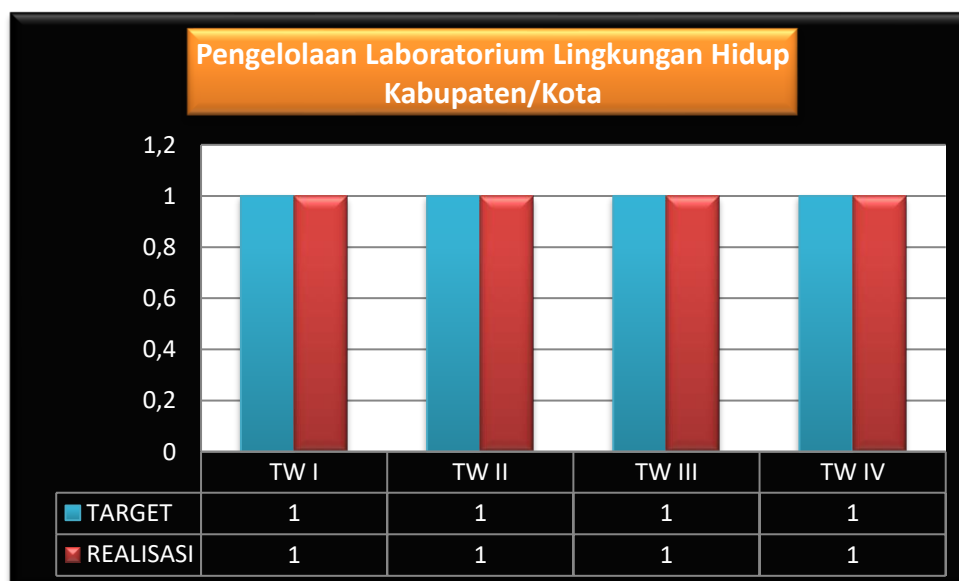
Pada sub kegiatan ini total anggaran perubahan sebesar Rp. 161.684.100 dan telah terealisasi sebesar 80,67% dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja Alat Tulis Kantor terealisasi 88,80% dan sisanya di efisiensi sebesar 11,20%
- ✓ Belanja kertas dan cover terealisasi 92,90% dan sisanya di efisiensi sebesar 7,10%
- ✓ Belanja bahan cetak terealisasi 47,19 % dan sisanya di efisiensi sebesar 52,81%
- ✓ Belanja bahan komputer terealisasi 88,80% dan sisanya di efisiensi sebesar 11,20%
- ✓ Belanja bahan untuk kegiatan kantor lainnya 81,62% dan sisanya di efisiensi sebesar 18,38%
- ✓ Belanja makanan dan minuman rapat 61,09% dan sisanya di efisiensi sebesar 38,91%
- ✓ Belanja jasa tenaga laboratorium telah terealisasi 81,59% dan sisanya di efisiensi sebesar 18,41%
- ✓ Belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang telah terealisasi 50% dan sisanya di efisiensi sebesar 50%
- ✓ Belanja perjalanan dinas biasa terealisasi 96,86%

Dokumentasi Kegiatan Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut.



d. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota



Grafik 3.20
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan, dimana target tahun 2024 adalah 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau capaian 100%. Kegiatan ini memuat antara lain: Pengambilan sampel, pengujian sampel dan Penyampaian Laporan Hasil Uji. UPTD Laboratorium memiliki target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Tahun 2024 sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 62.715.000,- atau persentase capaian sebesar 62.72%.

Adapun pelaksanaan kegiatan sampai Triwulan IV sudah dilaksanakan seluruhnya. Pada sub kegiatan ini total anggaran perubahan sebesar Rp 424.515.525 dan terealisasi sebesar 77,16% dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja Bahan – Bahan Kimia terealisasi hanya 45,76 % dan masih terdapat banyak sisa anggran disebabkan tidak terlaksananya perluasan lingkungan.
- ✓ Belanja ATK terealisasi 93,84 %
- ✓ Belanja kertas dan cover terealisasi 92,63 %
- ✓ Belanja bahan komputer terealisasi 88,80 %.

Untuk belanja diatas sudah dilakukan kontrak untuk satu tahun kedepan secara sekaligus menggunakan e-catalogue namun realisasi tidak mencapai 100 % karena ada beberapa barang rekanan yang dinegosiasi oleh Pejabat Pengada.

- ✓ Belanja makan minum rapat telah terealisasi 85,12%
- ✓ Belanja jasa tenaga laboratorium telah terealisasi 100,00%
- ✓ Belanja Jasa Tenaga Administrasi telah terealisasi 100,00%
- ✓ Belanja Jasa Tenaga Administrasi telah terealisasi 100,00%
- ✓ Belanja Jasa Kalibrasi telah terealisasi 73,38%.
- ✓ Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Udara Lainnya telah terealisasi 77,52%.
- ✓ Belanja Sewa Hotel telah terealisasi 75, 15%
- ✓ Belanja perjalanan dinas terealisasi 90,08% % dan masih dalam proses verifikasi keuangan, namun kegiatannya telah dilaksanakan.

- ✓ Belanja Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain telah terealisasi 83,34%

Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ kota



2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Indikator Program adalah Persentase RTH yang tertangani dengan baik.

Formulasi : “Jumlah RTH yang ditangani di bagi total jumlah RTH dikali seratus”.

Target kinerja tahun 2024 adalah 100% dimana RTH yang ditangani sebanyak 24 RTH dari 24 jumlah RTH yang ada. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati didukung oleh 1 kegiatan yaitu:

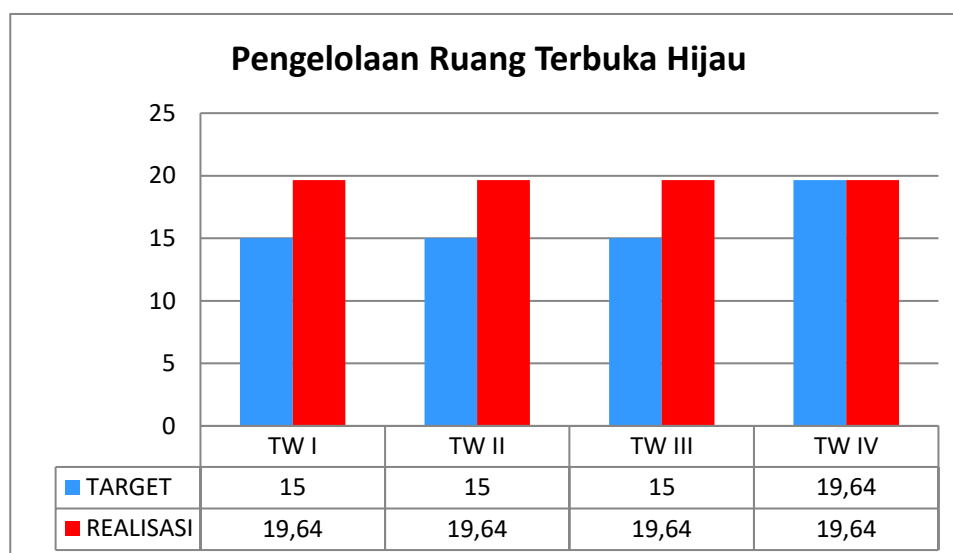
- Kegiatan Pengelolaan Keaneragaman Hayati Kabupaten/ Kota

Tabel. 3.20
Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pengelolaan Keaneragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Jumlah RTH yang dipelihara	15 RTH	24 RTH	100%
A	Pengelolaan ruang terbuka hijau	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	19,64 Ha	19,64 Ha	100%

Indikator kegiatan: Jumlah RTH yang dipelihara. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan.

- Sub Kegiatan Pengelolaan ruang terbuka hijau.



Grafik 2.20
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota, dimana target pada triwulan IV 19,64 Ha dan terealisasi 19,64 Ha atau capaian 100%, Kegiatan ini merupakan kegiatan pemeliharaan rutin yang dillakukan setiap triwulan. Adapun rincian luasan RTH yang dikelola dapat dilihat pada table dibawah ini :

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2024

NO.	JENIS RTH PUBLIK	LUAS (m ²)	LUAS (Ha)
1	RTH Taman Sayang 1	15,280.66	1.53
2	RTH Taman Sayang 2	4,436.26	0.44
3	Bundaran Bumi Batara Guru (BBG)	36,999.93	3.70
4	RTH Andi Nyiwi Park	10,782.64	1.08
5	RTH Lapangan Soekarno-Hatta (Merdeka)	6,454.31	0.65
6	RTH Taman DPRD	14,655.15	1.47
7	RTH Landmark Luwu Timur	10,000.00	1.00
8	RTH Taman Lampu Merah	766.44	0.08
9	RTH Taman CLBK	2,262.25	0.226
10	Baruga Colaborated Center (BCC)	500.00	0.05
11	RTH Tugu Adipura	10.00	0.0010
12	RTH Lapangan Tenis Indoor Rujab Bupati Luwu Timur	8,284.40	0.8284
13	RTH Kantor Bupati Luwu Timur	17,139.51	1.71
14	RTH Rumah Jabatan Ale Luwu	5,805.61	0.58
15	RTH Lapangan Upacara DPRD Luwu Timur	4,187.58	0.42
16	RTH Taman Baca	2,654.59	0.27
17	RTH Median Jalan Soekarno Hatta	6,000.00	0.60
18	RTH I Love Malili	2,726	0.2726
19	RTH Jalur Hijau Andi Hasan	17,993.34	1.7993
20	RTH Jalur Hijau Soekarno Hatta	15,673.55	1.5674
21	RTH Anjungan Sungai Malili	4,131.81	0.41
22	RTH Pujasera Malili	2,303.74	0.23
23	RTH Ex TPI Malili	1,670.00	0.1670
24	Nursery Malili	3,926.20	0.39
	TOTAL	194,643.97	19,64

Pada sub kegiatan ini total anggaran sebesar Rp 177.547.810,- dan telah terealisasi sebesar 91.19% dengan rincian sebagai berikut :

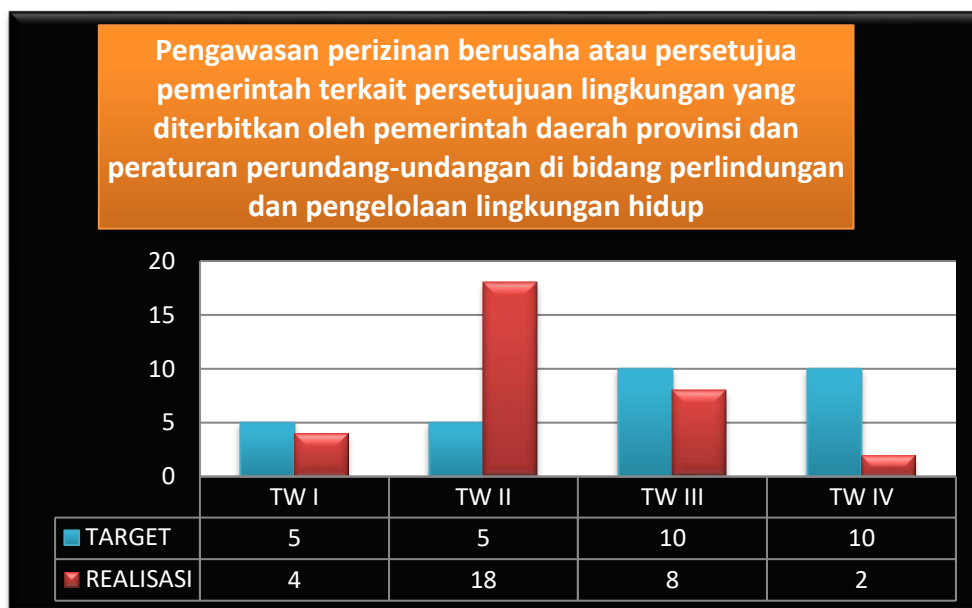
- ✓ Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi digunakan untuk pemeliharaan tugu adipura terealisasi 100%.
- ✓ Belanja Bahan-Bahan Kimia terealisasi 100.00%
- ✓ Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas yang dianggarkan untuk kegiatan Penebangan Pohon terealisasi 0 % . Hal ini dikarenakan masih menunggu SK tim terpadu untuk penebangan pohon
- ✓ Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman terealisasi 100.00%
- ✓ Belanja Bahan-Bahan Lainnya terealisasi 100.00%
- ✓ Untuk belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover di atas sudah dilakukan kontrak untuk satu tahun kedepan secara sekaligus menggunakan e-catalogue namun realisasi tidak mencapai 100 % karena ada beberapa barang rekanan yang dinegosiasi oleh Pejabat Pengadaan sehingga terdapat selisih anggaran.

- ✓ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak terealisasi 88,92% dikarenakan adanya efisiensi anggaran, sehingga beberapa himbauan juga dilakukan melalui jejaring sosial.
 - ✓ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos terealisasi 100%
 - ✓ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik digunakan untuk pembangunan tugu adipura terealisasi 100%
 - ✓ Makanan dan Minuman Rapat terealisasi 28,46% dianggarkan untuk kegiatan makan minum pennebangan pohon, namun tidak direalisasikan karena masih menunggu SK tim terpadu untuk pennebangan pohon
 - ✓ Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum terealisasi 100%
 - ✓ Belanja Jasa Tenaga Administrasi terealisasi 100%
 - ✓ Belanja lembur yang tidak direalisasikan dikarenakan merupakan belanja lembur untuk kegiatan pennebangan pohon
 - ✓ Perdis, kegiatan undangan korrdinasi di akhir tahun sehingga spj memungkinkan melewati batas GU
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa telah terealisasi 89,22% adanya sisa anggaran dikarenakan kegiatan undangan koordinasi di akhir Desember sehingga memungkinkan SPJ akan melewati batas GU

Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan ruang terbuka hijau.



3. Sub Kegiatan Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



Grafik 3.22

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

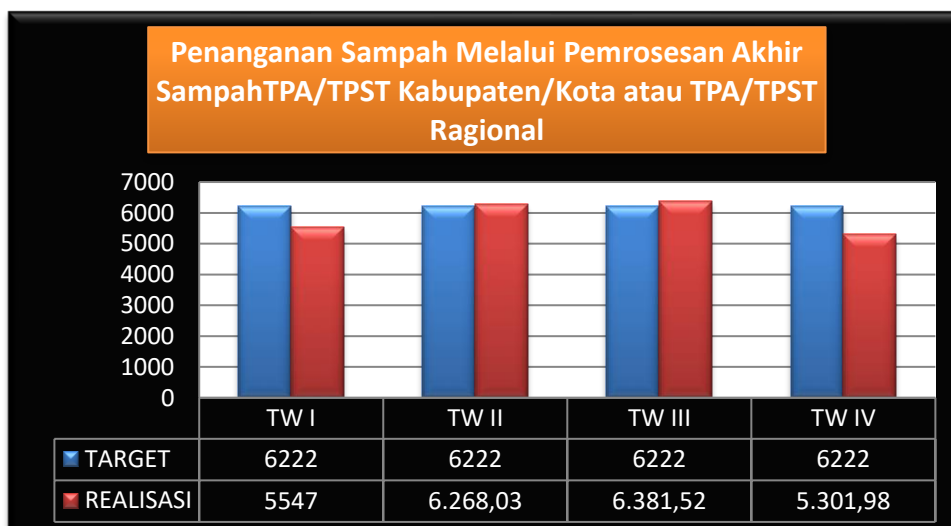
Indikator sub kegiatan adalah Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi. Pelaksanaan sub kegiatan ini telah terlaksana dan memenuhi target kinerja untuk pengawasan terhadap 32 usaha/kegiatan yang telah memiliki ijin lingkungan terhadap target 30 usaha/kegiatan.

Pada sub kegiatan ini total anggaran 42,360,000 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 2024 dimana telah terealisasi sebesar 90.06%. Belanja Bahan Kertas dan Bahan Komputer sudah dilakukan kontrak untuk satu tahun secara sekaligus menggunakan e-catalogue namun realisasi tidak mencapai 100% karena ada beberapa barang rekanan yang dinego oleh Pejabat Pengada. Belanja makan minum rapat telah teralisasi telah terealisasi sebesar Rp. 1.756.800. Adapun perjalanan dinas telah terealisasi sebesar Rp. 36,071,000.

Dokumentasi Kegiatan Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



4. Sub Kegiatan Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota.



Grafik 2.23
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator **Jumlah sampah yang ditangani**, dimana target tahun 2024 sebanyak 24.888 ton dan telah terealisasi 23.495,55 ton. Sub kegiatan ini memuat antara lain Pengangkutan sampah di 7 Kecamatan yakni: Kecamatan Malili, Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Nuha dan Kecamatan Towuti. Untuk wilayah kecamatan Malili dilakukan pengangkutan sampah dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah yang diangkut oleh petugas kebersihan dengan menggunakan mobil pengangkut sampah dan motor roda 3, untuk kemudian di buang di TPA Ussu.

Pada sub kegiatan ini total anggaran 16.670.000 dan telah terealisasi sebesar 58.75 %. terdapat sisa anggaran pada belanja tenaga kebersihan karena terdapat beberapa tenaga kebersihan yang berhenti bekerja dan belum menemukan personil untuk mengisi kekosongan tenaga. terdapat sisa anggaran juga untuk penyediaan anggaran pemeliharaan alat besar loader, alat angkutan berdarat bermotor penumpang dan alat angkutan darat bermotor tiga roda yang hanya rusak ringan sehingga tidak memerlukan banyak anggaran pemeliharaan.

Dokumentasi Kegiatan Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota.



1.8 KESIMPULAN

- ❖ Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Indeks Kualitas Udara” diperoleh dari rumus perhitungan :

$$= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100$$

$$= \frac{37,20}{38,87} \times 100$$

$$= 95,70$$

- ❖ Alokasi anggaran yang disediakan pada dokumen DPPA – SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun anggaran 2024 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu : Rp. 161.684.100,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 145.326.532,- atau sebesar 89,88%.

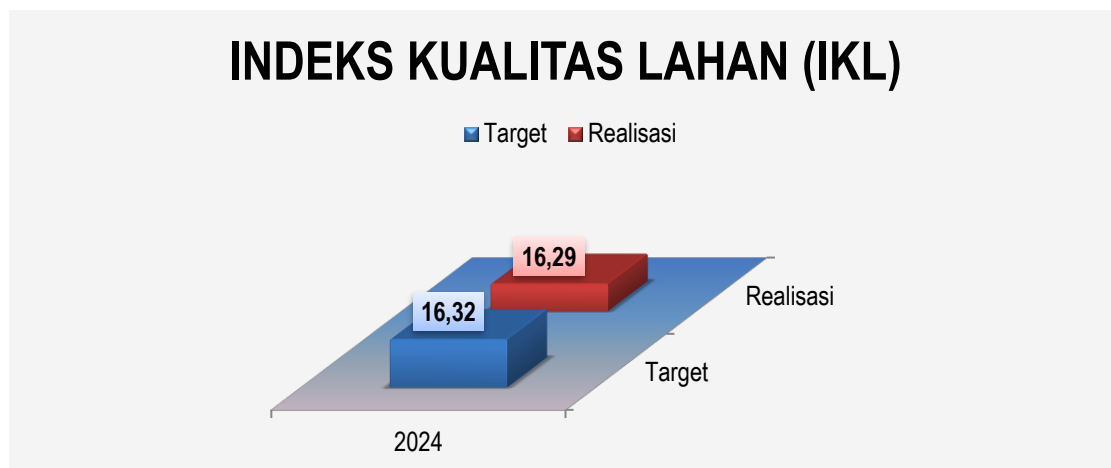
3. INDIKATOR INDEKS TUTUPAN LAHAN

3.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Tabel. 3.21
Target dan Realisasi

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	16,32	16,29	99,82%

Grafik. 2. 24
Capaian Kinerja Indeks Tutupan Lahan Tahun 2024



No	Kategori	Angka Rentang
	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
	Baik	$70 \leq x < 90$
	Sedang	$50 \leq x < 70$
	Kurang	$25 \leq x < 50$
	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Perhitungan Indeks Tutupan Lahan (ITL) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

3.2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

berdasarkan data Tutupan Lahan Kab. Luwu Timur. Penurunan nilai indeks ini disebabkan meningkatnya bukaan lahan yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur selama tahun 2023. Pada tahun 2024 nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) tidak mengalami perubahan hal tersebut dapat disebabkan karena mulai adanya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan.

Tabel. 3.22
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Lahan	30,5	16,52	54,16%	30,5	16,31	53,48%	16,32	16,29	99,82

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022, 2023 dengan tahun 2024. Komponen Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada tahun 2024 tidak mencapai target yang telah ditentukan dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sekitar 0,21 dari nilai IKL 16,52 pada tahun 2022 menjadi 16,31 pada tahun 2023. Penurunan nilai indeks ini disebabkan meningkatnya bukaan lahan yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur selama tahun 2023. Pada tahun 2024 nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) tidak mengalami perubahan hal tersebut dapat disebabkan karena mulai adanya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan.

3.3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS OPD

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada tahun 2024 dengan target jangka menengah pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.23
Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah (2021-2026)

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023	Tahun 2024	rata-rata realisasisampai dengan tahun 2024	Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2024 terhadap target akhir Renstra
Indeks Tutupan Lahan	16,31	16,29	24,45	30,5	80,16

Berdasarkan tabel di atas, dapat terbaca perbandingan capaian kinerja tahun 2024 terhadap target akhir jangka menengah, Persentase capaian 2024 terhadap target akhir renstra adalah 80,16%

3.4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

Interaksi antara pertumbuhan populasi, kepadatan dan migrasi penduduk dengan lingkungan menyebabkan terjadinya perubahan kondisi lingkungan. Tingginya interaksi tersebut menyebabkan tekanan terhadap ekosistem sehingga mengubah kondisi lingkungan yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi ekosistem, biota dan masyarakat. Perubahan kondisi lingkungan dicerminkan dengan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Nilai tersebut menggambarkan kualitas lingkungan dan merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Peningkatan nilai pada masing-masing indeks tersebut mencerminkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup pada setiap Provinsi di Indonesia.

Peningkatan nilai IKLH dilakukan dengan berbagai intervensi, upaya pengurangan dan pemulihan serta simulasi baik berupa penerapan peraturan dan kebijakan serta pemanfaatan teknologi. Berdasarkan Permendagri nomor 18 tahun 2020, pencapaian IKLH menjadi salah satu komponen dalam evaluasi kinerja urusan

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. IKLH provinsi berkontribusi pada 50% bobot urusan lingkungan hidup, dan IKLH Kabupaten/Kota berkontribusi pada 33% bobot urusan lingkungan hidup.

Tabel. 3.24

Perbandingan Target dan Capaian Nasional dengan Target dan Capaian Kabupaten/Kota Tahun 2024

Indikator Sasaran	Nasional		Kabupaten/Kota	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,74	73,07	80,12	77,93

**3.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN
ATAUPENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE
SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian indikator Indeks Tutupan Lahan (ITL) terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu:

- Pemenuhan data pengisian aplikasi Indeks Respon Lingkungan Hidup dengan koordinasi dari semua pihak yang terlibat dalam sesuai SK Bupati Nomor 171/D-10/IV/Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024
- Penurunan Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) disebabkan karena meningkatnya bukaan lahan yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2023
- Kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan

❖ **Solusi**

- Percepatan pengisian data Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
- Meningkatkan pengawasan kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan seperti pertambangan, perkebunan, industri dll.
- Meningkatkan pemahaman dan partisipasi mengenai pengelolaan lingkungan yang baik dan benar kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat meningkatkan kapasitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai IKL.

3.6. ANALISIS ATAS EFISIENASI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

❖ **Efisiensi Anggaran**

- Terkait perubahan anggaran tahun 2024 telah dilakukan efisiensi anggaran pada beberapa belanja seperti jasa pembuatan peta tutupan lahan, belanja jasa tenaga laboratorium.

❖ **Efisiensi Sumber Daya**

- Dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, DLH Kab. Luwu Timur tetap bekerja dengan maksimal dalam pemenuhan nilai Indeks Tutupan Lahan.

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 3.25
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Tutupan Lahan	24,93	24,44	98,03	161.684.100	145.326.532	89,88

**3.7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Indikator Indeks Tutupan Lahan didukung oleh 11 sub kegiatan diantaranya:

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut



Grafik 2.24
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator **jumlah dokumen Uji Kualitas**

Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air dan Udara, dimana target pada Triwulan IV sebanyak 4 dokumen dan telah terealisasi sebanyak 4 dokumen uji kualitas lingkungan hidup dengan rincian :

1. Laporan Pemantauan Kualitas Air Semester I Tahun 2024
2. Laporan Pemantauan Kualitas Air Semester II Tahun 2024
3. Laporan Pemantauan Kualitas Udara Tahun 2024
4. Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024

Adapun pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan di Triwulan IV antara lain Pemantauan Kualitas Air Semester II yang dilaksanakan di 23 titik lokasi pengambilan sampel air Sungai dan Danau dan selanjutnya dilakukan pengujian sampel di Laboratorium Lingkungan DLH dan Laboratorium Rekanan dengan hasil berupa Laporan Hasil Uji (LHU).

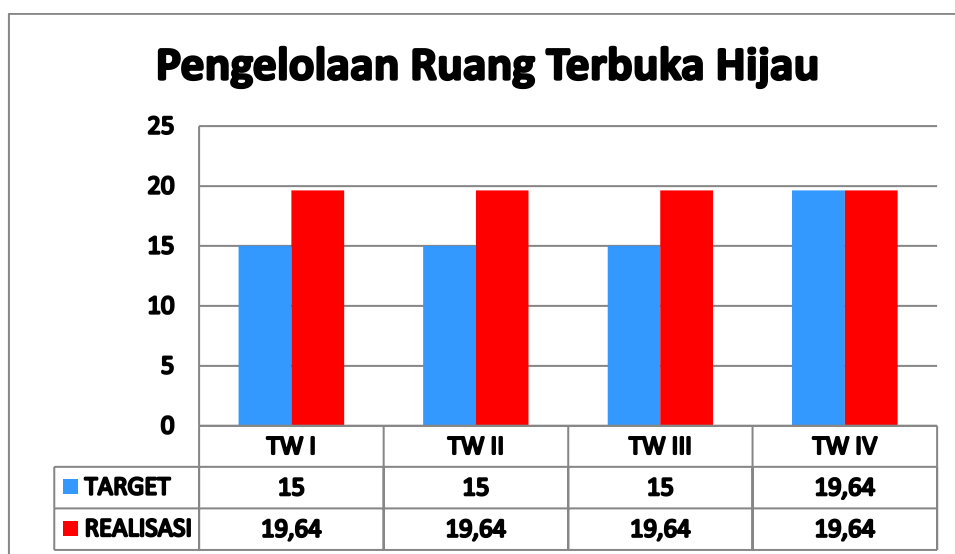
Pada sub kegiatan ini total anggaran perubahan sebesar Rp. 161.684.100 dan telah terealisasi sebesar 80,67% dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja Alat Tulis Kantor terealisasi 88,80% dan sisanya di efisiensi sebesar 11,20%
- ✓ Belanja kertas dan cover terealisasi 92,90% dan sisanya di efisiensi sebesar 7,10%
- ✓ Belanja bahan cetak terealisasi 47,19 % dan sisanya di efisiensi sebesar 52,81%
- ✓ Belanja bahan komputer terealisasi 88,80% dan sisanya di efisiensi sebesar 11,20%
- ✓ Belanja bahan untuk kegiatan kantor lainnya 81,62% dan sisanya di efisiensi sebesar 18,38%
- ✓ Belanja makanan dan minuman rapat 61,09% dan sisanya di efisiensi sebesar 38,91%
- ✓ Belanja jasa tenaga laboratorium telah terealisasi 81,59% dan sisanya di efisiensi sebesar 18,41%
- ✓ Belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang telah terealisasi 50% dan sisanya di efisiensi sebesar 50%
- ✓ Belanja perjalanan dinas biasa terealisasi 96,86%.

Dokumentasi Kegiatan Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut.



2) Sub Kegiatan Pengelolaan ruang terbuka hijau.



Grafik. 3.26

Perbandingan target dan realisasi Tw.I,II,III & IV

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator **Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota**, dimana target pada triwulan IV 19,64 Ha dan

teralisasi 19,64 Ha atau capaian 100%, Kegiatan ini merupakan kegiatan pemeliharaan rutin yang dilakukan setiap triwulan. Adapun rincian luasan RTH yang dikelola

Pada sub kegiatan ini total anggaran sebesar Rp 177.547.810,- dan telah terealisasi sebesar 91.19% dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi digunakan untuk pemeliharaan tugu adipura terealisasi 100%.
- ✓ Belanja Bahan-Bahan Kimia terealisasi 100.00%
- ✓ Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas yang dianggarkan untuk kegiatan Penebangan Pohon terealisasi 0 % . Hal ini dikarenakan masih menunggu SK tim terpadu untuk penebangan pohon
- ✓ Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman terealisasi 100.00%
- ✓ Belanja Bahan-Bahan Lainnya terealisasi 100.00%
- ✓ Untuk belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover di atas sudah dilakukan kontrak untuk satu tahun kedepan secara sekaligus menggunakan e-catalogue namun realisasi tidak mencapai 100 % karena ada beberapa barang rekanan yang dinegosiasi oleh Pejabat Pengadaan sehingga terdapat selisih anggaran.
- ✓ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak terealisasi 88,92% dikarenakan adanya efisiensi anggaran, sehingga beberapa himbauan juga dilakukan melalui jejaring sosial.
- ✓ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos terealisasi 100%
- ✓ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik digunakan untuk pembangunan tugu adipura terealisasi 100%
- ✓ Makanan dan Minuman Rapat terealisasi 28,46% dianggarkan untuk kegiatan makan minum penebangan pohon, namun tidak direalisasikan karena masih menunggu SK tim terpadu untuk penebangan pohon
- ✓ Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum terealisasi 100%
- ✓ Belanja Jasa Tenaga Administrasi terealisasi 100%
- ✓ Belanja lembur yang tidak direalisasikan dikarenakan merupakan belanja lembur untuk kegiatan penebangan pohon

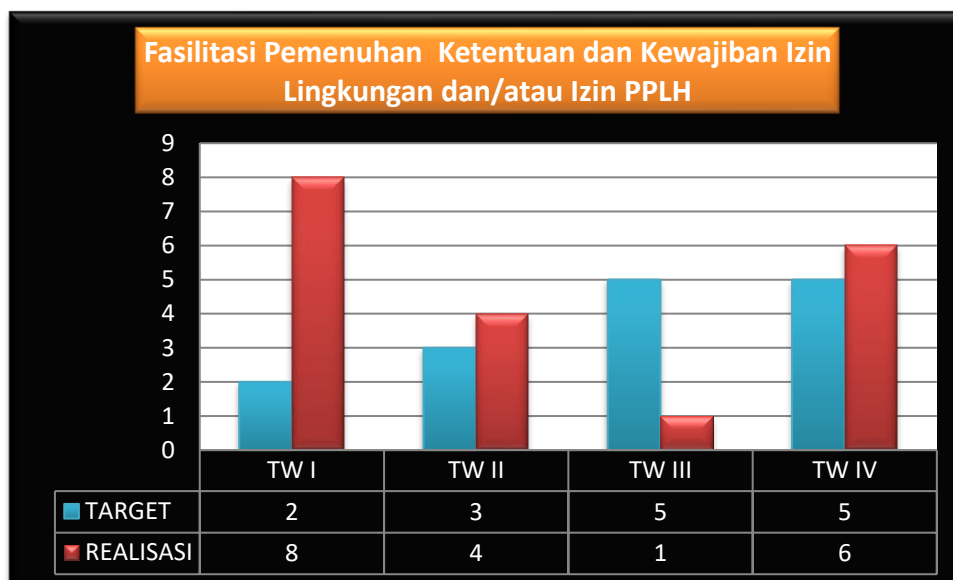
- ✓ Perdis, kegiatan undangan koordinasi di akhir tahun sehingga spj memungkinkan melewati batas GU

Belanja Perjalanan Dinas Biasa telah terealisasi 89,22% adanya sisa anggaran dikarenakan kegiatan undangan koordinasi di akhir Desember sehingga memungkinkan SPJ akan melewati batas GU.

Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ kota



- 3) Sub Kegiatan Fasilitas pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH.



Grafik 2.27

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

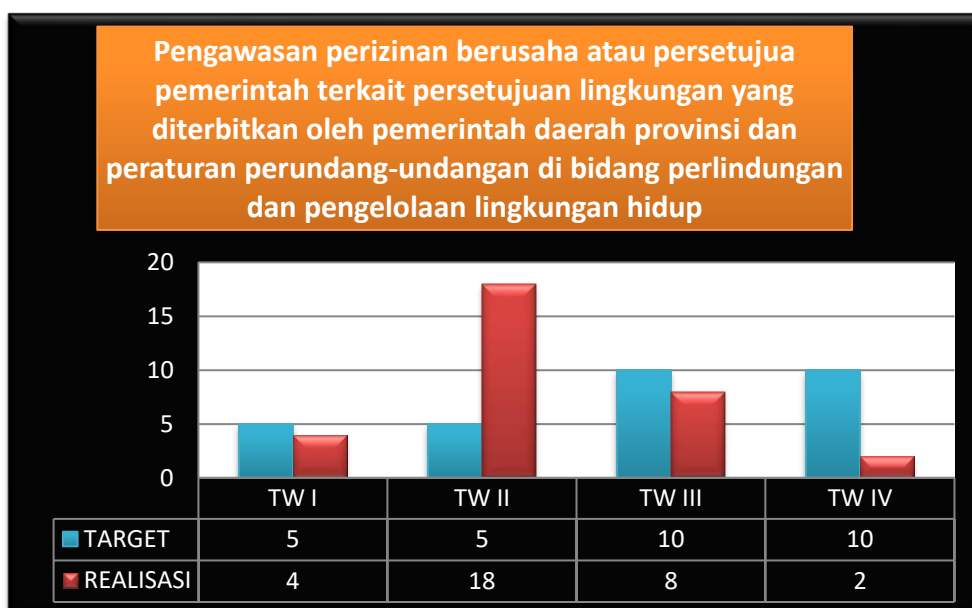
- **Indikator sub kegiatan** adalah Jumlah usaha dan atau kegiatan yang difasilitasi. Pelaksanaan sub kegiatan ini telah terlaksana dan memenuhi target kinerja yaitu 30 usaha/kegiatan dan terealisasi sebanyak 32 usaha/kegiatan 106,67%. Kegiatan ini memuat antara lain, fasilitasi pemenuhan dokumen lingkungan untuk setiap pelaku usaha serta kunjungan lapangan yang dilakukan untuk mengecek kondisi real di lapangan.

Pada sub kegiatan ini total anggaran Rp. 55.065.000 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 2024 dimana telah terealisasi sebesar 72.03 %. Belanja ATK, Kertas dan Cover, dan bahan komputer sudah dilakukan kontrak untuk satu tahun secara sekaligus menggunakan e-catalogue namun realisasi tidak mencapai 100% karena ada beberapa barang rekanan yang dinego oleh Pejabat Pengada. Adapun perjalanan dinas telah terealisasi sebesar Rp. 38.657.852

Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH.



- 4) Sub Kegiatan Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



Grafik 3.28
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi. Pelaksanaan sub kegiatan ini telah terlaksana dan memenuhi target kinerja untuk

pengawasan terhadap 32 usaha/kegiatan yang telah memiliki ijin lingkungan terhadap target 30 usaha/kegiatan.

Pada sub kegiatan ini total anggaran 42,360,000 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 2024 dimana telah terealisasi sebesar 90.06%. Belanja Bahan Kertas dan Bahan Komputer sudah dilakukan kontrak untuk satu tahun secara sekaligus menggunakan e-catalogue namun realisasi tidak mencapai 100% karena ada beberapa barang rekanan yang dinego oleh Pejabat Pengada. Belanja makan minum rapat telah terealisasi sebesar Rp. 1.756.800. Adapun perjalanan dinas telah terealisasi sebesar Rp. 36,071,000.

Dokumentasi Kegiatan Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



- 5) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH



Grafik 3.29
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait PPLH, dimana target pada Triwulan IV sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH. Berdasarkan data sejak tahun 2023 – 2024 telah terdapat beberapa entitas/masyarakat/lembaga adat yang telah dilakukan pendampingan dan pembinaan terkait keberadaan MHA, antara lain:

1. Masyarakat Adat Wija To Cerekang
2. Lembaga Adat Rahampu'u Matano
3. Masyarakat Adat Tana Ongko
4. Masyarakat Adat Mokole Dompelo Tana Luwu
5. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berupa pertemuan Tim Legislasi dan pihak lainnya (OPD terkait dan para camat) mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Bupati (RanPerBup) tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi, Validasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kab. Luwu Timur. Adapun

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2024**

kegiatan lainnya berupa pembinaan dan pendampingan terhadap Mahasiswa peneliti Universitas Hasanuddin terkait penyusunan tugas akhir mengenai Eksistensi Hukum Adat To Padoe Kab. Luwu Timur Terhadap Penguasaan Tanah Ulayat, serta pendampingan terhadap Mahasiswa peneliti Pascasarjana Universitas Andi Djemma terkait penyusunan tugas akhir mengenai Efektivitas Perda Masyarakat Adat Terhadap Eksistensi Lembaga Adat Wotu di Kab. Luwu Timur.

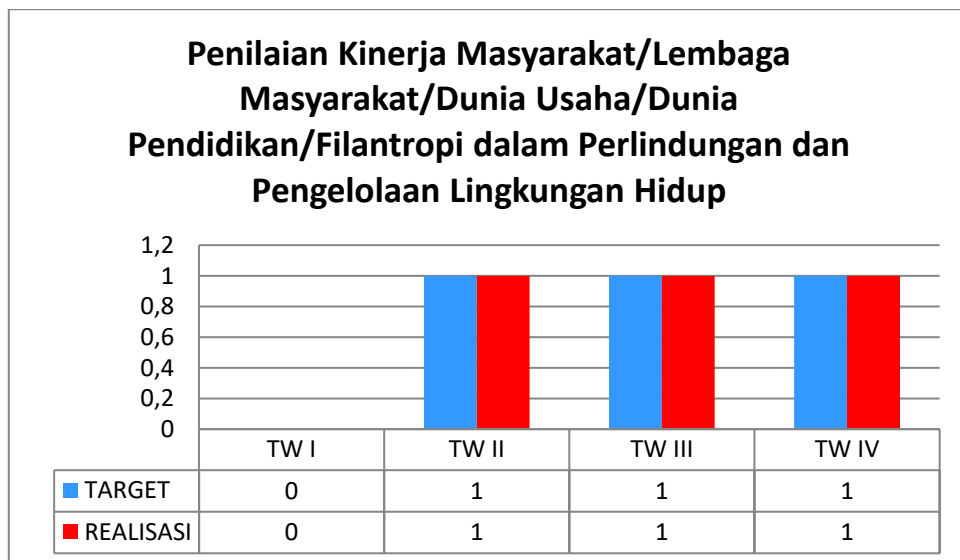
Pada sub kegiatan ini total anggaran perubahan sebesar Rp. 45.289.900 dan telah terealisasi sebesar 86,29% dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja ATK terealisasi 83,25 % dan sisanya di efisiensi sebesar 16,75%
- ✓ Belanja kertas dan cover terealisasi 92,63 % dan di efisiensi sebesar 7,37%
- ✓ Belanja bahan computer terealisasi 88,80 % dan di efisiensi sebesar 11,20%
- ✓ Belanja bahan cetak di efisiensi sebesar 100%
- ✓ Belanja Makanan dan Minuman Rapat di efisiensi sebesar 100%
- ✓ Belanja perjalanan dinas biasa terealisasi 90,45% dan di efisiensi sebesar 9,55%

Dokumentasi Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH



- 6) Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



Grafik 3.30

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi Yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH, dimana target persentase pada Triwulan IV sebanyak 100% dan telah terealisasi 100% penghargaan lingkungan yang terdiri dari:

1. Penghargaan Kalpataru

Pengusulan Pejuang Muda Wija To Cerekang (PM-WTC) untuk kategori penyelamat lingkungan telah mendapatkan penghargaan 'Nominasi Penerima Penghargaan Kalpataru Tahun 2024'.

2. Penghargaan Program Kampung Iklim (ProkLim)

Pengusulan lokasi Program Kampung Iklim pada 11 Kecamatan di Kab. Luwu Timur untuk kategori Utama, Madya dan Pratama telah mendapatkan penghargaan antara lain, Desa Mabonta, Desa Bawalipu, Desa Alam Buana, Desa Mandiri, Desa Argo Mulyo, Desa Panca Karsa, Desa Lamaeto, Desa Pongkeru, Desa Balambano, Desa Baruga dan Desa Sorowako.

Adapun jenis penghargaan lainnya yang di terima oleh Pemerintah Daerah Kab.

Luwu Timur yaitu 'Apresiasi Pembina Program Kampung Iklim Tingkat Kabupaten Tahun 2024'.

3. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri, Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Penghargaan lingkungan yang diterima oleh sekolah (dunia pendidikan) adalah penghargaan berjenjang (Mandiri, Nasional, Provinsi dan kabupaten) dengan penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Terdata 52 sekolah baik di tingkat SD/MI, SMP/MTsN dan MA yang telah mendapatkan penghargaan ini dengan rincian :

- a. Adiwiyata Mandiri sebanyak 2 sekolah
- b. Adiwiyata Nasional sebanyak 5 sekolah/madrasah
- c. Adiwiyata Provinsi sebanyak 8 sekolah/madrasah
- d. Adiwiyata Kabupaten sebanyak 37 sekolah/madrasah

Adapun kegiatan yang terlaksana di Triwulan IV antara lain verifikasi dokumen pemenuhan kriteria GPBLHS pada SIDIA, dan verifikasi lapangan terhadap sekolah yang lolos verifikasi dokumen, sehingga hasil akhir sebanyak 37 sekolah yang berhasil mendapatkan penghargaan Adiwiyata Kabupaten Tahun 2024.

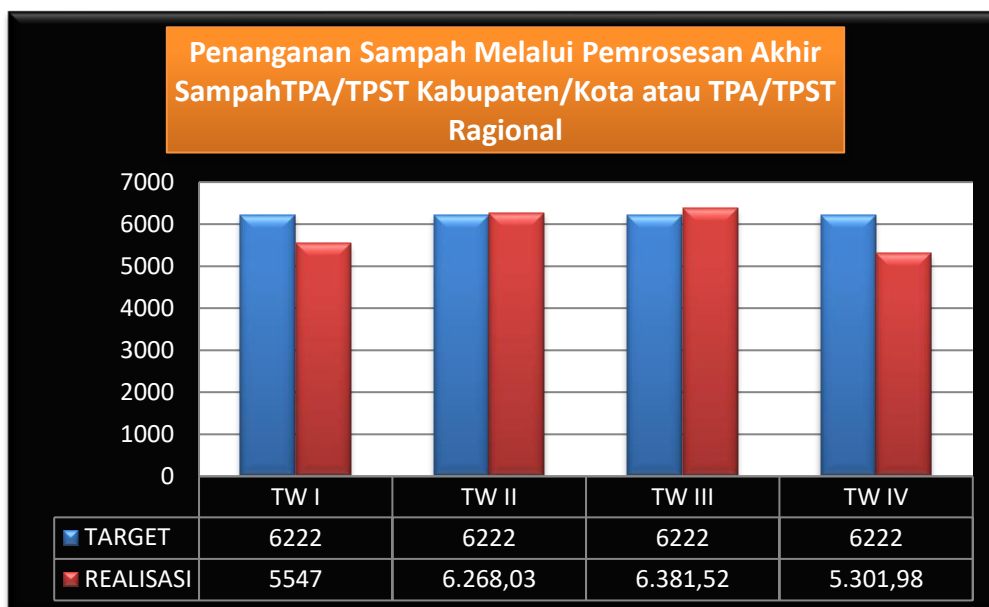
Pada sub kegiatan ini total anggaran perubahan sebesar Rp70 044.950 dan telah terealisasi sebesar 84,73% dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja ATK terealisasi 78,28 % dan di efisiensi sebesar 21,72%
- ✓ Belanja kertas dan cover terealisasi 92,63 % dan di efisiensi sebesar 7,37%. Untuk belanja diatas sudah dilakukan kontrak untuk satu tahun kedepan secara sekaligus menggunakan e-catalogue namun realisasi tidak mencapai 100 % karena ada beberapa barang rekanan yang dinegosiasi oleh Pejabat Pengada.
- ✓ Belanja bahan cetak terealisasi 95,21%
- ✓ Belanja makanan dan minuman di efisiensi sebesar 100%
- ✓ Belanja perjalanan dinas biasa terealisasi 92,72%

Dokumentasi Kegiatan Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



- 7) Sub Kegiatan Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota.



Grafik 3.31
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator **Jumlah sampah yang ditangani**, dimana target tahun 2024 sebanyak 24.888 ton dan telah terealisasi 23.495,55 ton. Sub kegiatan ini memuat antara lain Pengangkutan sampah di 7 Kecamatan yakni: Kecamatan Malili, Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Nuha dan Kecamatan Towuti. Untuk wilayah kecamatan Malili dilakukan pengangkutan sampah dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah yang diangkut oleh petugas kebersihan dengan menggunakan mobil pengangkut sampah dan motor roda 3, untuk kemudian di buang di TPA Ussu.

Pada sub kegiatan ini total anggaran 16.670.000 dan telah terealisasi sebesar 58.75 %. terdapat sisa anggaran pada belanja tenaga kebersihan karena terdapat beberapa tenaga kebersihan yang berhenti bekerja dan belum menemukan personil untuk mengisi kekosongan tenaga. terdapat sisa anggaran juga untuk penyediaan anggaran pemeliharaan alat besar loader, alat angkutan berdarat bermotor penumpang dan alat angkutan darat bermotor tiga roda yang hanya rusak ringan sehingga tidak memerlukan banyak anggaran pemeliharaan.

Dokumentasi Kegiatan Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota.



1.8 KESIMPULAN

- Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Indeks Kualitas Air” diperoleh dari rumus perhitungan :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \\ &= \frac{16,29}{16,32} \times 100 \\ &= 99,81 \end{aligned}$$

Alokasi anggaran yang disediakan pada dokumen DPPA – SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun anggaran 2024 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu : Rp. 161.684.100,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 145.326.532,- atau sebesar 89,88%.

SASARAN STRATEGIS 2 (SASARAN PENDUKUNG)

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sasaran Pendukung “**Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah**” tahun 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.26

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pendukung

Sasaran Pendukung		Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah		
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Capaian
	Target	Realisasi		
Nilai SAKIP	79,60	81,20		102,01%

4. NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

❖ Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

- **Indikator kinerja sasaran penunjang** adalah Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah
- **formulasi indikator** yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah “*Jumlah realisasi kinerja dibagi target kinerja dikali seratus*”.

Target Indikator sasaran penunjang Tahun 2024 adalah 79.60% dan realisasi 81, 20 dengan capaian 102.01%. terjadi kenaikan Nilai SAKIP di tahun 2024.

2. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.27
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran 1	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah								
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP	60,56	68,4	112,95%	60,57	79,5	131,25%	79.60	81.20	102.01

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022, 2023 dengan tahun 2024. Terdapat peningkatan nilai SAKIP setiap tahunnya. Nilai Sakip tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,7 dibandingkan dengan tahun 2023 dan kenaikan sebesar 12,8 dari tahun 2022.

3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INIDENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Tabel.3.28
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 - 2026)

Sasaran 1	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah			Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2024 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023	Tahun 2024	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2024		
Nilai SAKIP	79.5	81.20	80.35	70	114.79

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dicapai kinerja tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023, dan rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2024 sudah melebihi dari target akhir renstra 2026.

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a. Keterlambatan proses administrasi keuangan yang mempengaruhi realisasi keuangan
- b. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- a. Percepatan proses administrasi keuangan
- b. Melakukan koordinasi pejabat pengadaan dan PPK terkait percepatan proses pengadaan barang dan jasa.

6. ANALISIS ATAS EFISIENASI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran pendukung DLH, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- a. Efisiensi anggaran pada belanja modal pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan memaksimalkan peralatan yang ada.
- b. Efisiensi biaya internet kantor yang difasilitasi oleh Dinas Kominfo

❖ Efisiensi Sumber Daya

- a. Terdapat jabatan administrasi yang masih kosong pada lingkup

sekretariat, dan untuk mengakomodir semua pelaksanaan tugas, dilakukan rangkap jabatan sebagai pelaksanatugas an memaksimalkan upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN.

- b. Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN.

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 3.29
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP	79.60	81.20	102.01			
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100	98,24	98,24%	5.050.975.350	4.479.733.200	88.69 %

Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung

Tabel. 3.30
Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota)	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
a	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun t (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
b	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS RDTR yang disusun (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen lingkungan yang dihasilkan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
a	Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah dokumen Uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara dan laut	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
b	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Luas lahan yang direhabilitasi	37 Ha	37 Ha	100%

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2024

a	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas Area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	37 Ha	37 Ha	100%
4	Pengelolaan Keaneragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Jumlah RTH yang tertangani dengan baik	15 RTH	24 RTH	160%
a	Pengelolaan ruang terbuka hijau	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	19,64 Ha	19,64 Ha	100%
5	Penyimpanan sementara Limbah B3	Usaha yang taat pengelolaan limbah B3	45 Usaha/ kegiatan	46 Usaha/ kegiatan	100,00%
a	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan / Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik	5 dokumen	6 dokumen	120,00%
6	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/ kota	Jumlah usaha atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan (usaha/kegiatan)	30 Usaha/ Kegiatan	32 Usaha/ Kegiatan	106,67%
a	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	15 Usaha/ Kegiatan	19 Usaha/ Kegiatan	126,67%

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2024

b	Pengawasan Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota	Jumlah Badan Usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi	30 badan usaha	32 badan usaha	106,67%
7	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah data/dokumen terkait PPMHA	16 MHA	0 MHA	0,00%
a	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA Kearifan Lokal ataupun pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	1 dokumen	1 dokumen	100%
8	penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina	15 kelompok	16 kelompok	106,67%
a	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	100%
9	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Penghargaan yang diberikan	100%	100%	100%

a	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan /Filantropi yang dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	3 Entitas	100%
10	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan peneglolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase masalah lingkungan yang Teregistrasi	50%	100%	200%
a	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pegaduan permasalahan, pencemaran da perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/ kota yang ditindaklanjuti	4 Pengaduan	6 Pengaduan	150%
b	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjafdi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	2 Perkara	2 Perkara	100%
11	Pengelolaan sampah	Persentase sampah yang dikelola	74%	71,28%	96,32%
a	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah Kelompok Masyarakat atau Para Pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah Berbasis Masyarakat	80 Kelompok	80 Kelompok	100%

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2024

b	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain diluar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota, pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan mengacu pada jakstrada	1 dokumen	1 dokumen	100%
c	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	24.888 Ton	23.498,53 Ton	94,42%
1	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%	100%	100%
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	100%
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2024

c	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%
d	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Laporan	10 Laporan	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	100%	100%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang	27 orang	100%
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	18 dokumen	18 dokumen	100%
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadministrasikan sesuai standar	100%	100%	100%
a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	104,55%	105%

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2024

a	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	100%
b	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17 orang	18 orang	105,88%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 dokumen	3 dokumen	100%
e	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi & konsultasi SKPD	300 Laporan	300 Laporan	100%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100%	66,28%	66,28%

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2024

a	Pengadaan Mebel	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	70 Unit	67 Unit	95,71%
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	19 Unit	7 unit	36,84%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%	100%	100%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan Perizinannya	10 unit	10 unit	100%
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	32 unit	32 unit	100%
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100%

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a. Keterlambatan proses administrasi keuangan yang mempengaruhi realisasi keuangan
- b. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- a. Percepatan proses administrasi keuangan
- b. Melakukan koordinasi pejabat pengadaan dan PPK terkait percepatan proses pengadaan barang dan jasa

6. ANALISIS ATAS EFISIENASI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran pendukung DLH, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- a. Efisiensi anggaran pada belanja modal pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan memaksimalkan peralatan yang ada.
- b. Efisiensi biaya internet kantor yang difasilitasi oleh Dinas Kominfo

❖ Efisiensi Sumber Daya

- a. Masih kurangnya tenaga ASN pada lingkup sekretariat, sehingga untuk mengakomodir semua pelaksanaan tugas, dimaksimalkan tenaga upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN.
- b. Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN.

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 3.31
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraa nlayanan urusan perangkat daerah Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ko ta	Nilai SAKIP	79.60	81.20	102.01			
	Persentase penunjan g urusan perangka t daerah berjalan sesuai standar	100	98,24	98,24%	5.050.975.350	4.479.733.200	88.69 %

Pencapaian sasaran pendukung meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah sebesar 102.01% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 88.69%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 11,31 %.

7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

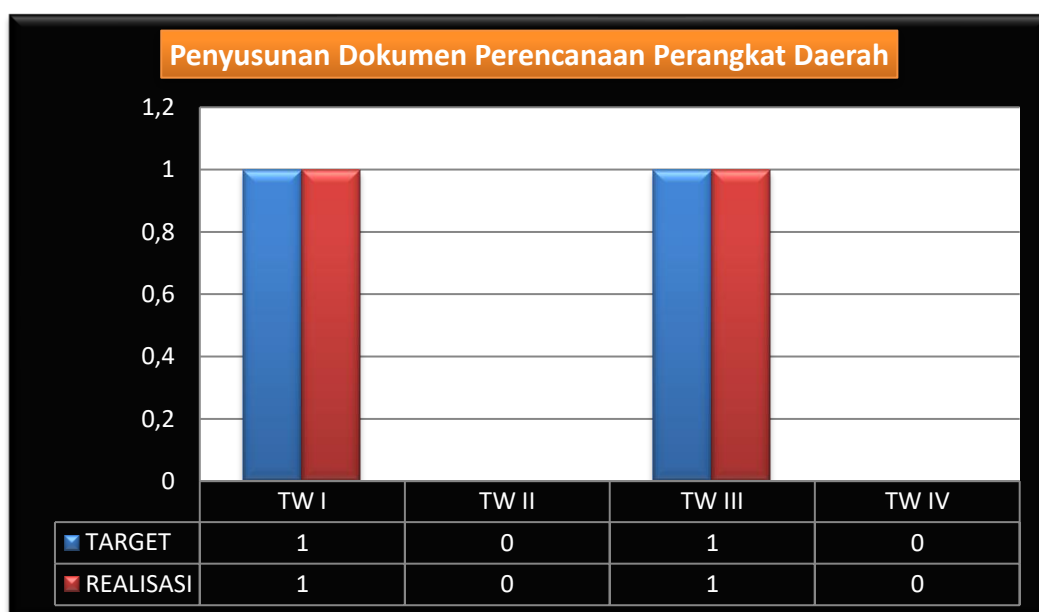
Indikator Program adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan

formulasi : *jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan dikali seratus.*

Pencapaian Kinerja Program didukung oleh 7 kegiatan dan 22 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



Grafik 3.32

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

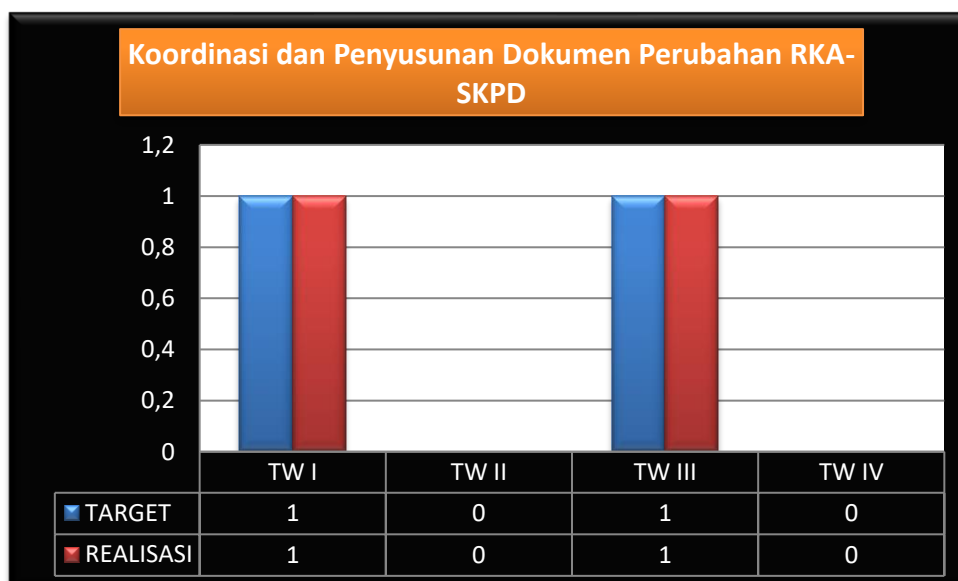
Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator **Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (Dokumen)** ,dimana target kinerja triwulan IV sebanyak 0 dokumen. Tidak ada target dan realisasi dokumen di triwulan IV karena 2 dokumen yang menajdi target kinerja tahun 2024 telah di penuhi di Triwulan I dan III yakni:

1. Dokumen Renja Pokok;
2. Dokumen Renja Perubahan.

Pada sub kegiatan ini total anggaran sebesar Rp 50.360.000,- dan telah terealisasi sebesar 82,21% dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja Honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan (Honorarium Perencana SKPD terealisasi 100%
- ✓ Belanja Kertas dan Cover terealisasi 92,41 % sisa anggaran karena selisih harga satuan barang di DPA dengan harga e-catalog dan hasil negosiasi pejabat pengadaan barang dan jasa dengan penyedia.
- ✓ Belanja bahan cetak terealisasi 89,93% sisa anggaran karena selisih harga satuan barang di DPA dengan harga e-catalog.
- ✓ Belanja bahan komputer terealisasi 88,80% sisa anggaran karena selisih harga satuan barang di DPA dengan harga e-catalog dan hasil negosiasi pejabat pengadaan barang dan jasa dengan penyedia.
- ✓ Belanja jasa tenaga administrasi terealisasi 100%
- ✓ Belanja perjalanan dinas terealisasi 37,11 % Sisa anggaran hasil efisiensi sebesar 62,89%.

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD



Grafik 3.33

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

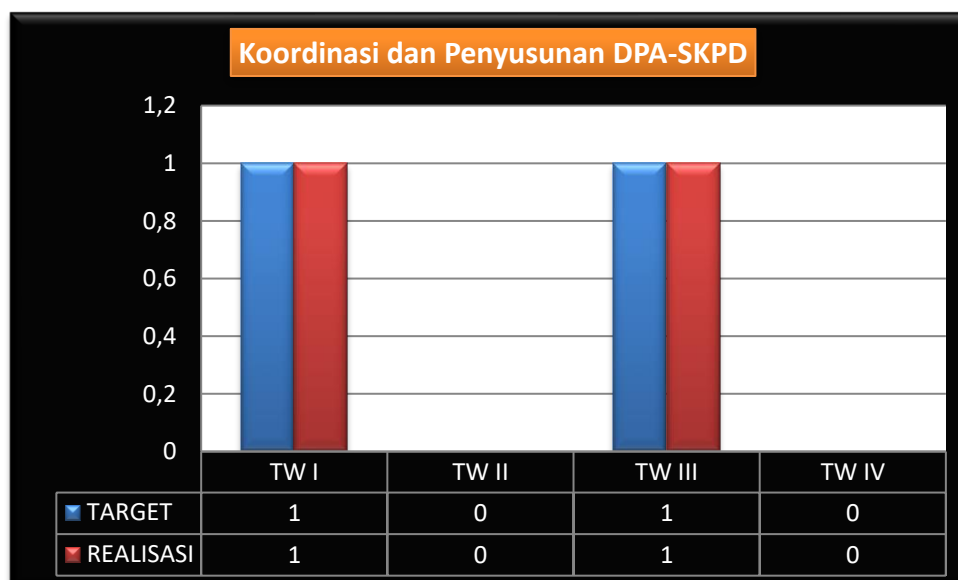
Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator **Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)**, dimana target kinerja triwulan IV sebanyak 0 dokumen. Tidak ada target dan realisasi dokumen di triwulan IV karena 2 dokumen yang menajdi target kinerja tahun 2024 telah di penuhi di Triwulan I dan III yakni:

1. RKA Pokok;
2. RKA Perubahan.

Pada sub kegiatan ini total anggaran sebesar Rp 17.415.000,- dan telah terealisasi sebesar 65,09% dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja Alat Tulis Kantor terealisasi 97,13%, sisa anggaran karena selisih harga satuan barang di DPA dengan harga e-catalog dan hasil negosiasi pejabat pengadaan barang dan jasa dengan penyedia.
- ✓ Belanja Kertas dan Cover terealisasi 37,82% sisa anggaran hasil efisiensi anggaran dan hasil negosiasi pejabat pengadaan barang dan jasa dengan penyedia..
- ✓ Belanja bahan cetak terealisasi 95,14% Sisa anggaran karena selisi harga satuan jilid di DPA dengan harga e-catalog.
- ✓ Belanja bahan komputer terealisasi 0%. Belanja bahan komputer diefisiensikan sebesar 100%.
- ✓ Belanja makan minum rapat terealisasi 49,88%, sisa anggaran di efisiensikan sebesar 50,12%.
- ✓ Belanja perjalanan dinas terealisasi 67,96 % Sisa anggaran hasil efisiensi sebesar 32,04%.

c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD



Grafik 3.34

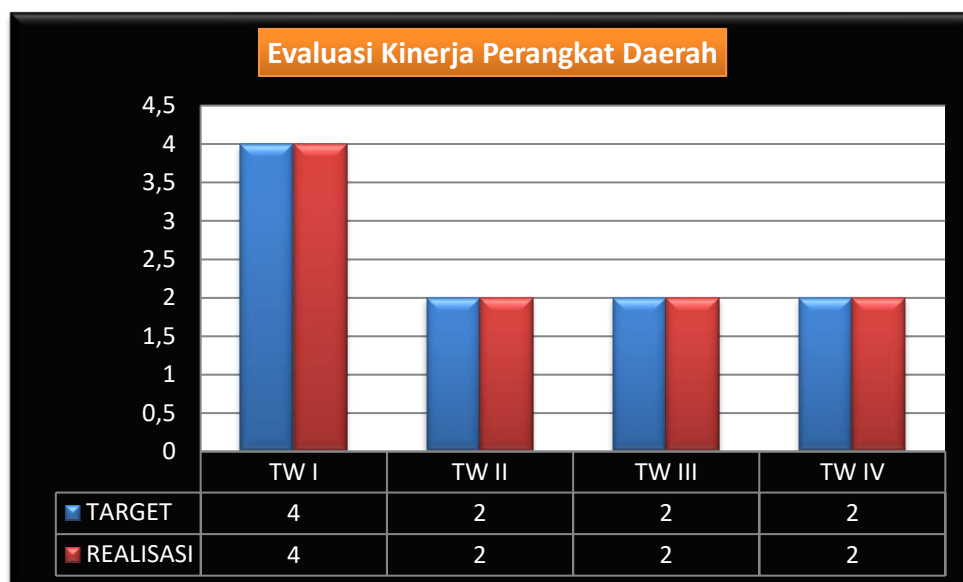
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen), Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen), dimana target kinerja triwulan IV sebanyak 0 dokumen. Tidak ada target dan realisasi dokumen di triwulan IV karena 2 dokumen yang menjadi target kinerja tahun 2024 telah di penuhi di Triwulan I dan III yakni:

1. DPA Pokok;
2. DPA Perubahan.

Pada sub kegiatan ini total anggaran sebesar Rp 1.840.000,- dan telah terealisasi sebesar 88,32% dengan rincian Belanja bahan cetak terealisasi 88,32%, sisa anggaran karena selisih harga satuan barang di DPA dengan harga e-catalog dan hasil negosiasi pejabat pengadaan barang dan jasa dengan penyedia.

d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



Grafik 3.35

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator **Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun (Dokumen)**, dimana target kinerja tahun 2024 adalah 10 dokumen dan terealisasi sebanyak 10 dokumen diantaranya:

1. LKPJ 2024;
2. LPPD 2023;
3. LAKIP 2023;
4. Lap. Evaluasi kinerja Tw. IV tahun 2023;
5. Lap. Evaluasi kinerja Tw. I Tahun 2024;
6. Laporan Berjenjang Tw I tahun 2024;
7. Lap. Evaluasi kinerja Tw. II Tahun 2024;
8. Laporan Berjenjang Tw II tahun 2024;
9. Lap. Evaluasi kinerja Tw. III Tahun 2024;
10. Laporan Berjenjang Tw III tahun 2024.

Pada sub kegiatan ini total anggaran sebesar Rp 99.031.000,- dan telah terealisasi sebesar 60,82% dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja Alat Tulis Kantor terealisasi 13,14%, sisa anggaran hasil efisiensi sebesar 86,86%.

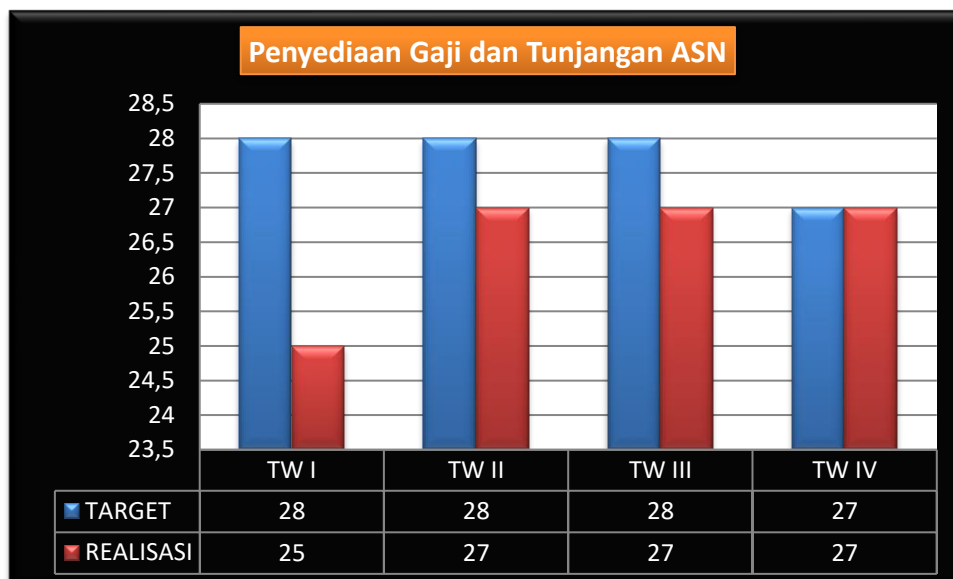
- ✓ Belanja Kertas dan Cover terealisasi 50,30% sisa anggaran hasil efisiensi sebesar 49,70%.
- ✓ Belanja bahan cetak terealisasi 92,50% Sisa anggaran karena selisi harga satuan jilid di DPA dengan harga e-catalog.
- ✓ Belanja bahan komputer terealisasi 0%. Belanja bahan komputer diefisiensikan sebesar 100%.
- ✓ Belanja makan minum rapat terealisasi 99,75%.
- ✓ Belanja perjalanan dinas terealisasi 59,91% Sisa anggaran hasil efisiensi sebesar 40,09%..

Dokumentasi Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

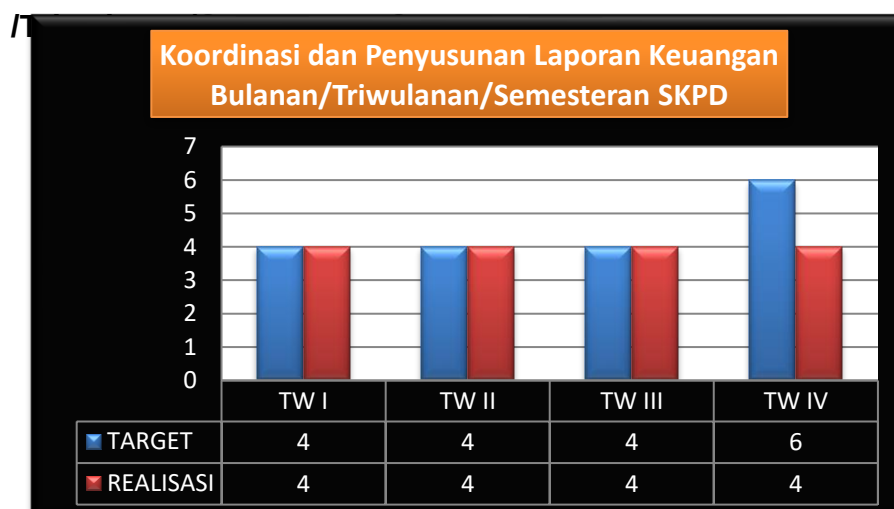


Grafik 3.36

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator **Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN**, dimana target pada triwulan IV sebanyak 27 orang dan telah terealisasi 27 orang. Diantaranya: 1 orang eselon II, 4 orang eselon III, 4 orang eselon IV, 6 orang fungsional, 10 orang pelaksana dan 2 orang PPPK

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan



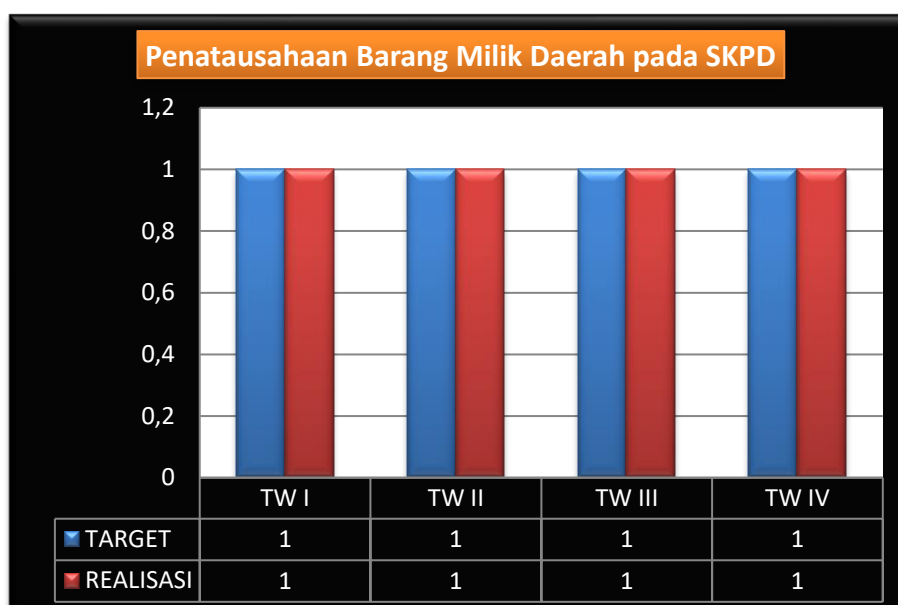
Grafik 3.37

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu, dengan target sebanyak 18 dokumen dan terealisasi 18 dokumen yaitu tersusunya Laporan Realisasi Keuangan Bulan Januari s/d Desember 2024; Laporan Keuangan Triwulan IV; Laporan Semester II Tahun 2024; dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 124.930.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 122.371.450,- atau capaian 97,95%

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD



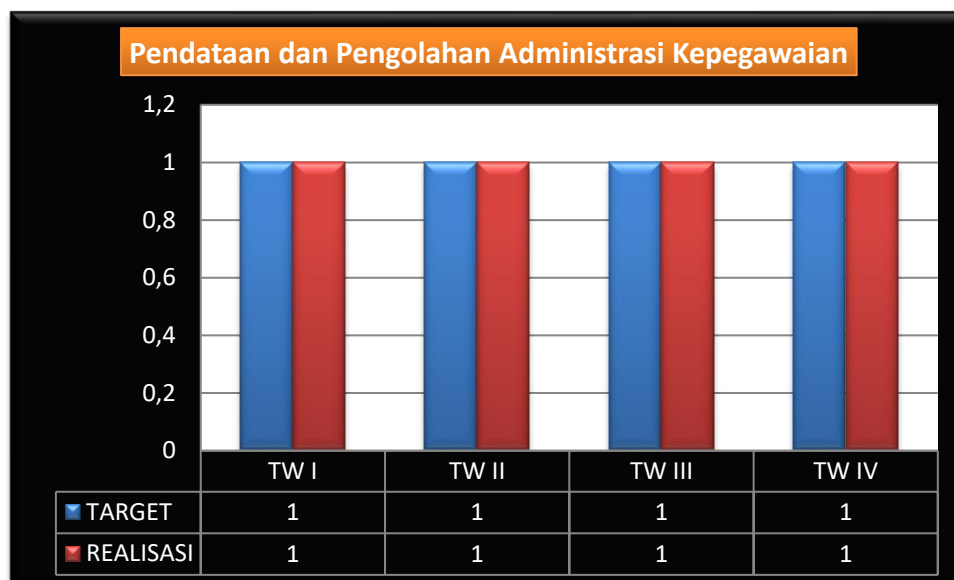
Grafik 3.38

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah laporan penatusahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu, dengan target sebanyak 4 dokumen dan terealisasi 4 dokumen yaitu tersusunnya laporan penatausahaan BMD triwulan I s/d Triwulan IV tahun 2024 dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 19.155.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 17.959.640,- atau capaian 93,76%.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian



Grafik 3.39

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

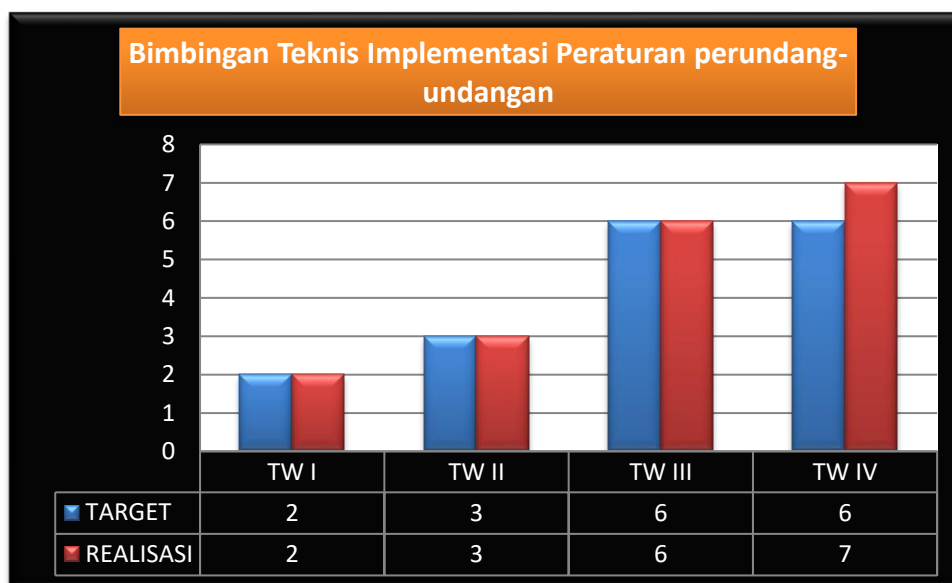
Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator **Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang di mutakhirkan** , dimana target pada triwulan IV sebanyak 1 dokumen dan telah terealisasi 1 dokumen. Yaitu Dokumen administrasi kepegawaian. Adapun administrasi kepegawaian yang dilaksanakan dalam tahun 2024 adalah:

- Penyusunan SK penempatan ASN dan Non ASN;
- KP4 ASN;
- KGB ASN;
- SKP ASN;
- Usulan Karis/Karsu ASN;
- Usulan kenaikan Pangkat;
- Usulan Pencantuman Gelar;
- Usulan Satya Lencana;
- Usulan pemetaan PPPK tahap 1 dan tahap 2;
- Usulan kenaikan pangkat;
- Usulan pencantuman gelar;
- Usulan cuti pegawai.

Pada sub kegiatan ini total anggaran sebesar Rp 85.654.900,- dan telah terealisasi sebesar 77,75% dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja Alat Tulis Kantor terealisasi 77,33%, sisa anggaran hasil efisiensi sebesar 22,67%.
- ✓ Belanja Kertas dan Cover terealisasi 92,63% sisa anggaran sebesar 7,37% adalah hasil efisiensi anggaran dan hasil negosiasi pejabat pengadaan barang dan jasa dengan penyedia.
- ✓ Belanja bahan cetak tidak terealisasi karena 100% anggaran cetak diefisiensikan.
- ✓ Belanja makan minum rapat terealisasi 80,00%. Sisa anggaran sebesar 20% hasil efisiensi anggaran.
- ✓ Belanja jasa tenaga administrasi terealisasi 100%.
- ✓ Belanja perjalanan dinas terealisasi 68,40% Sisa anggaran hasil efisiensi sebesar 31,60%

b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan



Grafik 3.40

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator **Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan**, dimana target Tahun 2024 sebanyak 17 orang yang mengikuti Bimtek dan terealisasi 18 orang yang mengikuti bimtek. Adapun daftar bimtek yang diikuti pada tahun 2024 diantaranya:

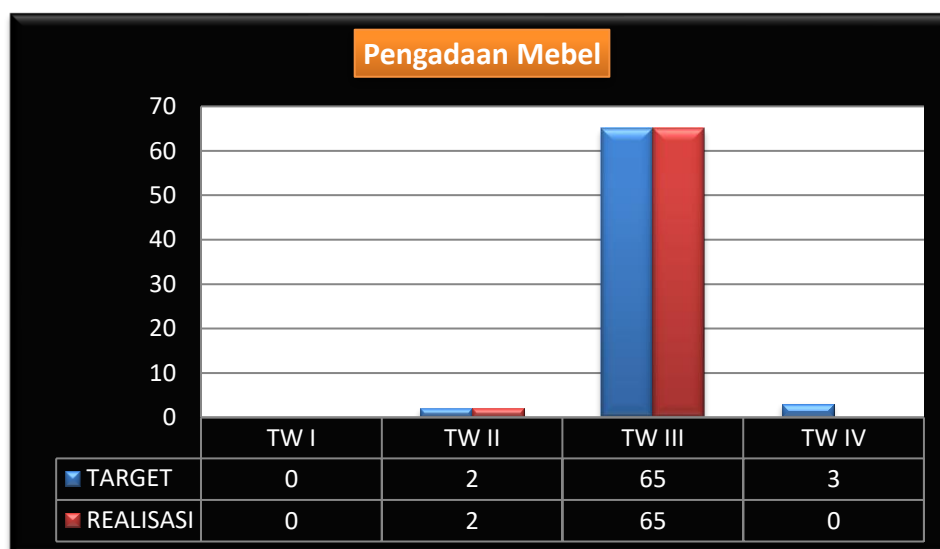
Target kinerja tahun 2024 sebanyak 17 orang dan terealisasi sebanyak 18 orang yang mengikuti bimtek. Disediakan anggaran sebesar Rp 71.020.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 62.476.500,- (87,97%). Terdapat sisa anggaran pada biaya kursus singkat/pelatihan karena anggaran bersifat disediakan apabila ada kegiatan bimtek yang harus membayar kontribusi bimtek.

Pada sub kegiatan ini total anggaran sebesar Rp 187.200.000,- dan telah terealisasi sebesar 68.60% dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja kursus singkat/pelatihan terealisasi 28,74%, sisa anggaran sebesar 71,26 adalah hasil efisiensi anggaran.
- ✓ Belanja perjalanan dinas terealisasi 39,86%, sisa anggaran sebesar 60,14 adalah hasil efisiensi anggaran.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan mebel



Grafik 3.41

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah Paket Mebel yang disediakan, dengan target sebanyak 70 unit dan terealisasi 67 Unit dengan capaian kinerja 95,71%. Disediakan anggaran sebesar Rp 88.825.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 51.325.000,- (57,78%). Terdapat sisa anggaran pada belanja mebel karena efisiensi anggaran pada belanja modal meja rapat pejabat dan belanja modal lemari dan arsip pejabat.

Dokumentasi Sub Kegiatan Pengadaan Meubel



b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



Grafik 3.42

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan, dengan target sebanyak 19 unit dan terealisasi 7 Unit dengan capaian kinerja 36,84%. Disediakan anggaran sebesar Rp 188.040.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 67.470.000,- atau capaian 35,88%. Terdapat sisa anggaran pada belanja beberapa peralatan dan mesin karena Efisiensi anggaran pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, belanja modal alat rumah tangga lainnya (Home Use), belanja modal peralatan studio audio, belanja modal personal komputer, belanja modal komputer unit lainnya yang disediakan sebanyak 8 unit tapi yang di belanja hanya 1 unit laptop dan 1 unit PC.

Dokumentasi Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

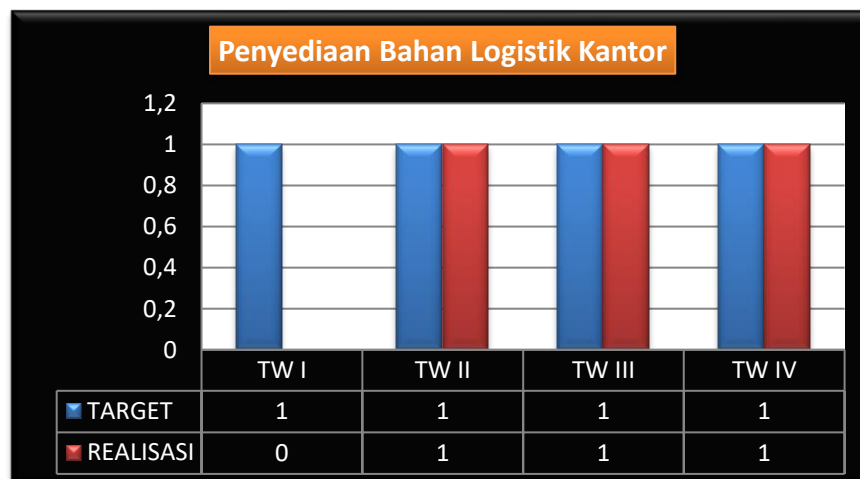


Grafik 3.43

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator kinerja sub kegiatan Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, dengan target sebanyak 1 paket dan terealisasi 1 paket dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 6.325.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 4.791.000,- atau capaian 75,75%.

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor



Grafik 3.44

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator kinerja sub kegiatan Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan, dengan target sebanyak 1 paket dan terealisasi 1 p a k e t dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 4.168.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 4.168.000,- atau capaian 100%.

c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

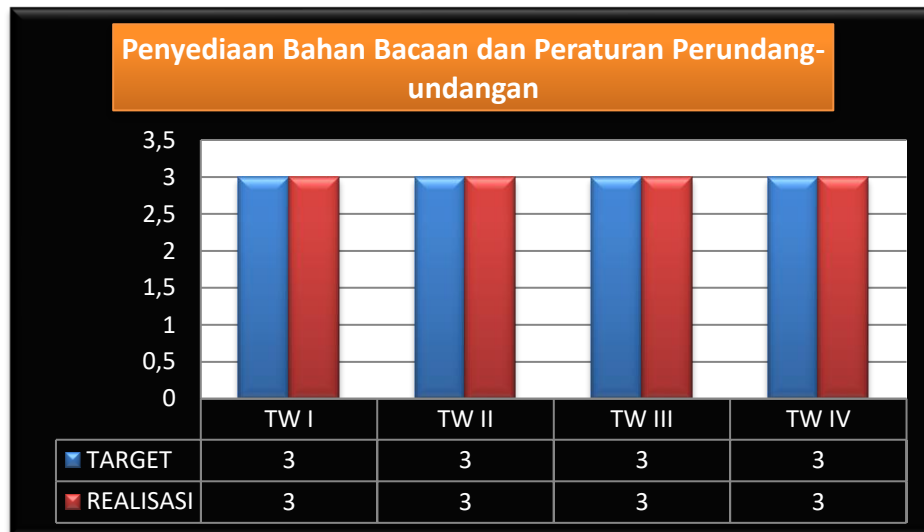


Grafik 3.45

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan, dimana target pada triwulan IV sebanyak 1 paket dan telah terealisasi 1 paket, yaitu cetak dan penggandaan dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 5.899.500,- dengan realisasi keuangan Rp. 4.690.450,- atau capaian 79,51%.

d. **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

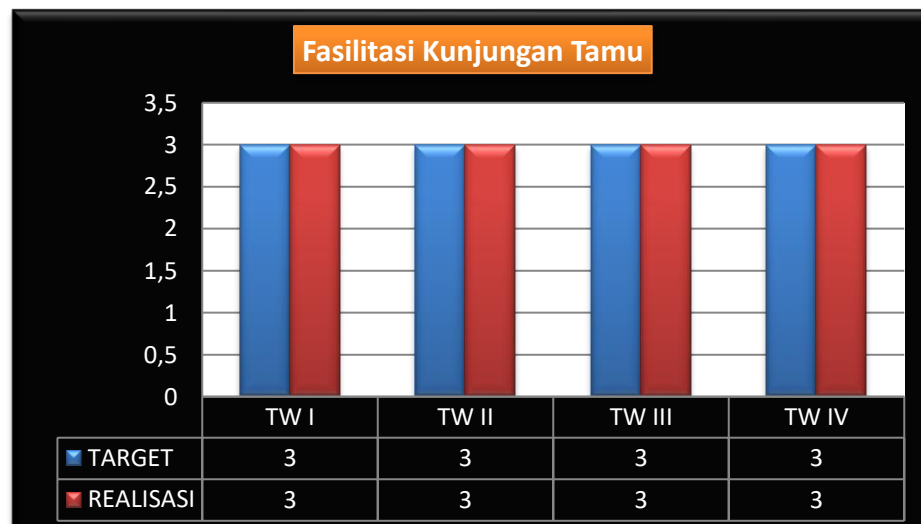


Grafik 3.46

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan, dimana target sebanyak 3 dokumen dan telah terealisasi 3 dokumen. Diantaranya: Koran Radar, Sindo dan Palopo Pos. Disediakan anggaran sebesar Rp 4.500.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 3.900.000,- (86,67%).

e. **Fasilitasi Kunjungan Tamu**

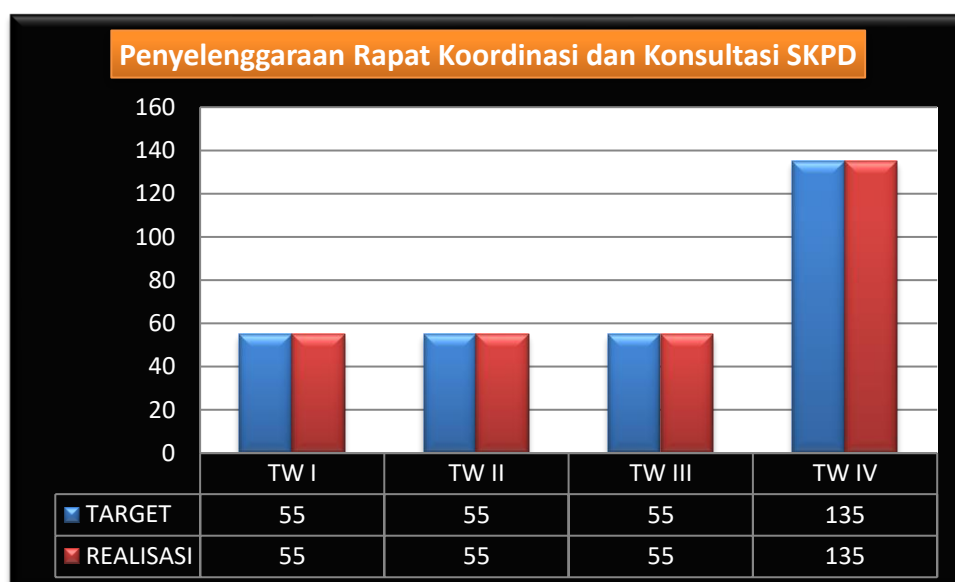


Grafik 3.47

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu, dimana target sebanyak 12 laporan dan telah terealisasi 12 laporan dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 15.125.000,- dengan realisasi keuangan Rp15.077.900,- atau capaian 99,69%.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



Grafik 3.48

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dimana target sebanyak 300 laporan dan telah terealisasi 300 laporan. Diantaranya: laporan penyelenggaraan rapat koordinasi konsultasi dalam daerah, luar daerah dan luar provinsi dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 451.900.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 383.744.648,- atau capaian 84,92%

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

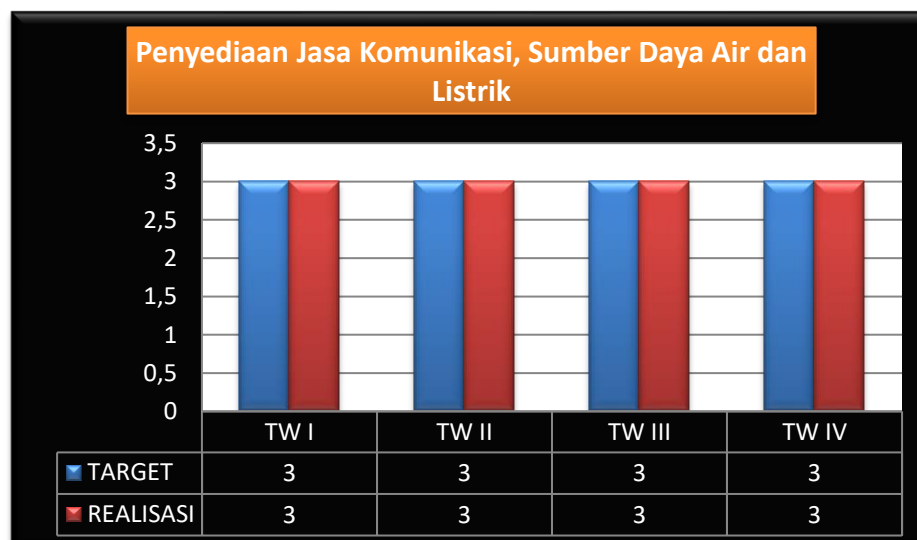


Grafik 3.49

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, dimana target sebanyak 12 laporan dan telah terealisasi 12 Laporan dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 6.770.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 6.027.790,- atau capaian 86,69%.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

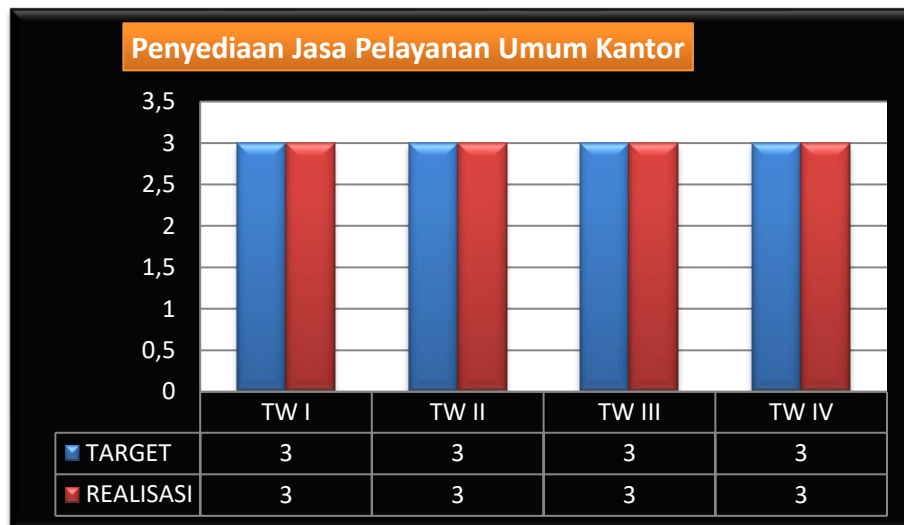


Grafik 3.50

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik yang disediakan, dimana target sebanyak 12 laporan dan telah terealisasi 12 laporan dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 102.039.368,- dengan realisasi keuangan Rp. 92.368.020,- atau capaian 92.368.020 %.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



Grafik 3.51

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan, dimana target sebanyak 12 laporan dan telah terealisasi 12 laporan dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 55.800.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 55.800.000,- (100%).

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



Grafik 3.52
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator kinerja sub kegiatan Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya, dengan target sebanyak 10 unit dan terealisasi 10 unit dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 47.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 109.646,- atau capaian 99,37%. Terdapat sisa anggaran pada belanja jasa service, suku cadang, pelumas, STNK karena anggaran bersifat disediakan.

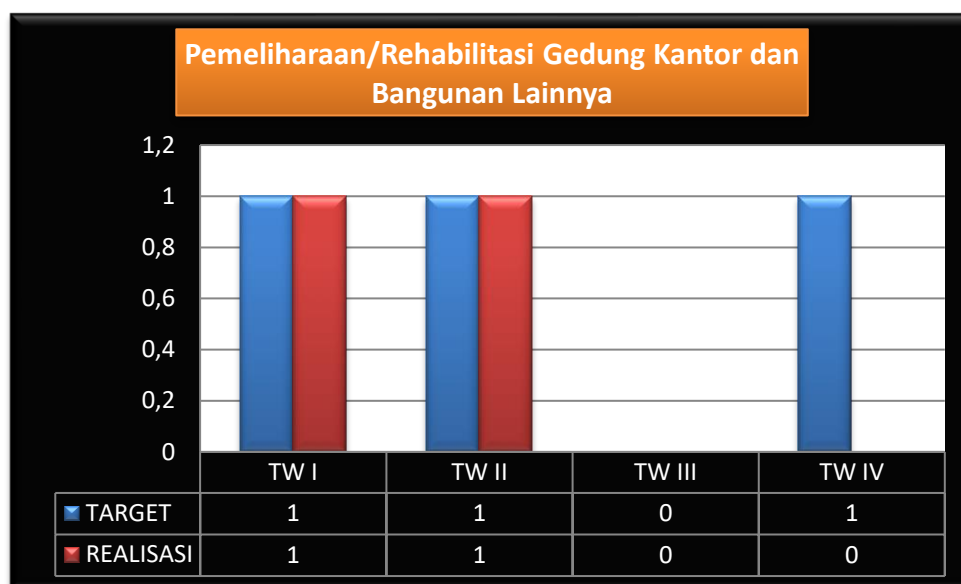
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



Grafik 3.52
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, dimana target sebanyak 32 unit dan telah terealisasi 32 unit dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 16.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 15.310.000,- atau capaian Rp. 690.000. Terdapat sisa anggaran karena anggaran bersifat disediakan.

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



Grafik 3.54

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator kinerja sub Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi, dengan target sebanyak 3 unit dan terealisasi 3 unit dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 109.646.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 108.960.000,- (99,84%). Terdapat sisa anggaran karena anggaran bersifat disediakan.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Anggaran APBD untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 adalah sebesar sebesar Rp. 10.118.124,165,- (*Sepuluh milyar*

seratus delapan belas juta seratus dua puluhempat ribu seratus enam puluh lima rupiah), terdiri dari belanja operasi **Rp. 10.288.196.065,-** dan belanja modal **Rp 333.865.000,-**. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 11 program, 18 kegiatan serta 40 sub kegiatan.

Rincian realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel.3.32
Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024
Kabupaten Luwu Timur

NO KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			(RP)	(%)	(RP)	(%)
1	2	4	5	6 (5/4x100)	7 (4-5)	8 (7/4x100)
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000	62.715.000	62,72	37.285.000	37,29
4.1.02	Retribusi Daerah	100.000.000	62.715.000	62,72	37.285.000	37,29
4.0.02.02.01.000 4	Retribusi Pemakaian Ltgyaboratorium	100.000.000	62.715.000	62,72	37.285.000	37,29
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.050.975.35 0	4.482.333.20 0	88,74	568.642.150	11,26
2.11.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	168.646.000	114.586.129	67,94	54.059.871	32,06
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.360.000	41.400.010	82,21	8.959.990	17,79
5.1.01.03.07.000 1	Honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan (Honorarium Perencana SKPD)	9.000.000	9.000.000	100,00	-	-

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2024

5.1.02.01.01.002 5	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	1.075.000	993.450	92,41	81.550	7,59
5.1.02.01.01.002 6	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Cetak	1.970.000	1.771.560	89,93	198.440	10,07
5.1.02.01.01.002 9	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Komputer	625.000	555.000	88,80	70.000	11,20
5.1.02.02.01.002 6	Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000	24.000.000	100,00	-	-
5.1.02.04.01.000 1	Perjalanan Dinas Biasa	13.690.000	5.080.000	37,11	8.610.000	62,89
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.415.000	11.334.570	65,09	6.080.430	34,91
5.1.02.01.01.002 4	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Alat Tulis Kantor	80.000	77.700	97,13	2.300	2,88
5.1.02.01.01.002 5	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	725.000	274.170	37,82	450.830	62,18
5.1.02.01.01.002 6	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Cetak	1.190.000	1.132.200	95,14	57.800	4,86
5.1.02.01.01.002 9	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Komputer	500.000	-	-	500.000	100,00
5.1.02.01.01.005 2	Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000	798.000	49,88	802.000	50,13
5.1.02.04.01.000 1	Perjalanan Dinas Biasa	13.320.000	9.052.500	67,96	4.267.500	32,04
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.840.000	1.625.040	88,32	214.960	11,68
5.1.02.01.01.002 6	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Cetak	1.840.000	1.625.040	88,32	214.960	11,68
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.031.000	60.226.509	60,82	38.804.491	39,18
5.1.02.01.01.002 4	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Alat Tulis Kantor	991.000	133.200	13,44	857.800	86,56
5.1.02.01.01.002 5	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	1.335.000	671.550	50,30	663.450	49,70
5.1.02.01.01.002	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-					

6	Bahan Cetak	1.845.000	1.698.300	92,05	146.700	7,95
5.1.02.01.01.002 9	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Komputer	500.000		-	500.000	100,00
5.1.02.01.01.005 2	Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	2.992.500	99,75	7.500	0,25
5.1.02.04.01.000 1	Perjalanan Dinas Biasa	91.360.000	54.730.959	59,91	36.629.041	40,09
2.11.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.473.221.58 2	3.360.692.59 3	96,76	112.528.989	3,24
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.348.291.58 2	3.238.321.14 3	96,72	109.970.439	3,28
5.1.01.01.01.000 1	Gaji Pokok ASN	1.370.000.00 0	1.331.395.69 5	97,18	38.604.305	2,82
5.1.01.01.01.000 2	Gaji Pokok PPPK	13.200.000	-	-	13.200.000	100,00
5.1.01.01.02.000 1	Tunjangan Keluarga ASN	146.000.000	140.597.496	96,30	5.402.504	3,70
5.1.01.01.02.000 2	Tunjangan Keluarga PPPK	1.800.000	-	-	1.800.000	100,00
5.1.01.01.03.000 1	Tunjangan Jabatan ASN	132.000.000	126.570.000	95,89	5.430.000	4,11
5.1.01.01.04.000 1	Tunjangan Fungsional ASN	160.000.000	155.120.000	96,95	4.880.000	3,05
5.1.01.01.04.000 2	Tunjangan Fungsional PPPK	2.300.000	-	-	2.300.000	100,00
5.1.01.01.05.000 1	Tunjangan Fungsional Umum ASN	28.000.000	27.010.000	96,46	990.000	3,54
5.1.01.01.05.000 2	Tunjangan Fungsional Umum PPPK	800.000	-	-	800.000	100,00
5.1.01.01.06.000 1	Tunjangan Beras ASN	81.000.000	78.068.760	96,38	2.931.240	3,62
5.1.01.01.06.000 2	Tunjangan Beras PPPK	1.100.000	-	-	1.100.000	100,00

5.1.01.01.07.000 1	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.033.400	14.118.443	70,47	5.914.957	29,53
5.1.01.01.08.000 1	Pembulatan Gaji ASN	126.208	17.021	13,49	109.187	86,51
5.1.01.01.08.000 2	Pembulatan Gaji PPPK	5.000	-	-	5.000	100,00
5.1.01.02.01.000 1	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	1.376.026.97 4	1.349.625.09 6	98,08	26.401.878	1,92
5.1.01.02.01.000 2	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK	15.900.000	15.798.632	99,36	101.368	0,64
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	124.930.000	122.371.450	97,95	2.558.550	2,05
5.1.01.03.07.000 1	Honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan	36.180.000	35.700.000	98,67	480.000	1,33
5.1.02.01.01.002 6	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak	590.000	492.840	83,53	97.160	16,47
5.1.02.02.01.002 6	Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000	24.000.000	100,00	-	-
5.1.02.04.01.000 1	Perjalanan Dinas Biasa	64.160.000	62.178.610	96,91	1.981.390	3,09
2.11.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	19.155.000	17.959.640	93,76	1.195.360	6,24
2.11.01.2.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.155.000	17.959.640	93,76	1.195.360	6,24
5.1.01.03.07.000 1	Honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan (Honorarium Pengurus Barang)	13.800.000	13.800.000	100,00	-	-
5.1.02.01.01.002 4	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	3.930.000	2.846.510	72,43	1.083.490	27,57
5.1.02.01.01.002 5	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	1.425.000	1.313.130	92,15	111.870	7,85
2.11.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN					

	PERANGKAT DAERAH	272.854.900	134.135.090	49,16	138.719.810	50,84
2.11.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	85.654.900	66.592.700	77,75	19.062.200	22,25
5.1.02.01.01.002 4	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Alat Tulis Kantor	1.045.000	808.080	77,33	236.920	22,67
5.1.02.01.01.002 5	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	1.160.000	1.074.480	92,63	85.520	7,37
5.1.02.01.01.002 6	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan cetak	879.900	-	-	879.900	100,00
5.1.02.01.01.005 2	Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000	1.200.000	80,00	300.000	20,00
5.1.02.02.01.000 3	Honorium Narasumber atau Pembahasan, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.500.000	13.500.000	100,00	-	-
5.1.02.02.01.002 6	Jasa Tenaga Administrasi	12.000.000	12.000.000	100,00	-	-
5.1.02.04.01.000 1	Perjalanan Dinas Biasa	55.570.000	38.010.140	68,40	17.559.860	31,60
2.11.01.2.05.001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	187.200.000	67.542.390	36,08	119.657.610	63,92
5.1.02.02.12.000 1	Kursus Singkat/Pelatihan	87.000.000	25.000.000	28,74	62.000.000	71,26
5.1.02.04.01.000 1	Perjalanan Dinas Biasa	100.200.000	42.542.390	42,46	57.657.610	57,54
2.11.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	487.917.500	416.371.998	85,34	71.545.502	14,66
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.325.000	4.791.000	75,75	1.534.000	24,25
5.1.02.01.01.003 1	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Alat Listrik	6.325.000	4.791.000	75,75	1.534.000	24,25
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.168.000	4.168.000	100,00	-	-
5.1.02.01.01.001 2	Bahan-bahan lainnya	4.168.000	4.168.000	100,00	-	-

2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.899.500	4.690.450	79,51	1.209.050	20,49
5.1.02.01.01.002 6	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.899.500	4.690.450	79,51	1.209.050	20,49
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000	3.900.000	86,67	600.000	13,33
5.1.02.02.01.006 2	Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.500.000	3.900.000	86,67	600.000	13,33
2.11.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	15.125.000	15.077.900	99,69	47.100	0,31
5.1.02.01.01.005 3	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.125.000	15.077.900	99,69	47.100	0,31
2.11.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	451.900.000	383.744.648	84,92	68.155.352	15,08
5.1.02.02.01.003 3	Jasa Tenaga Sopir	36.000.000	33.000.000	91,67	3.000.000	8,33
5.1.02.04.01.000 1	Perjalanan Dinas Biasa	415.900.000	350.744.648	84,33	65.155.352	15,67
2.11.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	276.865.000	118.795.000	42,91	158.070.000	57,09
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	88.825.000	51.325.000	57,78	37.500.000	42,22
5.2.02.05.03.000 2	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	30.000.000	-	-	30.000.000	100,00
5.2.02.05.03.000 4	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	41.925.000	41.925.000	100,00	-	-
5.2.02.05.03.000 7	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	16.900.000	9.400.000	55,62	7.500.000	44,38
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	188.040.000	67.470.000	35,88	120.570.000	64,12
5.1.02.01.01.003 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.000.000	-	-	5.000.000	100,00

5.2.02.01.03.000 5	Belanja Modal Pompa	1.300.000	1.300.000	100,00	-	-
5.2.02.05.02.000 4	Belanja Modal Alat Pendingin	13.000.000	12.950.000	99,62	50.000	0,38
5.2.02.05.02.000 6	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.000.000	-	-	20.000.000	100,00
5.2.02.06.01.000 1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	7.500.000	-	-	7.500.000	100,00
5.2.02.10.01.000 2	Belanja Modal Personal Komputer	1.500.000	-	-	1.500.000	100,00
5.2.02.10.01.000 3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	102.000.000	29.950.000	29,36	72.050.000	70,64
5.2.02.10.02.000 3	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	37.740.000	23.270.000	61,66	14.470.000	38,34
2.11.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	164.609.368	154.195.810	93,67	10.413.558	6,33
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.770.000	6.027.790	89,04	742.210	10,96
5.1.02.01.01.002 4	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	5.450.000	4.724.650	86,69	725.350	13,31
5.1.02.01.01.002 5	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	210.000	193.140	91,97	16.860	8,03
5.1.02.01.01.002 7	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos	1.110.000	1.110.000	100,00	-	-
2.11.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.039.368	92.368.020	90,52	9.671.348	9,48
5.1.02.02.01.006 0	Belanja Tagihan Air	3.060.000	2.778.600	90,80	281.400	9,20
5.1.02.02.01.006 1	Belanja Tagihan Listrik	98.979.368	89.589.420	90,51	9.389.948	9,49
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.800.000	55.800.000	100,00	-	-
5.1.01.03.07.000 2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.800.000	4.800.000	100,00	-	-

5.1.02.02.01.002 8	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	30.000.000	30.000.000	100,00	-	-
5.1.02.02.01.003 1	Jasa Tenaga Tenaga Keamanan	21.000.000	21.000.000	100,00	-	-
2.11.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH	187.706.000	165.596.940	88,22	22.109.060	11,78
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	62.060.000	41.326.940	66,59	20.733.060	33,41
5.1.02.01.01.000 4	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	7.400.000	2.028.000	27,41	5.372.000	72,59
5.1.02.03.02.003 5	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.660.000	3.397.940	35,18	6.262.060	64,82
5.1.02.03.02.003 6	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang	45.000.000	35.901.000	79,78	9.099.000	20,22
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.000.000	15.310.000	95,69	690.000	4,31
5.1.02.03.02.011 7	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya	16.000.000	15.310.000	95,69	690.000	4,31
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	109.646.000	108.960.000	99,37	686.000	0,63
5.1.02.03.03.000 1	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	69.646.000	68.960.000	99,02	686.000	0,98
5.1.02.03.03.002 5	Belanja Pemeliharaan Kolam Lindi TPA	40.000.000	40.000.000	100,00	-	-
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN					

	LINGKUNGAN HIDUP	395.036.690	364.864.619	92,36	30.172.071	7,64
2.11.02.2.02	PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA	395.036.690	364.864.619	92,36	30.172.071	7,64
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	202.965.000	190.240.303	93,73	12.724.697	6,27
5.1.02.01.01.002 4	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.175.000	851.750	72,49	323.250	27,51
5.1.02.01.01.002 6	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.170.000	3.170.000	100,00	-	-
5.1.02.01.01.002 9	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	750.000	660.000	88,00	90.000	12,00
5.1.02.01.01.005 2	Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000	7.146.000	99,25	54.000	0,75
5.1.02.02.01.000 3	Honorium Narasumber atau Pembahasan, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	135.000.000	132.000.000	97,78	3.000.000	2,22
5.1.02.02.04.003 6	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.600.000	3.600.000	100,00	-	-
5.1.02.02.05.000 9	Sewa Bangunan Gedung dan Tempat Pertemuan	3.000.000	3.000.000	100,00	-	-
5.1.02.02.05.004 3	Sewa Hotel	4.200.000	4.200.000	100,00	-	-
5.1.02.04.01.000 1	Perjalanan Dinas Biasa	44.870.000	35.612.553	79,37	9.257.447	20,63
2.11.02.2.02.05	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	192.071.690	174.624.316	90,92	17.447.374	9,08
5.1.02.01.01.002 4	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	916.140	749.250	81,78	166.890	18,22
5.1.02.01.01.002 5	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	1.200.000	1.118.880	93,24	81.120	6,76
5.1.02.01.01.002 6	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.125.550	2.125.550	100,00	-	-
5.1.02.01.01.002 9	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	500.000	444.000	88,80	56.000	11,20
5.1.02.01.01.005 2	Makanan dan Minuman Rapat	14.400.000	9.726.500	67,55	4.673.500	32,45

5.1.02.02.01.0003	Honorium Narasumber atau Pembahasan, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	120.000.000	120.000.000	100,00	-	-
5.1.02.02.04.0036	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.600.000	1.800.000	50,00	1.800.000	50,00
5.1.02.02.05.0009	Sewa Bangunan Gedung dan Tempat Pertemuan	3.000.000	-	-	3.000.000	100,00
5.1.02.02.05.0043	Sewa Hotel	4.200.000	2.100.000	50,00	2.100.000	50,00
5.1.02.04.01.0001	Perjalanan Dinas Biasa	42.130.000	36.560.136	86,78	5.569.864	13,22
2.11.03	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA	682.594.575	564.878.914	82,75	117.715.661	17,25
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	586.199.625	470.284.384	80,23	115.915.241	19,77
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	161.684.100	145.326.532	89,88	16.357.568	10,12
5.1.02.01.01.0024	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	350.000	310.800	88,80	39.200	11,20
5.1.02.01.01.0025	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	515.000	478.410	92,90	36.590	7,10
5.1.02.01.01.0026	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.409.100	664.950	47,19	744.150	52,81
5.1.02.01.01.0029	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	500.000	444.000	88,80	56.000	11,20
5.1.02.01.01.0036	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.360.000	1.110.000	81,62	250.000	18,38
5.1.02.01.01.0052	Makanan dan Minuman Rapat	4.240.000	2.590.250	61,09	1.649.750	38,91
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	51.320.000	41.874.410	81,59	9.445.590	18,41
5.1.02.02.04.004	Sewa Alat Angkutan Apung					

9	Bermotor Untuk Penumpang	2.000.000	1.000.000	50,00	1.000.000	50,00
5.1.02.04.01.000 1	Perjalanan Dinas Biasa	99.990.000	96.853.712	96,86	3.136.288	3,14
2.11.03.2.01.001 5	Pengelolaan Laboratorium LH Kabupaten	424.515.525	324.957.852	76,55	99.557.673	23,45
5.1.02.01.01.000 2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	126.912.000	58.073.000	45,76	68.839.000	54,24
5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan ATK	4.408.525	4.136.970	93,84	271.555	6,16
5.1.02.01.01.002 5	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	3.045.000	2.820.510	92,63	224.490	7,37
5.1.02.01.01.002 9	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	750.000	666.000	88,80	84.000	11,20
5.1.02.01.01.005 2	Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000	5.107.200	85,12	892.800	14,88
5.1.02.02.01.001 5	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	90.000.000	90.000.000	100,00	-	-
5.1.02.02.01.002 6	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.000.000	12.000.000	100,00	-	-
5.1.02.02.01.005 0	Belanja Jasa Kalibrasi	14.200.000	10.420.000	73,38	3.780.000	26,62
5.1.02.02.04.005 8	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Udara Lainnya	15.200.000	11.783.690	77,52	3.416.310	22,48
5.1.02.02.05.004 3	Sewa Hotel	2.000.000	1.503.000	75,15	497.000	24,85
5.1.02.04.01.000 1	Perjalanan Dinas Biasa	89.500.000	78.024.582	87,18	11.475.418	12,82
5.2.02.05.02.000 1	Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga	60.500.000	50.422.900	83,34	10.077.100	16,66
2.11.03.2.03	PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LH KABUPATEN/KOTA	96.394.950	94.594.530	98,13	1.800.420	1,87
2.11.03.2.03.000 9	Pelaksanaan Rehabilitasi	96.394.950	94.594.530	98,13	1.800.420	1,87
5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan ATK	410.000	310.800	75,80	99.200	24,20

5.1.02.01.01.002 5	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	365.000	338.550	92,75	26.450	7,25
5.1.02.01.01.002 6	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	299.950	282.810	94,29	17.140	5,71
5.1.02.01.01.005 8	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.200.000	3.200.000	100,00	-	-
5.1.02.02.04.003 6	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.400.000	5.400.000	100,00	-	-
5.1.02.02.05.004 3	Sewa Hotel	9.000.000	8.280.000	92,00	720.000	8,00
5.1.02.04.01.000 1	Perjalanan Dinas Biasa	45.720.000	44.782.370	97,95	937.630	2,05
5.1.02.05.02.000 1	Jasa Yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	32.000.000	32.000.000	100,00	-	-
2.11.04	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	177.547.810	161.905.765	91,19	15.642.045	8,81
2.11.04.2.01	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	177.547.810	161.905.765	91,19	15.642.045	8,81
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	177.547.810	161.905.765	91,19	15.642.045	8,81
5.1.02.01.01.000 1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	56.056.000	56.056.000	100,00	-	-
5.1.02.01.01.000 2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	5.000.000	5.000.000	100,00	-	-
5.1.02.01.01.000 4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.360.000	-	-	2.360.000	100,00
5.1.02.01.01.000 8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	10.000.000	10.000.000	100,00	-	-
5.1.02.01.01.001 2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.000.000	5.000.000	100,00	-	-
5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	74.060	59.700	80,61	14.360	19,39
5.1.02.01.01.002 5	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	710.000	631.300	88,92	78.700	11,08
5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan					

6	Kantor-Bahan Cetak	5.182.750	3.294.765	63,57	1.887.985	36,43
5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan					
7	Kantor-Benda Pos	200.000	200.000	100,00	-	-
5.1.02.01.01.003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan					
1	Kantor-Alat Listrik	5.475.000	5.475.000	100,00	-	-
5.1.02.01.01.005	Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000	1.594.000	28,46	4.006.000	71,54
5.1.02.02.01.001	Belanja Jasa Tenaga Penanganan					
6	Prasarana dan Sarana Umum	10.500.000	10.500.000	100,00	-	-
5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	36.000.000	36.000.000	100,00	-	-
5.1.02.02.01.007	Belanja Lembur	3.900.000		-	3.900.000	100,00
5.1.02.02.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.490.000	28.095.000	89,22	3.395.000	10,78
2.11.05	PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	44.804.010	43.257.020	96,55	1.546.990	3,45
2.11.05.2.01	PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	44.804.010	43.257.020	96,55	1.546.990	3,45
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	44.804.010	43.257.020	96,55	1.546.990	3,45
5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan					
4	Kantor-Alat Tulis Kantor	74.060	58.900	79,53	15.160	20,47
5.1.02.01.01.002	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-					
5	Kertas dan Cover	290.000	259.400	89,45	30.600	10,55
5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan					
6	Kantor-Bahan Cetak	299.950	282.810	94,29	17.140	5,71
5.1.02.01.01.005	Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000	2.391.000	99,63	9.000	0,38

5.1.02.02.01.002 6	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.000.000	12.000.000	100,00	-	-
5.1.02.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.740.000	28.264.910	95,04	1.475.090	4,96
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	97.425.000	77.813.212	79,87	19.611.788	20,13
2.11.06.2.01	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	97.425.000	77.813.212	79,87	19.611.788	20,13
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	55.065.000	39.664.622	72,03	15.400.378	27,97
5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	425.000	283.050	66,60	141.950	33,40
5.1.02.01.01.002 5	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	300.000	279.720	93,24	20.280	6,76
5.1.02.01.01.002 9	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	500.000	444.000	88,80	56.000	11,20
5.1.02.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53.840.000	38.657.852	71,80	15.182.148	28,20
2.11.06.2.01.05	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi & Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup	42.360.000	38.148.590	90,06	4.211.410	9,94

5.1.02.01.01.002 5	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	225.000	209.790	93,24	15.210	6,76
5.1.02.01.01.002 9	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	125.000	111.000	88,80	14.000	11,20
5.1.02.01.01.005 2	Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000	1.756.800	54,90	1.443.200	45,10
5.1.02.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.810.000	36.071.000	92,94	2.739.000	7,06
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	45.289.900	39.079.807	86,29	6.210.093	13,71
2.11.07.2.01	PENGAKUAN MHA, KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	45.289.900	39.079.807	86,29	6.210.093	13,71
2.11.07.2.01.000 1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	45.289.900	39.079.807	86,29	6.210.093	13,71
5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	140.000	116.550	83,25	23.450	16,75
5.1.02.01.01.002 5	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	725.000	671.550	92,63	53.450	7,37
5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	879.900	-	-	879.900	100,00
5.1.02.01.01.002 9	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	625.000	555.000	88,80	70.000	11,20
5.1.02.01.01.005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	-	-	1.200.000	100,00
5.1.02.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.720.000	37.736.707	90,45	3.983.293	9,55

2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	26.759.950	24.798.780	92,67	1.961.170	7,33
2.11.08.2.01	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LH UNTUK LEMABAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.759.950	24.798.780	92,67	1.961.170	7,33
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	26.759.950	24.798.780	92,67	1.961.170	7,33
5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	55.000	38.850	70,64	16.150	29,36
5.1.02.01.01.002 5	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	665.000	618.270	92,97	46.730	7,03
5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	319.950	302.410	94,52	17.540	5,48
5.1.02.01.01.005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.320.000	8.169.250	98,19	150.750	1,81
5.1.02.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.400.000	15.670.000	90,06	1.730.000	9,94
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	70.044.950	59.352.500	84,73	10.692.450	15,27
2.11.09.2.01	PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	70.044.950	59.352.500	84,73	10.692.450	15,27
2.11.09.2.01.000 1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	70.044.950	59.352.500	84,73	10.692.450	15,27
5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	285.000	223.110	78,28	61.890	21,72

5.1.02.01.01.002 5	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	290.000	268.620	92,63	21.380	7,37
5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	399.950	380.810	95,21	19.140	4,79
5.1.02.01.01.005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000	-	-	6.000.000	100,00
5.1.02.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	63.070.000	58.479.960	92,72	4.590.040	7,28
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	57.488.000	42.935.910	74,69	14.552.090	25,31
2.11.10.2.01	PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA	57.488.000	42.935.910	74,69	14.552.090	25,31
2.11.10.2.01.04	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	40.818.000	33.142.830	81,20	7.675.170	18,80
5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	68.000	58.830	86,51	9.170	13,49
5.1.02.01.01.005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000	397.000	99,25	3.000	0,75
5.1.02.02.01.002 6	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000	24.000.000	100,00	-	-
5.1.02.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.350.000	8.687.000	53,13	7.663.000	46,87
2.11.10.2.01.05	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Yang Ditangani Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	16.670.000	9.793.080	58,75	6.876.920	41,25
5.1.02.01.01.002 5	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	750.000	699.300	93,24	50.700	6,76
5.1.02.01.01.005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000	397.000	99,25	3.000	0,75

5.1.02.02.01.001 5	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	5.000.000	3.211.780	64,24	1.788.220	35,76
5.1.02.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.520.000	5.485.000	52,14	5.035.000	47,86
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.974.094.83 0	3.718.839.44 5	93,58	255.255.385	6,42
2.11.11.2.01	PENGELOLAAN SAMPAH	3.974.094.83 0	3.718.839.44 5	93,58	255.255.385	6,42
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	84.718.610	80.384.265	94,88	4.334.345	5,12
5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	74.060	59.700	80,61	14.360	19,39
5.1.02.01.01.002 5	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	290.000	259.400	89,45	30.600	10,55
5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	494.550	464.580	93,94	29.970	6,06
5.1.02.01.01.005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000	3.188.000	99,63	12.000	0,38
5.1.02.02.01.000 3	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	2.000.000	-	-	2.000.000	100,00
5.1.02.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78.660.000	76.412.585	97,14	2.247.415	2,86
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	155.730.000	129.838.710	83,37	25.891.290	16,63
5.1.02.01.01.001 2	Belanja Bahan-bahan Lainnya	118.730.000	117.838.710	99,25	891.290	0,75
5.2.02.03.01.000 6	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	10.000.000	-	-	10.000.000	100,00
5.2.02.05.02.000 3	Belanja Modal Alat Pembersih	27.000.000	12.000.000	44,44	15.000.000	55,56

2.11.11.2.01.20	Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	3.733.646.220	3.508.616.470	93,97	225.029.750	6,03
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	527.290.000	499.743.700	94,78	27.546.300	5,22
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.614.220	854.500	52,94	759.720	47,06
5.1.02.01.01.0025	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	1.670.000	1.515.600	90,75	154.400	9,25
5.1.02.01.01.0029	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.210.000	1.199.000	99,09	11.000	0,91
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.430.000	15.518.100	66,23	7.911.900	33,77
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	3.000.000	1.964.000	65,47	1.036.000	34,53
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.000.000	12.000.000	100,00	-	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.479.600.000	2.384.500.000	96,16	95.100.000	3,84
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	21.000.000	21.000.000	100,00	-	-
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	98.592.000	75.296.000	76,37	23.296.000	23,63
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Besar Darat-Axcavator	62.000.000	61.877.000	99,80	123.000	0,20
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Besar Darat-Loader	62.000.000	36.937.000	59,58	25.063.000	40,42
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	10.000.000	9.685.000	96,85	315.000	3,15
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	302.000.000	282.588.760	93,57	19.411.240	6,43
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	52.600.000	40.490.500	76,98	12.109.500	23,02

	Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.750.000	2.645.000	96,18	105.000	3,82
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47.890.000	47.031.210	98,21	858.790	1,79
5.2.04.03.08.0002	Belanja Modal Instalasi Jaringan Pipa Gas	25.000.000	13.771.100	55,08	11.228.900	44,92
JUMLAH		10.622.061.065	9.580.059.172	90,19	1.042.001.893	9,81

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja Evaluasi Triwulan IV Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup kab Luwu Timur telah menyajikan hasil atas pencapaian kinerja untuk Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (ITL). Capaian kinerja indikator sasaran tidak memenuhi atau masih kurang dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti limbah dari rumah tangga, limbah industri, sampah, penggundulan hutan dan penggunaan bahan kimia seperti pestisida dan insektisida, emisi dari kendaraan bermotor, limbah asap industri, kebakaran hutan dan pembakaran sampah serta meningkatnya bukaan lahan yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur.

Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur yang tertuang dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2021 telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- Adapun rekomendasi terkait peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur adalah sebagai berikut :
- Memperkuat sinergi dan kolaborasi Lintas sektor serta bersama-sama dengan bidang Penataan dan Penataan Lingkungan serta bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Pertamanan terkait
 - Meningkatkan kegiatan-kegiatan terkait penanaman pohon dan penghijauan agar kab/kota dapat menyeimbangkan kondisi ekologis kota diantaranya yaitu meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan mengatur iklim mikro.

- Meningkatkan pemahaman dan partisipasi mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar dalam masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai komponen IKLH yakni IKA, IKU dan IKL.
- Pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan baik kepada Lembaga Masyarakat, Dunia Pendidikan dan Dunia Usaha dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
- Menggalakkan kegiatan penanaman pohon di pekarangan atau lahan di sekitar lingkungan rumah dan tempat kerja dapat meningkatkan luasan ruang terbuka hijau.

Melakukan penambahan ruang lingkup akreditasi untuk parameter yang dibutuhkan dalam pengujian sampel air sungai, air danau bahkan air limbah di UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, sehingga bisa mempercepat hasil pengujian dan tidak menghambat dalam proses penyusunan Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

pemantauan kualitas air pada 7 sungai dan 2 danau adalah 24,92 sedangkan target IKA pada tahun 2023 sebesar 28.00. Nilai IKA yang diperoleh belum memenuhi target yang sudah ditentukan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan rumus, bobot pengali setiap indeks dan perubahan jumlah parameter yang dipersyaratkan. Perhitungan IKA pada tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pada aturan baru tersebut ditentukan bahwa nilai maksimum IKA adalah **70** (Lampiran 1 Permen KLHK No 27 Tahun 2021).

- Pengujian Sampel air sungai dan danau dilakukan di 2 Laboratorium yakni Laboratorium Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Selatan dan Laboratorium di UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dengan 25 parameter sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk proses pembuatan laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
- Keterlambatan pengiriman data hasil pengukuran kualitas udara ambien metode *Passive Sampler* dari Direktorat Pengendalian Pencemaran yang digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Udara (IKU).
- Kurangnya data mengenai lingkungan hidup Kabupaten Luwu Timur.
- Fungsi koordinasi yang belum optimal antar instansi terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan sehingga terkadang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak berjalan sesuai rencana.
- Pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu sehingga beberapa kegiatan mengalami keterlambatan yang mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran.

-
- Sarana dan prasarana pendukung belum lengkap.
 - Terbatasnya aparatur Dinas Lingkungan Hidup baik dari segi kualitas dan kuantitas.
- Adapun rekomendasi terkait peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur adalah sebagai berikut :
- Meningkatkan Pengawasan kegiatan Usaha yang berdampak pada lingkungan seperti pertambangan, perkebunan, industri dll.
 - Meningkatkan pemahaman dan partisipasi mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar dalam masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai komponen IKLH yakni IKA, IKU dan IKL.
 - Menggalakkan kegiatan penanaman pohon di pekarangan atau lahan di sekitar lingkungan rumah dan tempat kerja dapat meningkatkan luasan ruang terbuka hijau yang baru.
 - Melakukan penambahan ruang lingkup akreditasi untuk parameter yang dibutuhkan dalam pengujian sampel air sungai, air danau bahkan air limbah di UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, sehingga bisa mempercepat hasil pengujian dan tidak menghambat dalam proses penyusunan laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

- Tindak lanjut terhadap hasil rekomendasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Tabel 4.1

**Tindak lanjut terhadap hasil rekomendasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2024**

NO	Temuan evaluasi AKIP Tahun 2024	Tindak lanjut temuan evaluasi AKIP Tahun 2024
1	2	3
1	Melakukan sosialisasi kepada seluruhnya pegawai untuk merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan	Telah ditindaklanjuti dalam penyusunan RKA, dilakukan sosialisasi untuk merumuskan dan menetapkan target kinerja
2	Memformalkan pedoman teknis/SOP pengukuran kinerja dalam bentuk SK Kepala OPD	Telah ditindaklanjuti dengan membuat pedoman pengukuran dan SOP pengumpulan laporan triwulan dengan nomor 09 tahun 2023
3	Membuat laporan monitoring evaluasi secara berjenjang sampai pada tingkat staf/individu	Telah ditindaklanjuti dengan membuat laporan evaluasi secara berjenjang mulai dari pejabat sampai pada staf
4	Pengukuran kinerja didasarkan dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, namun hal ini perlu pembahasan bersama dengan dinas terkait dalam hal dasar hukumnya.	Akan dilakukan koordinasi dengan dinas terkait pengukuran kinerja didasarkan dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan
5	Pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan, baik struktural maupun fungsional	Capaian atas kinerja menjadi penilaian pimpinan untuk penempatan dan/atau promosi jabatan atau penghapusan jabatan
6	Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (Revocusing) organisasi	Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian organisasi
7	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi	Evaluasi akuntabilitas internal dilakukan dengan mengumpulkan laporan/data dari masing-masing bidang melalui whatsapp atau email.
8	Target yang ditetapkan dalam perencanaan (achievable) belum menantang dan realistis	Tahun 2024, target yang ditetapkan dalam perencanaan sudah menantang dan realistis
9	Unit kerja telah membuat laporan monev berjenjang bidang sampai seksi tetapi dari seksi ke staf	Laporan monev berjenjang sudah dilakukan sampai ke staf
10	Agar rekomendasi hasil evaluasi AKIP dan evaluasi berjenjang ditindaklanjuti sehingga ada perbaikan dan peningkatan kinerja	Rekomendasi hasil evaluasi AKIP telah ditindaklanjuti dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Dengan adanya kendala dan strategi pemecahan masalah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur kedepannya sehingga semua tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Malili, Januari 2025

Kepala Dinas,



Drs. ANDI MAKKARAKA.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650406 198603 1 017

L A M P I R A N



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2024

Malili, Januari 2023

Pihak Kedua

BUPATI LUWU TIMUR



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Pihak Pertama

KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KAB. LUWU TIMUR



Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Peningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air	28 Point
		Indeks Kualitas Udara	9.60 Point
		Indeks Tutupan Lahan	10.50 Point
	Peningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah	Indeks Sakip Perangkat Daerah	60.57 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 3,744.328.656.00	APBD
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 324.576.940.00	APBD
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 618.975.412.00	APBD
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp 147.909.060.00	APBD
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp 59.854.060.00	APBD

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2024

- | | | | |
|---|---|-------------------|------|
| 6 | ogram Pembinaan dan Pengawasan
Terhadap Izin Lingkungan dan Izin
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup(PPLH) | Rp 109.303.000.00 | APBD |
| 7 | ogram Pengakuan Keberadaan
Masyarakat Hukum Adat (MHA),
Kearifan Lokal dan Hak MHA yang
Berkaitan Dengan PPLH | Rp 15,290,000.00 | APBD |

8	ogram Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	p 33.543.262.00	APBD
No	Program	Anggaran	Keterangan
9	ogram Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	p 10,920,000.00	APBD
10	ogram Pengelolaan Persampahan	p 3,554,615,460.00	APBD
JUMLAH		p 8.619.315.850.00	APBD

Malili, Januari 2023

Pihak Kedua
BUPATI LUWU TIMUR



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Pihak Pertama
KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KAB. LUWU TIMUR



Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si

